

**OPTIMALISASI KEPENGURUSAN JAKMANIA DALAM RANGKA MENGURANGI
TINDAK KEKERASAN KOLEKTIF SUPORTER PERSIJA (JAKMANIA)
OLEH POLRES METRO JAKARTA SEALATAN**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**BAMBANG YUGO PAMUNGKAS
NPM : 0906595200**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
FAKULTAS PASCASARJANA
JAKARTA
2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Bambang Yugo Pamungkas

NPM : 0906595200

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Bambang Yugo Pamungkas
NPM : 0906595200
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Tesis : **OPTIMALISASI KEPENGURUSAN JAKMANIA
DALAM RANGKA MENGURANGI TINDAK
KEKERASAN KOLEKTIF SUPORTER PERSIJA
(JAKMANIA) OLEH POLRES METRO JAKARTA
SEALATAN**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi ()

Penguji : Surya Dharma, MPA. Ph.D ()

Penguji : Drs. Ahwil Luthan, SH. MM. MBA ()

Penguji : Drs. PH. Hutadjulu, SH. MM ()

Ditetapkan di :

Tanggal :

UCAPAN TERIMA KASIH

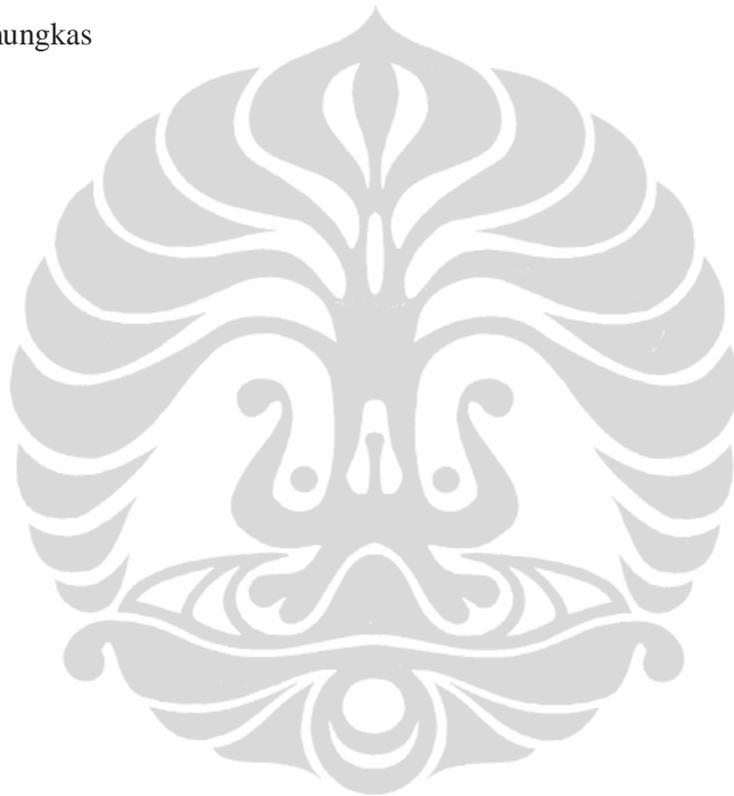
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi, selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Surya Dharma MPA. Ph.D., Komjen Pol (Purn) Drs. Ahwil Lutan, SH. MM. MBA., dan Kombes Pol (Purn) Drs. PH Hutadjulu, SH. MM yang bersedia menjadi penguji dan memberikan saran pada tesis ini.
3. DR Hince Pandjaitan, AKBP Novian Pratama Psi. Msi, Kompol Hary Sulistiadi SIK. dan seluruh Pengurus Jakmania di Stadion Lebakbulus yang meluangkan waktu kepada kami untuk bertatap muka di antara kesibukan sehari-hari.
4. Rekan-rekan mahasiswa Program Kajian Ilmu Kepolisian Angkatan XIV Universitas Indonesia yang bersama-sama saling memberikan dorongan dalam menyelesaikan studi ini.
5. Para Staf Program Kajian Ilmu Kepolisian Drs. PH. Hutadjulu, SH. MM., Kang Banyu, Kang Willy, Mbak Rohana, Pak Zaidin, Kang Syamsir, dan Pak Roko dalam memberikan dukungan selama menjalani pendidikan sampai dengan selesainya tesis ini.
6. Istri tercinta Hj. Siti Sutinah S. SH. Msi., yang bersama-sama menyelesaikan studi S2 sehingga selalu memberikan energi dalam kompetisi kami berdua untuk menyelesaikan studi S2, inspirasi serta pengorbanannya kepada penulis, dan putra kami tersayang Satya Adjie Prayugo yang selalu memberikan semangat sehingga selesainya proses pendidikan ini.
7. Bapak H. Munzaini Siri (Alm) dan Ibu Hj. Siti Sudjijah A.Md (Alm), serta Bapak H. Drs. Suhardi Duka MM. dan Ibu Hj. Harsinah, yang tidak pernah lelah dan berhenti berdoa untuk mendoakan, memberi restu serta bimbingan dan tauladan kepada putra-putrinya untuk dapat menjalani hidup penuh makna bagi keluarga, sesama dan lingkungan. Hasil tesis ini dipersembahkan khusus untuk orang tua kami sebagai wujud terimakasih, rasa hormat dan bakti penulis.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Kepolisian Indonesia, terutama dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan oleh Jakmania, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Amin.

Jakarta, Juni 2011

Bambang Yugo Pamungkas



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Yugo Pamungkas
NPM : 0906595200
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**OPTIMALISASI KEPENGURUSAN JAKMANIA DALAM RANGKA
MENGURANGI TINDAK KEKERASAN KOLEKTIF SUPORTER
PERSIJA (JAKMANIA) OLEH POLRES METRO JAKARTA
SEALATAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :
Yang menyatakan

(Bambang Yugo Pamungkas)

ABSTRAK

Nama : Bambang Yugo Pamungkas
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul : OPTIMALISASI KEPENGURUSAN JAKMANIA DALAM RANGKA MENGURANGI TINDAK KEKERASAN KOLEKTIF SUPORTER PERSIJA (JAKMANIA) OLEH POLRES METRO JAKARTA SELATAN

Keberadaan suporter sepakbola dalam suatu pertandingan tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat dikatakan suporter merupakan pemain yang ke duabelas dari tim kesebelasannya. Salah satu nama suporter sepakbola di Indonesia adalah Jakmania, suporter Jakmania adalah para pendukung sepakbola dari kesebelasan tim Persija. Kehadiran suporter Jakmania ini semakin memeriahkan suatu laga pertandingan dan dalam kacamata ekonomi kegiatan persepakbolaan ini merupakan suatu aset. Namun pada kenyataannya kehadiran suporter Jakmania justru sering menimbulkan masalah kamtibmas, terkait dengan tindakan kekerasan yang terjadi sebelum pertandingan sampai dengan pertandingan usai dilaksanakan. Tindak kekerasan ini masih sering ditemui walaupun pihak kepolisian sudah melakukan pengamanan, baik tindak kekerasan yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi petugas kepolisian. Dengan menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, dan melalui penelitian metode gabungan (*mixed method research*), tesis ini bertujuan : (1) mengetahui latar belakang proses terjadinya tindak kekerasan oleh suporter Jakmania.; (2) menganalisis hubungan antara fanatisme suporter Jakmania dan tindak kekerasan yang terjadi; (3) merumuskan pola penanggulangan yang tepat oleh pihak kepolisian (Polres Metro Jakarta Selatan) terhadap tindak kekerasan suporter Jakmania, sehubungan wilayah polres yang merupakan *basecamp* Jakmania dengan jumlah suporter Jakmania terbanyak. Novelty dari tesis dalam bidang masalah sosial yang dihadapi kepolisian ini adalah dirumuskannya suatu model penanggulangan yang tepat dalam rangka kepolisian mengantisipasi tindak kekerasan para suporter sepakbola baik ditingkat Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan masukan bagi wilayah kesatuan lainnya, serta Mabes Polri.

Kata Kunci :

Sepakbola, suporter Jakmania, tingkah laku kolektif, kekerasan, kepolisian, penanggulangan.

ABSTRACT

Name : Bambang Yugo Pamungkas
Program Study : Program of Police Science Study
Thesis Title : OPTIMIZATION IN STEWARDSHIP JAKMANIA ORDER
TO REDUCE VIOLENCE COLLECTIVE PERSIJA FANS
(JAKMANIA) BY SOUTH JAKARTA METRO POLICE

Football's supporter can not be separated with the game, so we also call the team twelve of player in the game is supporter. One name supporter of football in Indonesia is Jakmania, that supports Persija football team. Sometimes they can make the action game well and be the good asset to economical vision. In fact, Jakmania always creates social class problems, in connection with their violence actions during pre and post the game. It is always happen, though the police officer has conducted security, as a identified and an unidentified by police officers. Using the field research and combined methods research (mixed research method), it is purpose: (1) to know processing of the Jakmania violence background., (2) to analysis relation of Jakmania fanaticism and the violences , (3) to make a good procedure preventing the Jakmania violence, especially for South Jakarta Metro Police, because the region of South Jakarta Metro Police is the basecamp of Jakmania and has the most of member Jakmania. One result of thesis about the field of social problems facing the police force is to make a procedure of model to prevent the football's supporter action in the South Jakarta Metro Police, Metropolitan Police Department, and inputs for the other entity, as well as Police Headquarters.

Keywords:

Football, Jakmania supporter, collective behavior, violence, police, prevention.

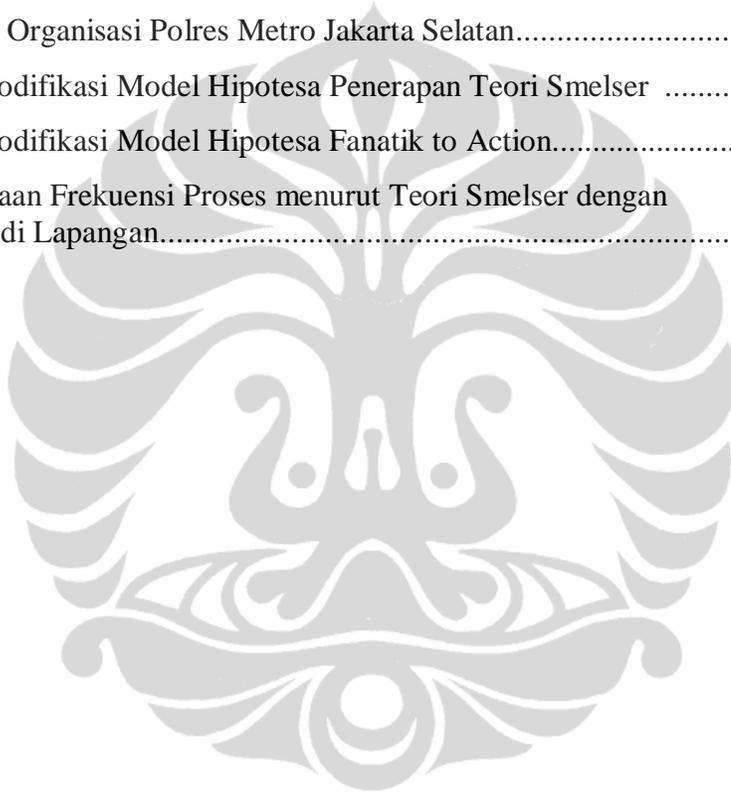
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Masalah Penelitian	8
1.3. Ruang Lingkup	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Polisi	11
2.1.1. Filsafat Kepolisian.....	11
2.1.2. Perkembangan Kepolisian.....	13
2.1.3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang.....	16
2.1.4. Strategi Pemulihan Ketertiban dan Keamanan.....	21
2.2. Tindakan Kolektif (<i>Collective Behavior</i>).....	24
2.3. Kerangka Teoritik Faktor Determinan Tindakan Kolektif.....	28
2.3.1 Faktor-Faktor Pencetus atau <i>Precipitating Factors</i>	28
2.3.1.1 Fanatisme.....	29
2.3.1.1 Ekologi Individu.....	30
2.3.2 Ketegangan struktural atau <i>structural strain</i>	31
2.3.3 Tumbuh dan menyebarnya suatu kepercayaan yang digeneralisasikan atau <i>growth and spread of generalized belief</i> ..	31
2.3.4 Faktor-Faktor Pencetus atau <i>Precipitating Factors</i>	32
2.3.5 Mobilitas Para Pemeran Serta Pada Tindakan atau <i>Mobilization of Participants for Action</i>	32
2.3.6 Bekerjanya Pengendalian Sosial atau <i>The Operation of Social Control</i>	32
2.4. Kerangka Berfikir	33

3. METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian	35
3.2. Populasi dan Sampel	36
3.3. Teknik Pengumpulan Data	38
3.4. Alat Pengumpul Data	40
3.5. Operasionalisasi dan Variabel Tahapan Tindakan Kolektif (Smelser)...	40
3.6. Teknik Analisis Data	43
3.6.1. Pendekatan Kuantitatif.....	44
3.6.1.1. Pengujian Analisis Faktor.....	44
3.6.1.2. Analisis Model Persamaan Struktural.....	44
3.6.1.3. Prosedur SEM.....	47
3.6.1. Pendekatan Kualitatif.....	48
4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Deskripsi Penelitian	49
4.1.1. Jakmania	49
4.1.1.1. Sejarah Jakmania	49
4.1.1.2. Struktur Organisasi	50
4.1.2. Polres Metro Jakarta Selatan	53
4.1.2.1. Situasi Umum	53
4.1.2.1.1. Geografi	53
4.1.2.1.2. Demografi	56
4.1.2.1.3. Sumber Daya Alam.....	58
4.1.2.2. Situasi Kesatuan	58
4.2. Gambaran Karakteristik Profil Responden	74
4.3. Pembahasan	82
4.3.1. Hasil Analisis Data	82
4.3.1.1. Pengujian Validasi dan Reabilitas	82
4.3.1.2. Uji Kecocokan	87
4.3.2. Pembahasan Model Teoritik Dengan Realita di Lapangan	95
4.3.2.1. Faktor Determinan Terjadinya Tindak Kekerasan Suporter Jakmania	95
4.3.2.2. Hubungan Fanatisme Dengan Tindak Kekerasan.....	98
4.3.2.3. Penanggulangan Tindak Kekerasan Suporter Jakmania.....	100
4.3.2.4. Optimalisasi Kepengurusan Jakmania	107
4.4. Keterbatasan Penelitian	110
5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	112
5.2. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori Ekologi Brofenbenner	31
Gambar 2.2 Model Teoritik Tindakan Kolektif yang Dikembangkan.....	33
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	35
Gambar 3.1 Model Persamaan Struktural dan Kausal.....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Jakmania	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Polres Metro Jakarta Selatan.....	61
Gambar 4.3 Hasil Modifikasi Model Hipotesa Penerapan Teori Smelser	88
Gambar 4.4 Hasil Modifikasi Model Hipotesa Fanatik to Action.....	94
Gambar 4.11 Perbedaan Frekuensi Proses menurut Teori Smelser dengan Realita di Lapangan.....	102



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Nama Suporter di Indonesia yang Meninggal Disebabkan Kekerasan Dalam Kerusuhan Sepakbola (Selama Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Nasional Periode 1995-2010)	4
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel Bebas Tahapan Smelser	41
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel Terikat Tahapan Smelser	43
Tabel 4.1	Rincian Jumlah Penduduk di Wilayah Hukum Jakarta Selatan	56
Tabel 4.2	Rincian Jumlah Penduduk Dalam Jenis Pekerjaan di Wilayah Hukum Jakarta Selatan.....	57
Tabel 4.3	Jumlah Komposisi Personel Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan	58
Tabel 4.4	Jumlah Komposisi Personel PNS Polres Metro Jakarta Selatan	59
Tabel 4.5	Data Komposisi Materiil Polres Metro Jakarta Selatan	59
Tabel 4.6	Perbandingan Data Gangguan Kamtibmas 11 (Sebelas) Jenis Kasus Tahun 2009 Dengan 2010	73
Tabel 4.7	Data Jenis Kecelakaan Lalulintas Tahun 2010.....	73
Tabel 4.8	Perbandingan Jenis Kelamin dan Usia Responden.....	75
Tabel 4.9	Presentasi Hobi Responden Selain Sepakbola	75
Tabel 4.10	Presentase Jabatan Kepengurusan Jakmania Dari Responden	76
Tabel 4.11	Presentase Jangka Waktu Responden Bergabung Jakmania	76
Tabel 4.12	Presentase Wilayah Group Responden	77
Tabel 4.13	Presentase Perkiraan Jumlah Suporter Sama Wilayah Dengan Responden	77
Tabel 4.14	Presentase Jenis Kendaraan Yang Digunakan Responden	78
Tabel 4.15	Presentase Frekuensi Responden Menonton Sepak Bola.....	78
Tabel 4.16	Presentase Teman Menonton Responden.....	79
Tabel 4.17	Presentase Alasan Responden Menonton Sepakbola	80
Tabel 4.18	Presentase Tindakan Yang Dilakukan Responden Saat Pertandingan Berlangsung.....	80
Tabel 4.19	Presentase Tindakan Suporter Yang Dilihat Responden Pada Saat Terjadi Tindakan Menyimpang	81
Tabel 4.20	Uji Reabilitas Instrumen Tindakan Kolektif	83
Tabel 4.21	Item-item Dimensi Tindakan Kolektif.....	84
Tabel 4.22	Nilai -t dan Koefisien Persamaan Struktural Pada Model Struktural	89



DAFTAR ISTILAH

AKP	: Ajun Komisaris Polisi
APP	: Acara Pimpinan Pasukan
AF	: Ancaman Faktual
BIMAS	: Pembinaan Masyarakat
BAGOPS	: Bagian Operasional
BONEK	: Bondo Nekat
DALMAS	: Pengendalian Massa
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DSPP	: Daftar Susunan Personil dan Perlengkapan
FKPM	: Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat
GELORA	: Gelanggang Olahraga
GSGB atau BELIEF	: <i>Growth and Spread of Generalized Belief</i> atau Tumbuh dan Menyebarnya Suatu Kepercayaan Yang Digeneralisasikan
HUMAS	: Hubungan Masyarakat dan Media Massa
ITWASDA	: Inspektorat Pengawasan Daerah
JAKMANIA	: Jakarta Mania, nama dari pendukung kesebelasan Persija
JAKSEL	: Jakarta Selatan
KAMTIBMAS	: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
KANIT	: Kepala Unit
KAPOLDA	: Kepala Kepolisian Daerah
KAPOLRES	: Kepala Kepolisian Resor
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
KAPOLSEK	: Kepala Kepolisian Sektor
KASAT	: Kepala Satuan
KASUBAG BIN OPS	: Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional
KIK	: Kajian Ilmu Kepolisian
KOMBES POL	: Komisaris Besar Polisi
KOMPOL	: Komisaris Polisi
KORDA	: Koordinator Daerah
KORLAP	: Koordinator Lapangan

KORWIL	: Koordinator Wilayah
MABES	: Markas Besar
METRO JAYA	: Metropolitan Jakarta Raya
MPA atau ACTION	: <i>Mobilization of Participants for Action</i> atau Mobilitas Para Pemeran Serta Pada Tindakan
PANPEL	: Panitia Pelaksana
PERSIB	: Persatuan Sepakbola Bandung
PERSIJA	: Persatuan Sepakbola Jakarta
PERSITA	: Persatuan Sepakbola Kabupaten Tangerang
PERSIWA	: Persatuan Sepakbola Wamena
PF atau PRECIPIT	: <i>Precipitating Factors</i> atau Faktor-faktor Pencetus
PH	: <i>Police Hazard</i>
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLMAS	: Pemolisian Masyarakat
POLRES	: Kepolisian Resor
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
POLSEK	: Kepolisian Sektor
POM	: Polisi Militer
PSSI	: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
RANMOR R2	: Kendaraan Bermotor Roda Dua
RANMOR R4	: Kendaraan Bermotor Roda Empat
RENGIAT	: Rencana Kegiatan
RENPAM	: Rencana Pengamanan
SATFUNG	: Satuan Fungsi
SAT BIMAS	: Satuan Pembinaan Masyarakat
SAT INTELKAM	: Satuan Intelijen Keamanan
SAT LANTAS	: Satuan Lalu Lintas
SAT NARKOBA	: Satuan Narkotika dan Obat Berbahaya
SAT RESKRIM	: Satuan Reserse dan Kriminal
SAT SAMAPTA	: Satuan Kesamaptaan
SC atau CONDUCT	: <i>Structural Conduciveness</i> atau Pendorong Struktural
SDM	: Sumber Daya Manusia

SEKUM : Sekertariat Umum
SENPI : Senjata Api
SS atau STRAIN : *Structural Strain* Ketegangan Struktural
TOSC atau CONTROL: *The Operation of Social Control* atau Bekerjanya Pengendalian Sosial



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data hasil olah Lisrel.
- Lampiran 2 Lembar kuesioner dan pedoman wawancara.
- Lampiran 3 Dokumentasi.
- Lampiran 4 Dokumen.
- Lampiran 5 Riwayat hidup singkat penulis.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepakbola merupakan salah satu jenis olahraga yang paling digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penggemar sepakbola tidak mengenal usia dari anak-anak sampai dengan orang tua dan lapisan ekonomi masyarakat kelas bawah hingga konglomerat, serta penggemar sepakbola terdapat di hampir seluruh sudut kota hingga perkampungan pelosok seluruh wilayah Indonesia. Dalam pertandingan sepakbola ini esensinya yaitu persaingan, persaingan dimaksud antara dua kelompok tim sepakbola yang masing-masing kelompok beranggotakan sebelas orang, dan inilah yang dikatakan kesebelasan. Apabila kesebelasan dalam persaingan suatu laga pertandingan yang menang akan diberikan penghargaan.

Di sisi lain pertandingan sepakbola selain bermanfaat bagi kemajuan olahraga masing-masing negara dalam kejuaraan, tidak dipungkiri juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi suatu negara dan masyarakat secara umum. Seperti halnya dalam piala dunia, para pendukung tim sepakbola datang dari beberapa negara, sehingga secara tidak langsung meningkatkan pendapatan baik perpajakan, transportasi, perhotelan, media massa, dan lain sebagainya. Maka dapat dikatakan, bahwa keberadaan tim sepakbola dan pertandingan sepakbola sebagai salah satu aset perekonomian (Pandjaitan, 2011).

Keberadaan tim kesebelasan yang dibentuk, secara langsung memunculkan pendukung sepakbola yang biasa dikatakan sebagai suporter. Para suporter ini memberikan dukungan dan semangat kepada tim kesebelasan yang digemarinya. Kegemaran para suporter terhadap salah satu tim kesebelasan sepakbola yang sangat tinggi menimbulkan fanatisme atau sikap fanatik terhadap kesebelasan beserta tim kesebelasan pemain sepak bola yang didukungnya. Dukungan terhadap tim kesebelasan pemain sepak bola biasanya didasarkan atas beberapa faktor seperti asal kedaerahan, asal kenegaraan, dan lain sebagainya, faktor-faktor ini sebagai identitas atas tim pemain kesebelasan yang didukungnya. Identitas suporter sepakbola tidak terlepas dari perkembangan sepakbola di

seluruh dunia yang mengalami perubahan dinamika yang sangat cepat sesuai situasi dan kondisi sosial masing-masing negara (Brown, 1998).

Selanjutnya Soekanto (1990), menjelaskan bahwa suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu (*spectator crowds*). Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton, akan tetapi bedanya pada *spectator crowds* adalah kerumunan penonton tidak direncanakan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya tak terkendalikan. Sedangkan suatu kelompok manusia tidak hanya tergantung pada adanya interaksi didalam kelompok itu sendiri, melainkan juga karena adanya pusat perhatian yang sama. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut suporter dalam hal ini adalah tim sepakbola yang didukung dan dibelanya. Apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang bagus dari tim sepakbola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal.

Kehadiran suporter dalam suatu sepakbola menjadikan pertandingan semakin seru dan terasa lengkap, karena suporter atau penggemar sepakbola memang merupakan pihak yang banyak mempengaruhi dan terpengaruh oleh sebuah pertandingan sepakbola (Brown, 1998). Fenomena suporter ini menjadi perhatian publik, karena kehadiran mereka dalam suatu pertandingan dengan mengorbankan waktu, harta, menunda pekerjaan, bahkan meninggalkan keluarganya yang biasa dilakukan secara bersama-sama dengan populasi yang cukup banyak mencapai ribuan. Namun fenomena fanatisme ini bisa berubah menjadi suatu tindakan kebrutalan dalam suatu pertandingan sepakbola atau kerusuhan sepakbola manakala terjadi suatu gesekan atau situasi yang kurang menguntungkan. Kebrutalan suporter atau kerusuhan sepakbola ini biasanya dilakukan dengan kekerasan (*violence*) secara bersama-sama dengan suporter lainnya. Kekerasan ini dapat berakibat kerugian harta, benda, dan membahayakan nyawa suporter sendiri serta orang yang ada di sekitarnya.

Salah satu contoh suporter yang terkenal dan kental dengan pendukung yang fanatik di luar negeri seperti Eropa yaitu Inggris ada kelompok yang tergabung dalam gang dan

bersikap agresif terbentuk sekitar 1800-an disebut *hooligan*, kemudian kelompok pendukung yang ekstrem juga terdapat di Italia dengan *ultra*, suporter *hooligan* dan *ultra* oleh para pengamat disepadankan yang mempunyai sikap fanatik dengan tingkah laku agresif dan menimbulkan masalah kekerasan (Brown, 1998 : 88).

Sedangkan suporter yang cukup terkenal di dalam negeri ada dua yaitu pendukung Persija dengan julukan Jakmania atau dengan saapaan *the Jack* dan pendukung Persibaya dengan nama Bonek, kedua-duanya mempunyai *track record* dengan tingkah laku agresifnya.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2010) para suporter bola seperti Bonek melakukan tindakan agresif dipengaruhi sikap mengidolakan diri sendiri dan menganggap dirinya paling benar, dengan perkataan lain *idola specus*. Mereka berfikir tim kesayangannya adalah terbaik, sehingga kalau sampai timnya kalah pasti terjadi kecurangan, ketidakadilan, dan harus diluruskan, kalau perlu menggunakan kekerasan.

Kemudian tingkah laku para suporter dari Eropa (Inggris dan Italia) menurut Brown (1998) dipengaruhi oleh beberapa aspek. Aspek tersebut meliputi masalah politik dan kekuasaan sampai dengan masalah nasionalisme ekstrem bahkan rasisme. Tingkah laku para suporter sepakbola tersebut terutama bagi negara-negara yang mempunyai tradisi kuat mengenai sepakbola telah menjadi suatu permasalahan tersendiri, meskipun pihak aparat keamanan seperti kepolisian Inggris sudah membentuk suatu unit khusus kepolisian yang menangani permasalahan *hooligan*. Namun pada kenyatannya belum dianggap menampakkan hasilnya sehingga permasalahan ini menjadi perhatian juga para ilmuwan.

Tindakan kekerasan berupa kebrutalan atau kerusuhan yang dilakukan oleh suporter sepakbola terindikasi menjadi suatu ancaman masalah serius dalam setiap mengadakan pertandingan laga sepakbola baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu contoh kasus tindakan kekerasan yang dilakukan suporter di luar negeri akhir-akhir ini adalah di Serbia, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 yaitu aksi brutal pendukung Serbia di Stadion Luigi Ferraris saat Italia menjamu Serbia di kualifikasi Euro 2012, mereka menyanyikan lagu-lagu Kosovo dan Albania serta mengibarkan dua bendera,

yaitu satu bendera Itali dan satu lagi bendera Albania yang kemudian dilanjutkan aksi pengerusakan Stadion Luigi Ferraris dan menyerang para pendukung Itali (Kompas.com). Ini merupakan salah satu contoh perilaku kekerasan oleh suporter di luar negeri dan masih banyak beberapa kejadian serupa dan menimbulkan hilangnya nyawa baik dari suporter maupun penegak hukum.

Kemudian tindakan kebrutalan dan kerusuhan sepakbola dengan kekerasan juga marak terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat tiada musim kompetisi yang bebas dari tindakan anarkis para suporter, baik yang terjadi pada level kompetisi yang terbawah sampai dengan penyelenggaraan Liga Indonesia yang dimulai pada tahun 1994, serta Liga Super Indonesia yang notabennya baru mulai dilaksanakan pada tahun 2008. Tindak kekerasan ini selain mengakibatkan kerugian harta dan benda juga mengakibatkan hilangnya nyawa atau kasus kematian dari suporter sepakbola.

Tabel 1.1 : Data Nama Suporter di Indonesia yang Meninggal
Disebabkan Kekerasan Dalam Kerusuhan Sepakbola
(Selama Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Nasional Periode 1995-2010)

Tahun	Kejadian
1995	Suporter Persibaya an. Suhermansyah meninggal karena terhimpit suporter lain di Station Mandala Krida Yogyakarta
2002	Suporter Semen Padang an. Beri Mardias meninggal dikeroyok sekelompok orang dengan kostum orange dalam pertandingan Persija melawan Semen Padang di Liga Indonesia pada sesi babak ke-10 besar
2004	Suporter Arema an. FajarWidya Nugraha meninggal akibat terhimpit penonton di Stadion Kanjuruhan Malang
2005	Suporter Persija meninggal akibat bentrok se usai pertandingan Liga Djarum antara Persija dan Persipura
2006	Suporter Persipra an. Mince meninggal menjelang pertandingan Persipura melawan Persiwa akibat terinjak suporter lainnya
2008	Suporter Persija an. Fathul Mulyadin meninggal akibat dikeroyok sekelompok suporter Persipura se usai Semi Final Liga Djarum antara Persipura melawan PSMS

- | | |
|------|---|
| 2010 | Suporter Kediri an. Supar meninggal akibat dikeroyok sekelompok suporter dalam pertandingan Persik Kediri melawan Persib (Bandung) di Stadion Brawijaya |
| 2010 | Suporter Persibaya sebanyak 3 (tiga) orang meninggal akibat dilempari oleh suporter Pasopati di atas KA se usai pertandingan dari Bandung |

Sumber : diolah dari pemberitaan di media masa

Kebrutalan dan kerusuhan sepakbola berupa tindakan kekerasan oleh suporter menjadi masalah sosial dan kamtibmas yang berkepanjangan dalam dunia sepakbola di Indonesia. Salah satu klub suporter sepakbola besar di Indonesia pendukung dari tim Persija yang bemarkas di Jakarta dikenal dengan nama Jakmania atau dengan sapaan *The Jack*, klub suporter ini sudah memiliki struktur organisasi sejak 19 Desember 1997 dan mempunyai markas di Stadion Lebak Bulus Jakarta Selatan (Jakmania.org). Para anggota Jakmania tersebar di seluruh wilayah Jakarta termasuk pinggiran kotanya di bawah koordinator para Korwil daerah setempat. Meskipun Jakmania sudah mempunyai struktur organisasi yang meliputi unsur pusat dan koordinator wilayah, namun setiap diadakannya pertandingan sepakbola yang diikuti Persija tetap saja menuai permasalahan terkait tingkah laku para anggota Jakmania. Permasalahan tersebut terjadi karena perselisihan dengan suporter tim sepakbola lain yang awalnya disebabkan karena kekalahan, saling mengejek, dan sebagainya bahkan yang akhir-akhir ini menjadi masalah isu wasit atas keberpihakan wasit pada salah satu tim sepakbola (kompas.com). Kebrutalan dan kerusuhan sepakbola yang dilakukan dengan kekerasan oleh Jakmania selalu mengakibatkan kerugian harta, benda dan nyawa seseorang, seperti yang sudah disampaikan pada tabel 1.1, di mana salah satu kejadian perselisihan dengan menggunakan aksi kekerasan oleh Jakmania dengan antar suporter Persipura se usai pertandingan putaran Final Liga Djarum Indonesia 2008 pada tanggal 6 Februari 2008 di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat yang mengakibatkan suporter sepakbola Jakmania an. Fathul Mulyadin meninggal dunia (antaranews.com).

Yang perlu dicermati dari kejadian tanggal 6 Februari 2008 di Kawasan Gelora Bung Karno, yaitu sebelum kejadian itu pihak Polda Metro Jaya dan Jajarannya sudah melakukan antisipasi dalam rangka menghadapi ancaman kebrutalan dan kerusuhan dengan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan tersebut dilakukan dengan mengadakan razia kepada suporter sepakbola yang akan masuk ke Stadion Gelora Bung Karno serta melakukan pengamanan terbuka dan tertutup. Dalam kegiatan razia tersebut polisi menemukan dan menyita beberapa senjata tajam serta minuman keras yang disimpan di badan maupun tas para suporter (news.okezone.com). Dengan antisipasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan jajarannya, perselisihan dengan menggunakan kekerasan antar suporter tetap terjadi yang mengakibatkan seorang Jakmania meninggal.

Berdasarkan beberapa artikel media massa, kebrutalan dan kerusuhan sepakbola berupa tindakan kekerasan berdasarkan tempat kejadian bisa terjadi di dalam stadion, di luar stadion, dan di kawasan stadion, kemudian berdasarkan waktu pertandingan yaitu bisa terjadi saat sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan sesudah pertandingan. Dengan melihat kondisi tersebut, maka tindakan kekerasan ini merupakan suatu fenomena *crowd* (kerumunan), seperti yang disampaikan Le Bon (1895) bahwa keanggotaan dalam *crowd* menimbulkan perilaku anonim yang besar menyebabkan individu-individu di dalamnya berperilaku lebih agresif dan lebih anti sosial dibandingkan ketika ia seorang diri. Sedangkan tingkah laku berupa tindakan kekerasan oleh Jakmania tersebut bersifat umum dengan asosiasi yang kecil yang merupakan sebuah organisasi, hanya saja belum sempurna dan biasanya bertahan dalam tempo yang singkat.

Dengan melihat gambaran singkat mengenai tindakan kekerasan oleh Jakmania pada umumnya dilakukan secara bersama-sama, hal ini sejalan dengan pendapat Charles Tilly dalam Nitibaskara (2001: 153-154) bahwa tawuran di kalangan siswa antar sekolah, vandalisme, dan kerusuhan penonton sepakbola termasuk kekerasan kolektif primitive, karena kekerasan ini pada umumnya bersifat non politis dan mempunyai ruang lingkup komunitas lokal.

Beberapa kejadian tersebut selalu berulang. Terdapat kesan bahwa aparat keamanan khususnya Polda Metro Jaya dan jajarannya selaku penanggungjawab keamanan bersikap reaktif terhadap permasalahan ini, walaupun pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan beberapa upaya penanggulangan. Hal ini merupakan indikasi sistem operasional pihak kepolisian dikatakan kurang berjalan dengan baik seiring dengan penanganan yang terkesan terkejut atas kejadian ini.

Sedangkan aplikasi sistem operasional kepolisian yang baik dan benar mencakup beberapa hal di bawah ini :

1. Semua situasi dan kondisi dapat dikuasai.
2. Tidak ada keanehan apapun yang tersentuh, lebih-lebih tidak terdengar. Dengan dasar intel dan aktual yang baik semua dapat terbaca.
3. Dengan sistem itu semua resiko terakumulasi dengan jelas, serba pasti, kekuatan apa, berapa besarnya dan seterusnya, untuk menghadapi atau menangani. Juga cara metode yang harus digunakan, apakah dengan metode preemtif, preventif atau represif.
4. Memahami sistem berarti siap setiap saat.
5. Memahami sistem berarti setiap hari berlatih cara bertindak simultan kalau sesuatu terjadi di luar perhitungan, termasuk penggunaan kekuatan tambahan jika harus dilakukan (Kunarto, 1999 : 10).

Dengan berkembangnya situasi di mana setiap ada kegiatan pertandingan sepakbola yang diikuti oleh Persija, maka suporter Persija yang tidak lain adalah Jakmania akan selalu hadir disetiap kesempatan. Kehadiran Jakmania ini justru dipersepsikan sebagian mayoritas masyarakat khususnya Jakarta sangat identik sebagai pemicu munculnya tindakan kekerasan, secara tidak langsung memberikan *labeling* Jakmania yang identik dengan tindak kekerasan.

Dari realitas di atas peneliti berasumsi, bahwa yang mendorong Jakmania mendukung kesebelasan Persija adalah fanatisme. Kehadiran Jakmania menimbulkan ancaman gangguan kamtibmas yang berujung pada ketidaktertiban berupa tindakan kekerasan

seperti perkelahian, pengerusakan, dan sebagainya. Selanjutnya yang mendasari tindakan antara lain adalah disebabkan Jakmania tidak memiliki tiket masuk ke dalam stadion, suatu bentuk kekecewaan atas kekalahan Persija, untuk menunjukkan jatidiri, dan respon terhadap isu-isu yang berkembang seperti peranan wasit dalam suatu pertandingan yang dianggap tidak netral karena telah disuap oleh tim kesebelasan lawannya, dan lain-lain.

Atas latarbelakang tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti masalah tindak kekerasan Jakmania dan mengetahui sejauh mana peran aktif Polda Metro Jaya khususnya Polres Metro Jakarta Selatan yang wilayahnya merupakan *basecamp* dari Jakmania, sebab dari pengamatan peneliti pihak kepolisian belum bisa menangani permasalahan ini.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih beberapa acuan disertasi dan tesis sebelumnya yang dianggap cukup relevan. Disertasi tersebut berjudul “Model Pembangunan Rumah Susun Berkelanjutan di Perkotaan (Kajian Persepsi, Kepuasan dan Perilaku Penghuni Rumah Susun Cinta Kasih di DKI Jakarta)” oleh Setia Damayanti. Tesis yang dipilih yang berjudul “Pemolisian Oleh Polres Metro Tangerang Dalam Menangani Kerusakan dan Bentrok Antar Suporter Sepakbola di Stadion Benteng Tangerang” ditulis oleh Uchu Kuspriyadi dan tesis yang berjudul “Analisis Resiko Keamanan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta” ditulis oleh Eko Kristianto.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latarbelakang masalah penelitian di atas, maka dapat dilihat beberapa banyak kejadian kebrutalan dan kerusakan sepakbola dengan tindakan kekerasan yang dilakukan suporter sepakbola yang mengakibatkan kerugian harta, benda dan nyawa seseorang. Permasalahan ini juga dialami Jakmania selaku pendukung Persija dengan bukti beberapa fakta peristiwa pengerusakan yang terjadi di dalam maupun di luar stadion, dan bentrokan antar suporter yang mengakibatkan luka-luka hingga meninggalkannya salah satu atau beberapa suporter dari Jakmania.

Tindakan kekerasan yang dilakukan Jakmania diantisipasi oleh Polda Metro Jaya khususnya Polres Metro Jakarta Selatan yang mempunyai wilayah *basecamp* Jakmania dengan melakukan pengamanan terbuka dan tertutup serta razia sebelum pertandingan. Namun pada kenyataannya kejadian tindak kekerasan oleh Jakmania tetap masih terjadi, walaupun dari pihak Jakmania telah membentuk suatu susunan organisasi berikut koordinator wilayah.

Dari pokok permasalahan di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana model teoritik terjadinya tindak kekerasan kolektif oleh suporter Jakmania ?
2. Adakah hubungan antara fanatisme dan tindak kekerasan kolektif pada Jakmania ?
3. Mengapa tindakan kekerasan oleh Jakmania tetap terjadi, meskipun Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan upaya penanggulangannya ?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup masalah penelitian ini meliputi pola-pola tindak kekerasan kolektif Jakmania dalam lingkup komunitasnya yang dihubungkan upaya kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang letak wilayahnya sebagai *basecamp* Jakmania.

1.4 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti membagi tiga tujuan penelitian yaitu : pertama, penelitian ini bertujuan mengetahui latarbelakang, proses, dan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan kolektif Jakmania. Kedua, penelitian ini bermaksud mengetahui peran dan fungsi pihak Polres Metro Jakarta Selatan dalam menanggulangi tindak kekerasan kolektif yang dilakukan Jakmania, hal ini berkaitan dengan *basecamp* Jakmania yang terletak di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka upaya penanggulangan tindak kekerasan Jakmania.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini meliputi manfaat akademis dan manfaat praktis, diuraikan sebagai berikut: pertama, manfaat akademis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada pengembangan ilmu kepolisian. Dan kedua, manfaat praktis, yaitu menjadi masukan kepada kepolisian khususnya Polda Metro Jaya sub Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka menangani tindakan kolektif berupa kekerasan oleh Jakmania.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memahami masalah penelitian dan memaksimalkan jalannya penelitian, serta mempelancar proses pengumpulan data dan analisa di lapangan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa konsep dan teori. Konsep dan teori yang peneliti pilih disesuaikan dengan judul pada penelitian ini, sehingga peneliti mengklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu konsep dan teori yang membahas polisi dan tindakan kolektif (*collective behavior*).

2.1 Polisi

Kepolisian merupakan unsur penegak hukum dan ketertiban umum dalam sistem keamanan dalam negeri, dengan demikian kepolisian dituntut mampu menciptakan suatu kepastian hukum, keadilan, dan keterbukaan dalam melaksanakan seluruh fungsi dan tugasnya (Momo Kelana, 2010). Sehingga segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan terkecil sampai dengan nasional merupakan tanggungjawab pihak kepolisian, termasuk di dalamnya kerusuhan dengan tindakan kekerasan yang terjadi pada pertandingan sepakbola, seperti contohnya kerusuhan dengan kekerasan yang dilakukan oleh suporter Jakmania akhir-akhir ini.

Dalam rangka memahami konsep-konsep kepolisian dan teori upaya kepolisian dalam menanggulangi ketidakamanan dan ketidaktertiban, sehingga peneliti membagi pembahasan tentang kepolisian dalam beberapa sub bab, yaitu : pertama, membahas mengenai filsafat kepolisian; kedua, perkembangan kepolisian; ketiga, fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian; dan keempat, strategi pemulihan ketertiban dan penurunan kejahatan.

2.1.1 Filsafat Kepolisian

Penggunaan kata polisi pada awalnya berasal dari bahasa Yunani yaitu *politeia* yang mempunyai makna komponen pemerintahan kota. Kemudian penggunaan kata istilah polisi digunakan oleh beberapa negara yang disesuaikan dengan pola tata bahasa masing-

masing negara, sehingga istilah polisi ditiap-tiap negara berbeda-beda, seperti di Inggris dengan sebutan *constable*, di Amerika Serikat dengan sebutan *sheriff*, di Jerman dengan *polizei*, di Spanyol dengan *policia*, di Belanda dengan *politie*, di Indonesia sendiri dengan polisi dan sebagainya sesuai perkembangan masing-masing negara (Ahwil Luthan, 2010a).

Perkembangan arti dari kata polisi di Indonesia mempunyai banyak makna, seperti menurut pendapat Harsja W. Bachtiar (1994) bahwa polisi sama dengan petugas kepolisian yang berarti mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram, dalam pelaksanaan tugasnya di mana tugas kepolisian merupakan bagian dari seni (*craft*). Kemudian menurut Parsudi Suparlan (2004a : 72), pengertian mendasar dan umum polisi adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang fungsinya untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat.

Sedangkan Momo Kelana (2010) berpendapat, polisi adalah fungsi dari masyarakat dan perkembangan masyarakat. Segala hal yang berkaitan dengan polisi bersifat progresif yang setiap saat melakukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat yang dilayaninya.

Hal senada juga dikemukakan oleh David H. Bailey (1998) yang mengatakan, pada kondisi masyarakat demokrasi modern saat ini diperlukan suatu bentuk polisi masa depan yang mempunyai fungsi dan peran kepolisian lebih menekankan pada tugas-tugas kepolisian yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan dan ketertiban masyarakat.

Dengan demikian keberadaan fungsi kepolisian dalam masyarakat adalah menyelesaikan segala bentuk masalah sosial yang berkenaan dengan suatu gejala yang ada dalam

kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan pada anggota masyarakat tersebut (Suparlan, 2004a : 22).

Makna dari kepolisian secara normatif juga dimuat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Perkembangan Kepolisian

Perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kinerja kepolisian seiring dengan perkembangan hukum, politik, dan ekonomi pada tatanan kehidupan masyarakat. Dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat tersebut, maka kedudukan dan peran kepolisian juga berkembang mengikuti tuntutan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Gambaran umum perkembangan kedudukan dan peran kepolisian dapat dilihat dari kepolisian pada periode pra kemerdekaan, periode orde lama, periode orde baru dan periode reformasi (Mabes Polri, 1999).

Pada periode pra kemerdekaan dibagi menjadi dua jaman, yaitu pertama, kepolisian pada jaman Hindia Belanda atau kolonial, di mana kedudukan kepolisian merupakan bagian dari institusi administratif pemerintahan Hindia Belanda yang diurus oleh *Binnenlandsch Bestuur* (Departemen Dalam Negeri). Sedangkan peran kepolisian dalam penegakkan hukum berada di bawah *Procureur Generaal* (Penuntut Umum), dan *Procureur Generaal* membawahi *Rechts Politie* (Polisi Undang-undang atau Penyidik Polisi). Namun operasionalisasi kepolisian penuh di bawah *Resident* (membawahi beberapa kabupaten atau mempunyai kedudukan di atas kepala daerah namun di bawah gubernur). Pada saat itu peran kepolisian penuh hanya sebagai alat kolonial saja. Dan Kedua, kepolisian pada jaman Jepang, di mana kedudukan kepolisian mengikuti sistem pemerintahan Jepang. Kepolisian pada jaman itu disusun secara regional dan menerima petunjuk atau perintah langsung komandan tentara setempat. Tiap-tiap kekuasaan dibagi dalam *syu* (sama Karisedenan) tiap-tiap *syu* di kepalai oleh *Syutyukan* (Kepala

Kepolisian Karisedenan), pimpinan kepolisian sehari-hari diduduki oleh *Keisatsu Butyo* (Kepala Bagian Kepolisian) atau *Chiang Butyo*. Pada masa itu kepolisian tetap masih merupakan alat kolonial atau kekeasaan tentara Jepang.

Periode orde lama dibagi menjadi empat jaman, yaitu : pertama, kepolisian jaman revolusi fisik, setelah Proklamasi kemerdekaan terjadi perubahan ketatanegaraan dan pemerintahan dari status dijajah menjadi merdeka. Hal ini juga berpengaruh pada perubahan polisi kolonial menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Ketetapan Pemerintah Nomor 11/SD/1946, pada tanggal 1 Juli 1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara R.I. dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara (KKN) yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Inilah saat lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup seluruh wilayah R.I. dan seluruh tugas kepolisian termasuk ikut bertempur. Melalui Penetapan Pemerintah Nomor 1/1948 tanggal 4 Pebruari 1948, kedudukan Polri menjadi di bawah Presiden / Wakil Presiden. Kedua, kepolisian jaman RIS, sesuai dengan Konstitusi RIS pada Bagian IV (Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum) pada pasal 51 bahwa urusan ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum menjadi tanggungjawab negara bagian. Dan semua badan kepolisian di bawah Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS sesuai dengan Tap Presiden RIS Nomor 150 Tahun 1950. Ketiga, jaman Demokrasi Parlementer, setelah RIS bergulir kembali ke NKRI sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia pasal 130 bahwa untuk pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan yang diatur dengan undang-undang. Kepolisian bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, dan selain melaksanakan tugas kepolisian juga ikut aktif dalam penumpasan pemberontakan dan operasi-operasi militer. Dan keempat, pada jaman Demokrasi Terpimpin, setelah dikeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 berdampak pada kedudukan kepolisian. Berdasarkan Keppres Nomor 153 tahun 1959 tanggal 10 Juli 1959, Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan sebagai Menteri Negara *ex-officio* dan selanjutnya menjadi Menteri Muda Kepolisian sejajar dengan Menteri Muda Pertahanan, Menteri Muda Kehakiman dan Menteri Muda Veteran. Melalui TAP MPR Nomor II tahun 1960, Kepolisian dinyatakan masuk dalam jajaran ABRI dan melalui Keppres Nomor 21 tahun 1960, sebutan Menteri Muda Kepolisian diganti dengan Menteri. Kedudukan Polri

sebagai salah satu unsur ABRI lebih ditegaskan dalam UU Nomor 13 tahun 1961. Sehingga pada saat itu kepolisian selain berperan dalam tugas kepolisian juga sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial politik.

Periode orde baru, pada jaman ini Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap sebagai unsur ABRI tetapi bukan militer. Di mana pada saat itu Presiden memegang kekuasaan tinggi atas kepolisian yang dibantu Menhankam dan Pangab, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bagian organik dari Mabes ABRI atau Dephankam. Pada periode ini undang-undang yang mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami tiga kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, dirubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988, dan terakhir dirubah menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997. Ketiga undang-undang tersebut menggambarkan kepolisian masih sebagai alat kekuasaan yang militeristik dan mengedepankan tindakan represif.

Dan periode reformasi, gejolak reformasi dimulai pada tanggal 28 Mei 1998 dengan adanya tuntutan pergantian Presiden, hal ini tanda dimulainya era kebangkitan demokrasi atau reformasi. Tuntutan reformasi antara lain keseimbangan kekuasaan demokrasi, desentralisasi, supremasi hukum, perlindungan HAM, transparansi, akuntabilitas, dan *good governance*. Melihat tuntutan masyarakat atas reformasi secara langsung mempengaruhi kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui Inpres No. 2 tahun 1999 tentang Langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI, yang selanjutnya menjadi landasan formal bagi reformasi Polri. Berdasarkan Inpres tersebut, mulai 1 April 1999, sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri dialihkan ke Dephankam, yang selanjutnya menjadi titik awal dimulainya proses reformasi Polri secara menyeluruh menuju Polri yang profesional dan mandiri serta sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. MPR dalam Sidang tahunannya Agustus 2000 kemudian menetapkan dua buah Tap MPR, yaitu TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dan pada akhirnya disahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan wujud kepolisian yang mandiri dan professional, yaitu meliputi kepolisian

yang bebas intervensi politik, berwatak sipil, berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, dan kepolisian sebagai pelindung, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta penegak hukum.

2.1.3 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian

Fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan fungsi kepolisian sesuai pasal 2 dijelaskan bahwa :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menjalankan fungsi kepolisian melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat dan pemerintahan, hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) bahwa :

Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. kepolisian khusus;
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Selanjutnya peran dari kepolisian sendiri dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), bahwa:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri;

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kemudian mengenai tugas pokok kepolisian dalam hal ini Polri dijelaskan dalam pasal 13 bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjabaran dari pelaksanaan tugas pokok kepolisian sesuai pasal 13 Polri dituangkan pada pasal 14 ayat (1), yaitu :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila melihat fungsi dan tugas kepolisian yang dimuat dalam pasal-pasal di atas, hal ini jelas bahwa seluruh keamanan dan ketertiban dalam negeri menjadi tanggungjawab pihak kepolisian termasuk didalamnya pelaksanaan kegiatan pertandingan sepakbola yang melibatkan suporter Jakmania.

Kemudian dalam pelaksanaan tugas kepolisian dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan sesuai pasal 13 dan 14 di atas, Polri diberikan wewenang yang secara umum sesuai pasal 15 ayat (1), yaitu :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas proses pidana yang meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana tertuang di pasal 13 dan 14, Polri diberikan wewenang sesuai pasal 16 ayat (1), yaitu :

- Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Yang dimaksud tindakan lain dalam proses pidana baik penyelidikan dan penyidikan dalam pasal 16 ayat (1) huruf l dapat dilakukan oleh anggota Polri apabila dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud apabila memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 16 ayat (2), yaitu :

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan Polri lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya lainnya yang bersifat khusus, kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 15 ayat (2), yaitu

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain beberapa kewenangan secara prosedur tetap kepolisian di atas, Polri juga diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk mengatasi situasi gangguan keamanan dan ketertiban tertentu termasuk menanggulangi tindakan kekerasan melalui diskresi

kepolisian. Maksud dari wewenang diskresi kepolisian tertuang dalam pasal 18 ayat (1) yaitu :

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Diskresi dapat dilakukan oleh anggota kepolisian berdasarkan penilaian sendiri, namun dalam prakteknya kewenangan diskresi kepolisian tidak serta merta mudah digunakan oleh setiap anggota Polri meskipun dalam lingkup tugas dan kewenangnya, seperti penanggulangan tindak kekerasan. Maka tindakan diskresi tersebut harus memenuhi syarat sesuai pasal 16 ayat (2), yaitu

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam menangani suatu permasalahan atau kasus yang terjadi, setiap anggota atau pejabat kepolisian harus berpedoman norma-norma yang berlaku. Norma-norma dimaksud tertuang dalam pasal 19 ayat (1) dijelaskan :

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam praktek penanggulangan suatu permasalahan sosial yang terjadi, anggota atau pejabat kepolisian mengutamakan tindakan pencegahan. Tindakan ini sesuai amanat pasal 19 ayat (2), yaitu

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Dengan demikian penanggulangan setiap permasalahan sosial atau kasus yang terjadi khususnya penanggulangan tindak kekerasan, pihak Polri lebih mengedepankan tindakan pencegahan dengan mendeteksi gejala-gejala masalah sosial dan segera menangani gejala ini sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

2.1.4 Strategi Pemulihan Ketertiban dan Penurunan Kejahatan

Dilakukannya suatu pemulihan ketertiban dikarenakan munculnya suatu masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau dengan kata lain adanya suatu keadaan di mana suatu masyarakat terjadi ketidaktertiban, seperti contohnya kerusuhan suporter sepakbola yang melibatkan tindak kekerasan oleh Jakmania.

Yang dimaksud ketidaktertiban dalam pengertian sosial yang paling luas, ketidaktertiban adalah ketidaksopanan, sikap kasar tidak sesuai adat dan perilaku mengancam yang mengganggu kehidupan, terutama kehidupan perkotaan. Dikatakan suatu kehidupan perkotaan apabila ditandai oleh kehadiran banyak orang asing, dan dalam keadaan seperti itu penduduk memerlukan tingkat ketentraman yang memadai (Kelling dan Coles disadur oleh Kunarto, 1998 : 20). Salah satu contoh kongkrit keadaan perkotaan yang sangat kompleks ibukota Indonesia yaitu Jakarta yang merupakan kota metropolitan, di mana penduduk Jakarta sangat homogen dan majemuk karena merupakan kumpulan dari beberapa suku bangsa, bahasa, profesi, dan lainnya (Suparlan, 2004b). Dengan keadaan dan latarbelakang tersebut, maka ibukota Jakarta mempunyai resiko yang besar dan rentan akan terjadinya masalah sosial yang mengakibatkan suatu keadaan ketidaktertiban.

Permasalahan ketidaktertiban ini menurut Kelling dan Coles (1998) disebabkan adanya kesenjangan antara tuntutan penduduk atas ketertiban dengan polisi serta berbagai prioritas peradilan pidana terus berlangsung. Hal ini terlihat di mana polisi dan badan-badan peradilan pidana menggunakan ukuran-ukuran formal dan tuntutan yang didasarkan atas penilaian tingkat tinggi rendahnya kejahatan secara naluriah dan kewajaran serta didukung dengan penelitian yang mapan, namun tuntutan dari penduduk atau masyarakat didasarkan atas apa yang mereka alami sehari-hari secara nyata seperti ditempat umum yang rawan akan ancaman munculnya kejahatan dan informasi dari berbagai media massa yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa angka-angka kriminalitas yang disajikan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian tidak mempunyai dampak yang berarti bagi mayoritas penduduk atau masyarakat, tetapi yang sangat mendasar adalah apa yang mayoritas masyarakat atau penduduk lihat sehari-hari seperti yang nampak di jalanan atau tempat umum. Namun

pada kenyataannya kesenjangan ini banyak kurang diperhatikan aparat penegak hukum yaitu kepolisian untuk melakukan identifikasi melalui mekanisme formal dalam rangka mengumpulkan data tentang permasalahan yang mengganggu masyarakat atau penduduk secara nyata sesuai tuntutan masyarakat di atas.

Untuk menanggulangi permasalahan ketidaktertiban tersebut seorang pakar perkotaan Jane Jacob (Kelling dan Coles, 1998) berpendapat perlu dilakukan perubahan kecil dari kehidupan perkotaan, hal ini dapat dilakukan dengan memasang perlengkapan yang lengkap yang memungkinkan orang asing untuk tinggal tenang bersama-sama dalam tata kehidupan beradab yang pada dasarnya terhormat dan saling menghormati. Yang dimaksud peralatan terpasang adalah ketaatan dan tata cara dari banyak sekali kebiasaan hidup yang dengan cara itu orang yang mengkomunikasikan berbagai kenyataan dan perkiraan masa depannya dalam perspektif jangka pendek, di mana daftar kebiasaan atau tata cara ini jumlahnya tidak terbatas, seperti menghormati hak pribadi, pengaturan nada suara, berjalan di trotoar, menjaga fasilitas umum dan lain sebagainya.

Dalam rangka pemulihan ketidaktertiban dan penurunan ancaman kejahatan Kelling dan Wilson (Kelling dan Coles, 1998 : 27-29) menyajikan sebuah artikel yang berjudul Jendela Rusak yang sekarang dikenal dengan teori *fixing the broken window*, dengan menggunakan analogi jendela rusak untuk menggambarkan hubungan antara ketidaktertiban dan kejahatan: kalau sebuah jendela pada suatu gedung rusak dan dibiarkan tidak diperbaiki, maka tidak lama lagi jendela lainnya akan rusak, hal ini menandakan bahwa orang disekitar gedung tidak mempunyai kepedulian dan justru akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, maka untuk mencegahnya diperlukan kepedulian dari orang berada digedung. Dengan kata lain proses analogi ini adanya perilaku tidak tertib dan tidak diperhatikan oleh masyarakat sekitar sehingga berdampak pada tidak adanya rasa aman, akibatnya masyarakat satu demi satu meninggalkan daerah mereka menetap dan rasa ketakutan mereka menarik diri dari peranan dalam pergaulan serta melepaskan kontrol sosial, pada akhirnya timbullah suatu keadaan ketidaktertiban serta kejahatan serius, untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan melibatkan struktur masyarakat yang ada.

Apabila melihat teori di atas, bahwa dalam menjaga ketertiban dan rasa aman di dalam masyarakat diperlukan peran serta komponen dalam hal ini struktur masyarakat, peranan masyarakat sendiri untuk melakukan deteksi dini dan kontrol sosial. Untuk menjalankan misi tersebut maka kepolisian harus berperan aktif di dalam masyarakat dengan membantu penduduk mengembangkan wilayah setempat, memperkuat pengertian Pam Swakarsa, dan membantu memecahkan berbagai problema di tengah-tengah masyarakat, dengan demikian polisi bukan hanya melakukan tugas mereka untuk melakukan penjagaan dan menunggu panggilan-panggilan atau memperpendek waktu reaksi cepatnya (Kelling dan Coles, 1998 : 157).

Pandangan hubungan kerjasama masyarakat dan polisi ini bukanlah hal baru, hal identik seperti pemikiran itu pertama diperkenalkan oleh Sir Robert Peel pada tahun 1829 (Kelling dan Coles, 1998 : 161-163) melalui asas-asas penegakan hukum sebagai pedoman bagi polisi yang bertujuan membentuk suatu kesepakatan antara masyarakat dan polisi. Asas-asas tersebut terdiri dari :

1. Misi dasar polisi adalah mencegah kejahatan dan ketidaktertiban.
2. Kemampuan polisi untuk melaksanakan tugas mereka, tergantung dari persetujuan masyarakat tentang esistensi, tindakan-tindakan, perilaku, dan kemampuan polisi untuk mengamankan dan memelihara kehormatan masyarakatnya.
3. Polisi harus menjamin timbulnya dorongan untuk bekerjasama dan masyarakat dalam menghormati hukum, agar dapat menjamin dan memelihara kehormatan masyarakat.
4. Tingkat kerjasama dari masyarakat yang dapat menjamin pengurangan, proporsi yang tepat serta tingkat kebutuhan untuk menggunakan kekuatan fisik.
5. Polisi harus dapat menemukan dan memelihara itikad baik masyarakat, bukan dengan melayani pendapat umum, melainkan dengan terus menerus menunjukkan pelayanan yang bersifat jujur dan adil secara mutlak berdasarkan hukum, dengan penuh kemandirian kebijakan, dan tanpa memandang adil atau tidak adil substansi hukum perorangan dengan siap memberikan pelayanan individual dan persahabatan kepada semua anggota masyarakat tanpa memandang warna kulit atau kedudukan sosial.

6. Polisi menggunakan kekuatan fisik hanya apabila perlu, untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum atau untuk memulihkan ketertiban, apabila pelaksanaan persuasi, nasehat dan peringatan ternyata tidak cukup.
7. Polisi setiap saat harus memelihara hubungan baik dengan masyarakat sebagai realitas tradisi sejarah, bahwa polisi adalah publik dan bahwa publik adalah polisi, polisi adalah satu-satunya anggota-anggota dari masyarakat yang digaji untuk mencurahkan penuh kepada tugas-tugas yang diwajibkan kepadanya, atas kepentingan setiap penduduk dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.
8. Polisi harus selalu mengarahkan tindakan-tindakannya kepada pelaksanaan fungsi-fungsinya dan tidak pernah berniat mengambil alih kekuasaan-kekuasaan peradilan dengan melecehkan individu atau negara.
9. Ukuran dari efesiensi polisi adalah tidak adanya kejahatan dan kerdaktertiban, bukan fakta-fakta yang terlihat berupa tindakan dalam menanganinya.

Dengan demikian pemulihan ketidaktertiban dan penurunan angka kejahatan terkait tindak kekerasan dapat dilakukan secara efektif dengan melibatkan kepolisian dan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai deteksi dini gejala-gejala masalah sosial yang timbul dan sebagai kontrol sosial, sedangkan polisi berperan menangani gejala-gejala masalah sosial pada kesempatan pertama sehingga permasalahan tersebut tidak berkembang.

2.2 Tindakan Kolektif (*Collective Behavior*)

Tingkah laku kolektif (*collective behavior*) menurut Barrington Moore, Jr., menjelaskan bahwa *collective behavior* sebagai tingkah laku individu yang dilakukan bersama-sama atas rasa ketidakadilan melalui gerakan massa dan organisasi besar untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan para anggotanya. Kemudian Moore dalam menganalisa membagi dua tradisi pada tingkah laku kolektif ini: tradisi pertama memperlakukan protes, pemberontakan, dan fenomena terkait respon tak beralasan untuk menekan, dan tradisi kedua mengikat semua aksi yang berbeda sebagai ungkapan pergerakan sosial yang sama berkembang. Pemahaman tersebut diikuti oleh Charles Tilly namun dikembangkan, menurut Tilly bahwa tingkah laku kolektif merupakan wujud pelepasan ketegangan atas

perubahan sosial yang cepat dan ekstensif menciptakan ketidakpastian, kebimbangan, dan tekanan yang berakumulasi hingga orang mencari kesempatan untuk melepaskannya dalam bentuk tindakan protes kekerasan, dan aksi massa anarkis (Santoso, 2002 : 89).

Definisi tingkah laku kolektif lain juga dikemukakan oleh Horton dan Hunt (1984), Kornblum (1988), dan Light, Keller dan Calhoun (1989), di mana beberapa pernyataan beberapa ahli tersebut didefinisikan bahwa tingkah laku kolektif merupakan perilaku yang : (1) dilakukan bersama oleh sejumlah orang; (2) tidak bersifat rutin; dan (3) merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu (Sunarto, 2000 : 196).

Dari beberapa pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkah laku kolektif merupakan suatu tingkah laku yang dilakukan oleh beberapa individu di bawah pengaruh atau rangsangan tertentu yang bersifat kolektif dan dilakukan bersama-sama dalam sebuah kelompok dengan jumlah yang besar, kemudian terjadinya secara spontan, kurang atau tidak terorganisasi, bersifat sementara dan tidak direncanakan.

Melihat definisi tersebut dapat dikatakan, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan para suporter Jakmania tergolong dalam tindakan kolektif atau *collective behavior*. Sedangkan untuk menjelaskan tindak kekerasan Jakmania itu sendiri terlebih dahulu membahas mengenai definisi kekerasan.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, perilaku ini sendiri dapat diidentifikasi sebagai berikut : (1) kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian; (2) kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau dilakukan langsung, seperti mengancam; (3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan (4) kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup (Santoso, 1983 : 11).

Walter Miller menjelaskan istilah kekerasan mengandung makna kehinaan atau kekejian yang kuat, dan diberlakukan dengan sedikit diskriminasi pada berbagai hal yang tidak disetujui secara umum. Dalam istilah kekerasan ini Miller membatasi pertimbangan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang didefinisikan sebagai tindak kejahatan. Dengan kata lain tindakan kekerasan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang mengakibatkan kerugian fisik sampai dengan meninggal dunia dan kerugian harta benda (Sarwono, 2005).

Dengan demikian kekerasan kolektif yaitu suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama seperti halnya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh supporter sepakbola dalam hal ini Jakmania dalam bentuk perkelahian dan atau pengeroyokan dengan supporter lain (lawan main Persija) maupun tindakan pengrusakan fasilitas umum dan lainnya, serta kekerasan ini biasanya dilakukan dengan bersama-sama supporter Jakmania lebih dari dua orang atau disebut sebagai bagian dari *collective violence*.

Kekerasan kolektif menurut Charles Tilly (1978) membagi kekerasan kolektif pada tiga tipe, yaitu kekerasan kolektif primitif, kekerasan jenis ini umumnya bersifat non-politis, ruang lingkungannya terbatas pada suatu komunitas lokal; kekerasan kolektif reaksionis, kekerasan ini pada umumnya ditujukan kepada penguasa atau pejabat kaitannya dengan menentang suatu kebijakan atau sistem yang dirasa tidak adil dan jujur sesuai ukuran norma yang berlaku; dan kekerasan kolektif modern, merupakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisasi dengan baik yang bertujuan berkaitan perbaikan ekonomi dan politis. Untuk jenis tindak kekerasan yang dilakukan oleh supporter sepakbola dalam hal ini pendukung Persija atau yang dikenal dengan Jakmania yang mengakibatkan kerugian harta benda, fisik bahkan nyawa para supporter sendiri, Tubagus Ronny Nitibaskara (2001) memasukkan tindakan kekerasan tersebut ke dalam kategori kekerasan kolektif primitif.

Le Bon (1895:1-2) memberikan definisi *crowd* yaitu berkumpulnya beberapa individu yang mempunyai kebangsaan dan atau suku bangsa, profesi, jenis kelamin dan lainnya

sebagainya yang berbeda-beda, kemudian mereka mempunyai kesempatan untuk masuk dalam suatu keadaan tertentu, manakala mereka sudah masuk dalam suatu kelompok tertentu maka identitas masing-masing individu berubah menjadi suatu identitas dengan karakteristik baru dalam kebersamaan kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dan kerumunan dimaksud terwujud dengan satu aturan yang dipatuhi masing-masing individu dalam kelompok atau yang dinamakan hukum kesatuan mental kerumunan.

Sementara itu Mannheim memberikan definisi tentang *crowd* yaitu suatu kumpulan beberapa orang yang bersifat umum yang berbentuk sekumpulan orang dalam bentuk asosiasi yang bisa juga merupakan bagian dari organisasi, manakala terbentuk menyamai sebuah organisasi bentuknya belum terlalu sempurna kemudian jangka waktu bertahannya dengan waktu yang pendek (Mannheim, 1965 : 643-644).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi kerumunan yaitu sekelompok individu yang berkumpul bersifat umum dan terorganisir secara sementara, mempunyai identitas baru sesuai kelompok dan tujuannya. Dengan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa suporter Persija yaitu Jakmania merupakan bagian dari kerumunan atau *crowd*, hal ini terlihat dari setiap diadakannya setiap pertandingan sepakbola yang melibatkan pertandingan dengan Persija.

Di dalam psikologi sosial, menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2009) ada beberapa teori yang menyatakan bahwa massa itu bersifat irasional, emosional, impulsif, agresif dan destruktif. Dengan perkataan lain, menurut teori yang antara lain dikemukakan oleh Le Bon ini, suatu massa yang "jinak" (seperti pengunjung pasar, penonton bioskop atau penonton sepakbola), bisa tiba-tiba beringas jika ada pemicunya. Dengan demikian peristiwa tindak kekerasan yang dilakukan secara kolektif juga penting dijelaskan mengenai masalah kerumunan, karena kekerasan yang dilakukan oleh Jakmania tergolong tingkah laku dalam kekerasan kolektif yang dilakukan secara kerumunan (*crowd*).

Kemudian untuk menjelaskan munculnya tindakan kolektif atau gerakan kolektif seperti tindak kekerasan Jakmania, menurut Le Bon (1895) tindakan kolektif tersebut hasil dari *crowd* atau kerumunan yang tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional atau irasional.

2.3 Kerangka Teoritik Faktor Determinan Tindakan Kolektif

Dalam membuat suatu kajian penelitian maka harus didasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang akan mendukung pada penelitian tersebut. Hal ini untuk memudahkan dalam menyusun tulisan lebih sistematis dan terstruktur agar mengarahkan pada komponen variabel yang akan diteliti. Maka teori-teori yang terkait dengan faktor determinan tindakan kolektif menurut Smelser dalam *Theory of Collective Behavior* (1962, 15-17) mendefinisikan enam faktor yang menentukan terjadinya perilaku atau tindakan kolektif, sehingga secara umum akan diuraikan dalam bahasan yang mencakup :

- (1) Pendorong struktural atau *structural conduciveness*,
- (2) Ketegangan struktural atau *structural strain*,
- (3) Tumbuh dan menyebarnya suatu kepercayaan yang digeneralisasikan atau *growth and spread of generalized belief*,
- (4) Faktor-faktor pencetus atau *precipitating factors*,
- (5) Mobilitas para pemeran serta pada tindakan atau *mobilization of participants for action*,
- dan (6) Bekerjanya pengendalian sosial atau *the operation of social control*.

Pembahasan dengan tema-tema tersebut lebih mendekati pada perspektif kriminologi dalam mengkaji bagaimana tahapan suatu tindakan kolektif berupa kekerasan bisa terjadi seperti yang dilakukan pada komunitas suporter Persija yaitu Jakmania.

2.3.1 Pendorong struktural atau *structural conduciveness*

Pendorong struktural atau *structural conduciveness*, yaitu merupakan segi-segi struktural dari situasi sosial yang menciptakan kepanikan atau kekacauan. Sedangkan frekuensi dari kepanikan ini biasa bermacam-macam dari yang tinggi sampai terendah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi ini terjadi apabila beberapa faktor seperti ketidakadilan sosial, konflik, persaingan bersamaan muncul yang mengakibatkan tingkah laku kolektif (Smelser, 1962).

Kondisi yang terjadi pada komunitas pendukung atau suporter tim sepakbola, yaitu berupa kepanikan berupa perasaan kebersamaan dalam persaingan antara tim sepakbola yang didukungnya dan tim sepakbola yang menjadi lawannya. Pada situasi ini mulailah muncul semacam konflik yang terjadi antar suporter, namun faktor ini bila berdiri sendiri tidak akan melahirkan tingkah laku kolektif.

Secara kuantitas, besaran daya dukungan suporter sepakbola terhadap tim yang dibelanya secara individu dipengaruhi faktor fanatisme masing-masing individu suporter itu sendiri (Brown, 1998). Sedangkan fanatisme masing-masing individu berbeda-beda yang disebabkan pengaruh lingkungannya atau ekologi dari individunya.

2.3.1.1 Fanatisme

Fanatik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu keyakinan atau suatu pandangan tentang sesuatu, yang positif atau yang negatif, pandangan mana tidak memiliki sandaran teori atau pijakan kenyataan, tetapi dianut secara mendalam sehingga susah diluruskan atau diubah. Fanatisme biasanya tidak rasional, oleh karena itu argumen rasionalpun susah digunakan untuk meluruskannya. Fanatisme dapat disebut sebagai orientasi dan sentimen yang mempengaruhi seseorang dalam hal, antara lain : berbuat sesuatu, menempuh sesuatu atau memberi sesuatu; dalam berfikir dan memutuskan; dalam mempersepsi dan memahami sesuatu; dan dalam merasa (Mubarok, 2010).

Ciri-ciri yang jelas dari sifat fanatik adalah ketidakmampuan memahami karakteristik individual orang lain yang berada diluar kelompoknya, benar atau salah. Secara garis besar fanatisme mengambil bentuk : (a) fanatik warna kulit, (b) fanatik etnik atau kesukaan, dan (c) fanatik klas sosial. Sedangkan fanatik suporter pada suatu tim sepakbola merupakan bentuk fanatik etnik atau kesukaan.

Suporter sepakbola yang fanatik menurut Brown (1998) dipandang sebagai penyebab menguatnya perilaku kelompok suporter yang tidak jarang dapat menimbulkan perilaku agresi. Individu para suporter yang fanatik akan cenderung kurang memperhatikan kesadaran dan seringkali perilakunya kurang terkontrol dan tidak rasional, sehingga

seseorang yang fanatik biasanya tidak mampu memahami apa-apa yang ada di luar dirinya, tidak faham terhadap masalah orang atau kelompok lain, tidak mengerti faham atau filsafat selain yang mereka yakini. Contohnya para *hooligan* di Inggris dan sebagainya.

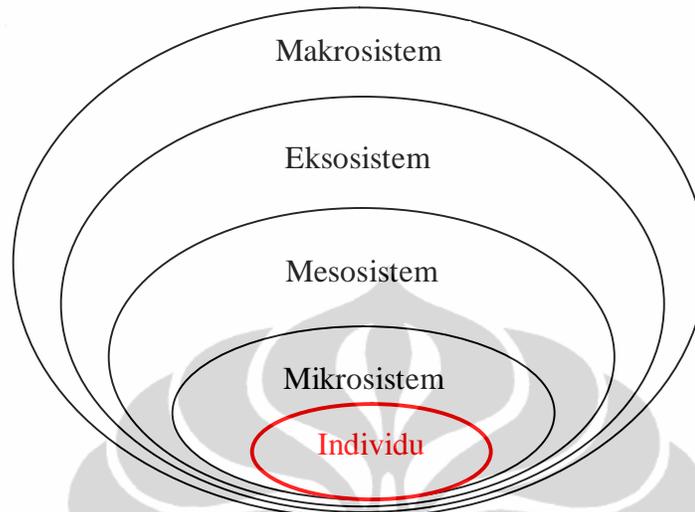
Fanatisme suporter sepakbola bukan hanya terjadi di wilayah Eropa saja, namun sudah meluas sampai ke Indonesia. Sudah cukup banyak perkumpulan suporter sepakbola yang ada di Indonesia, seperti Jakmania yang mendukung Kesebelasan Persija, Bonek yang mendukung Kesebelasan Persibaya, dan banyak lagi bahkan sampai tim sepakbola pada tingkat terendah.

2.3.1.2 Ekologi Individu

Untuk menjelaskan perubahan sikap individu dalam kerumunan dipengaruhi beberapa hal, menurut teori ekologi Brofenbenner (1979) menjelaskan perkembangan dan perubahan sikap individu sebagai hasil interaksi antara alam sekitarnya atau lingkungan sekitar dan individu itu sendiri. Interaksi alam sekitar atau lingkungan terhadap perkembangan individu dipengaruhi oleh beberapa sistem, antara lain :

1. Mikrosistem, ini merupakan pengaruh lingkungan yang terdekat atau mendasar, di mana individu mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan waktu yang paling banyak. Contohnya : ayah ibu, kakak dan adik, teman-teman sebaya, guru dan sebagainya.
2. Mesosistem, merupakan hubungan antar mikrosistem. Sesuatu yang berlaku dalam satu mesosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan masing-masing mikrosistem yang lain, seperti contohnya : keadaan rumah atau lingkungan tetangga bisa mempengaruhi tingkah laku individu.
3. Eksosistem, merupakan bagian dari pengalaman komunitas lingkungan seperti teman sebaya, teman komunitas, dan sebagainya yang terjadi secara tidak langsung melibatkan individu, namun hal ini memberi kesan kepada individu terkait perbuatan dalam komunitasnya.
4. Makrosistem, perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma, nilai, dan keadaan masyarakat. Contohnya : sebagian orang beranggapan bahwa laki-laki

mempunyai peran besar dalam keluarga dan berkuasa dalam keluarga, sepakbola identik dengan laki-laki.



Gambar 2.1

Teori Ekologi Brofenbenner

Sumber : diolah dari Buku Berjudul *The Ecology of Human Development : Experiment by Nature and Design* oleh Urie Brofenbenner

2.3.2 Ketegangan struktural atau *structural strain*

Ketegangan struktural atau *structural strain*, untuk tipe ketegangan struktural ini sangat tipis terjadinya suatu tindakan tingkah laku kolektif apabila tidak didahului oleh struktural pendorong lainnya lebih dahulu. Ketegangan struktural merupakan ketegangan dalam pola hubungan.

2.3.3 Tumbuh dan menyebarnya suatu kepercayaan yang digeneralisasikan atau *growth and spread of generalized belief*

Tumbuh dan menyebarnya suatu kepercayaan yang digeneralisasikan atau *growth and spread of generalized belief*, adalah suatu proses tumbuh dan berkembangnya kepercayaan bersama. Hal ini dapat membuka wawasan individu kearah yang lebih dinamis, di mana kondisi ini dapat memunculkan tingkah laku kolektif dari individu-individu yang telah mengalami perubahan perkembangan wawasan dalam pemikiran.

Namun untuk memunculkan tingkah laku kolektif diperlukan suatu kondisi tertentu yaitu faktor pencetus.

2.3.4 Faktor-Faktor Pencetus atau *Precipitating Factors*

Faktor-faktor pencetus atau *precipitating factors* ini terjadi apabila adanya gejala peristiwa dari pendorong struktural ketegangan struktural, dan penyebaran gagasan mengenai kepercayaan umum tentang sumber kepanikan atau ketegangan sebagai awal mula terjadinya tingkah laku kolektif. Situasi ini merupakan titik awal namun belum dikatakan terjadi tingkah laku kolektif namun sangat berpengaruh nantinya dalam tingkah laku kolektif.

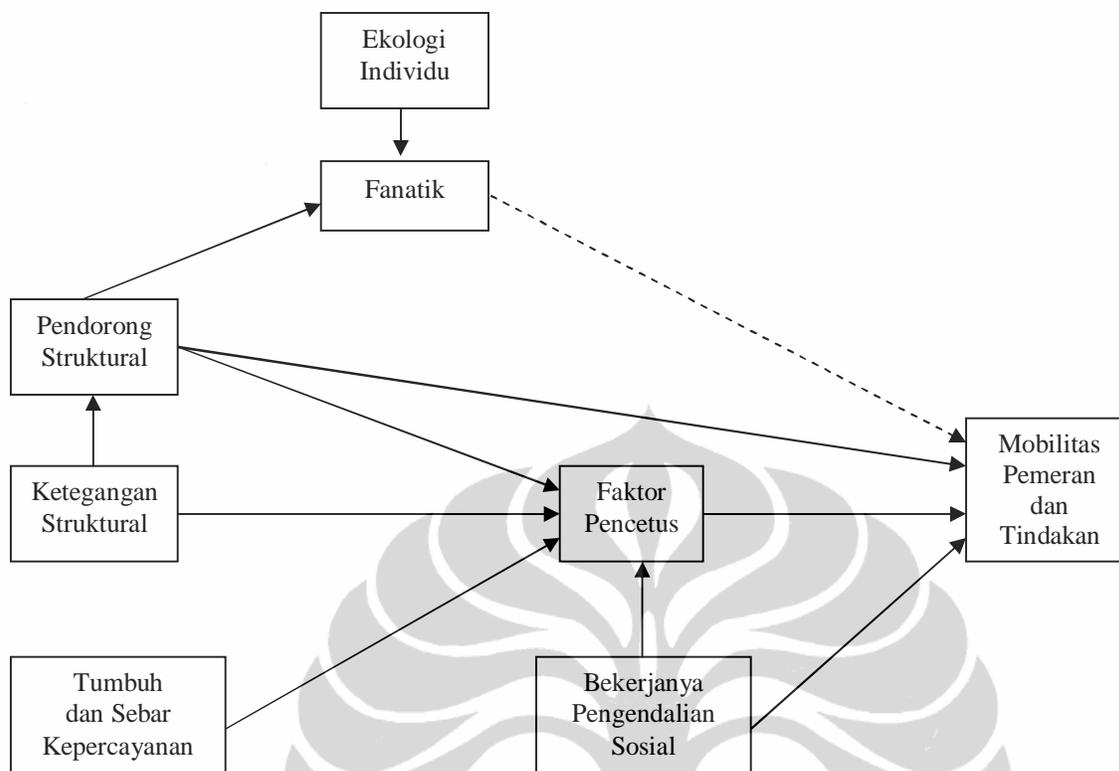
2.3.5 Mobilitas Para Pemeran Serta Pada Tindakan atau *Mobilization of Participants for Action*

Mobilitas para pemeran serta pada tindakan atau *mobilization of participants for action*, dalam hal ini yang diperlukan munculnya suatu tindakan kolektif yaitu adanya peranan figure, tokoh atau organisasi yang bisa menggerakkan suatu struktur kelompok atau masyarakat akan lebih efektif dan dapat memberikan figure kepada anggota kelompok tersebut atau masyarakat untuk melakukan suatu tindakan kolektif tertentu.

2.3.6 Bekerjanya Pengendalian Sosial atau *The Operation of Social Control*

Bekerjanya pengendalian sosial atau *the operation of social control*, faktor ini adalah faktor penentu dalam proses terjadinya tingkah laku kolektif. Jika pengendalian sosial sangat minim atau lemah dalam proses deteksi tahapan terjadinya tingkah laku kolektif maka tingkah laku kolektif akan terjadi dan sebaliknya.

Maka Model teoritik dalam penelitian ini dikembangkan sesuai kajian teori menurut peneliti sebagai berikut :



Gambar 2.2

Model Teoritik Tindakan Kolektif Smelser yang Dikembangkan

Sumber : Peneliti

2.4 Kerangka Berfikir

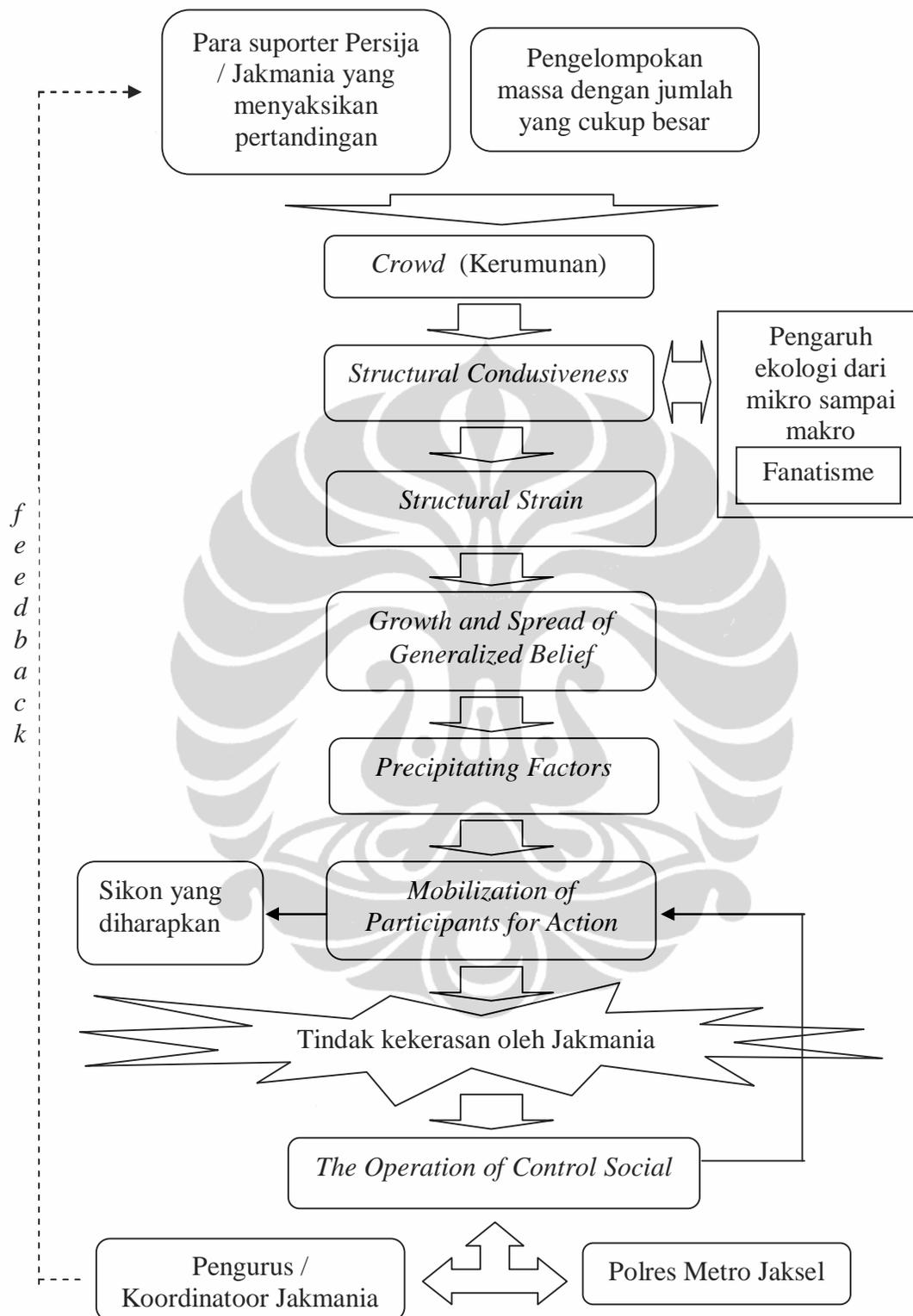
Tindak kekerasan oleh Jakmania pada awalnya didahului dengan munculnya kerumunan, di mana individu-individu dalam kerumunan tersebut melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh faktor ekologi individu baik pada lingkungan dekat (mikro) sampai dengan lingkungan terluar (makro). Pengaruh yang terjadi langsung pada individu menentukan sikap fanatik para suporter atau Jakmania terhadap kesebelasan Persija.

Sedangkan tindak kekerasan akan terjadi secara kolektif oleh para Jakmania, apabila memenuhi enam unsur determinan secara hirarki yang dikemukakan oleh Smelser dalam *Theory of Collective Behavior*.

Aksi tindak kekerasan oleh para Jakmania menimbulkan suatu keadaan keadaan ketidaktertiban yang berdampak menimbulkan kerugian fisik, harta ,dan benda. Pihak

kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan beberapa upaya tindakan kepolisian untuk menanggulangi situasi ini, namun situasi ketidaktertiban tersebut tetap menjadi ancaman sewaktu-waktu akan muncul dan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar apabila tidak dilakukan suatu upaya tindakan kepolisian secara khusus. Sehingga untuk menanggulangnya dapat melakukan kerjasama dengan pengurus atau koordinator Jakmania dengan mengedepankan pencegahan dini dalam upaya menangani ancaman atau gejala sedini mungkin.





Gambar 2.3

Kerangka Berfikir

Sumber : Peneliti

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mempermudah pembahasan mengenai metodologi penelitian, peneliti membaginya menjadi empat sub bab yaitu metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, dan teknik analisis data.

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan atau *field reaserch*, dengan pendekatan metode gabungan. Metode gabungan menurut Pardede (2010) dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu penelitian model gabungan (*mixed model research*) dan penelitian metode gabungan (*mixed method research*). Dan dalam penelitian ini menggunakan kedua metode gabungan tersebut, yaitu penelitian model gabungan (*mixed model research*) dan penelitian metode gabungan (*mixed method research*).

Metode gabungan kualitatif dan kuantitatif penelitian ini, berawal dari teknik survey. Pelaksanaan pendekatan penelitian ini dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam setiap aktifitas pertandingan sepakbola yang melibatkan peserta Persija yang menghadirkan suporternya Jakmania. Penelitian ini juga melihat dan memahami bagaimana peran serta pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan oleh Jakmania, dan melihat peran dari masing-masing pengurus Jakmania dalam mengendalikan anggotanya.

Pendekatan penelitian kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari komunitas Jakmania yang jumlahnya besar, pendekatan ini digunakan dengan harapan hasil data bisa mewakili seluruh komunitas Jakmania. Dengan demikian dapat diketahui gejala maupun faktor dominan penyebab supporter melakukan tindak kekerasan. Kemudian pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari pihak kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan yang berkaitan tugas dan tanggung jawab selaku petugas keamanan, dan mengetahui seberapa peran pengurus Jakmania dalam menjalankan fungsinya selaku koordinator supporter. Dan metode kualitatif juga

digunakan untuk menguji hasil model teoritik *Structural Equation Modelling* atau SEM (pada program Lisrel 8.72) dan hasil kualitatif mengenai penanggulangan tindak kekerasan oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, yang biasa disebut *universe*. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati. Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi obyek penelitian, di mana sampel sendiri secara harfiah berarti contoh. Dan hasil pengukuran atau karakteristik dari suatu atau beberapa sampel disebut statistik (Arikunto, 2002).

Dalam penelitian kuantitatif, populasi penelitian ini adalah komunitas Jakmania yang ada di Jakarta Selatan. Pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan populasi yang dapat mewakili karakteristik para supporter Persija yaitu Jakmania, karena pusat dari kepengurusan Jakmania ada di Lebakbulus Jakarta Selatan.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan *non random sample* atau *nonprobability sampling*, yaitu penarikan sampel tidak dilakukan dengan hukum probabilitas, artinya bahwa tidak semua unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian (Bungin, 2010). Hal ini dilakukan karena sifat populasi yang *heterogen* seperti komunitas Jakmania. Peneliti menggunakan tehnik sampel ini karena biaya yang sangat sedikit, hasilnya cepat tersaji, kurang memerlukan ketepatan yang tinggi, dan hasil yang diharapkan merupakan gambaran umum suatu keadaan. Kemudian cara yang dipergunakan dalam teknik pengambilan sampel non random ini dengan sampel tanpa sengaja atau *accidental sampling*. Menurut Arikunto (2002) yang dimaksud sampel tanpa sengaja atau *accidental sampling* adalah sampel diambil atas dasar seandainya saja dan tanpa direncanakan dulu dengan hasil kesimpulan yang bersifat kasar dan sementara saja. Alasan dilakukan teknik ini dilakukan disebabkan populasi Jakmania berkumpul dengan jumlah yang besar apabila ada pertandingan yang melibatkan tim sepakbola Persija saja (Bungin, 2010).

Cara ini dilakukan peneliti dengan pertimbangan jumlah komunitas Jakmania dengan jumlah yang besar tersebar diseluruh wilayah Jabotabek dibandingkan waktu penelitian yang relative singkat. Maka peneliti menentukan jumlah responden adalah 130 suporter, responden yang dipilih adalah para suporter yang menggunakan kostum identik dengan Jakmania dan atau pendukung persija yang rata-rata menggunakan pakaian *orange* dan hitam.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan lapangan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain adalah wawancara (*interview*), observasi (*observation*), kajian dokumen-dokumen (*document research*), dan pengumpulan atau pembuatan material audiovisual (Creswell, 2002).

Pada teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, teknik ini dimaksudkan untuk merumuskan kerangka konsep dan kerangka teori terhadap semua permasalahan yang akan ditemukan dilapangan, selain itu juga memberikan pemahaman awal pada penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa buku dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Pada tehnik pengumpulan data di lapangan dalam penelitian pendekatan kuantitatif, teknik ini dilakukan dengan metode survey sebanyak 130 eksampler kuesioner disebarkan kepada 130 suporter Jakmania yang menjadi responden. Kuesioner yang disebarkan bertujuan untuk menjaring data primer mengenai apa dan siapa yang menyebabkan para Jakmania melakukan tindakan kekerasan, serta bagaimana proses mengapa bisa terjadi, serta hubungannya fanatisme dengan kekerasan. Selain itu pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan dokumentasi dalam rangka memperoleh data-data sekunder terkait tindak kekerasan oleh Jakmania.

Khusus pada tahap pelaksanaan penyebaran kuesioner dilakukan pada saat berlangsung pertandingan antara Persija dan Persija di stadion Gelora Bung Karno tanggal 4 April 2011. Penyebaran kuesioner oleh peneliti dilakukan pada 3 (tiga) metode atau cara, yaitu: pertama, melalui bantuan pengurus Jakmania, sebanyak 50 (limapuluh) kuesioner diserahkan kepada masing-masing Korlap Jakmania sebelum pertandingan berlangsung, penyebaran kuesioner ke Korlap ini bertujuan agar mewakili masing-masing daerah karena para Korlap terdiri dari beberapa utusan wilayah. Kedua, sebanyak 60 (enampuluh) kuesioner disebar kepada responden di dalam stadion sesaat sebelum pertandingan berlangsung, responden yang diberikan kuesioner dibagi menjadi 3 (tiga) titik yaitu sisi sebelah kanan, kiri dan tengah suporter suporter Jakmania (letaknya sebelah timur lapangan). Dan ketiga, sebanyak 20 (duapuluh) kuesioner disebar diluar stadion saat pertandingan berlangsung. Penyebaran kuesioner melalui beberapa cara di atas dengan harapan dapat mewakili seluruh komponen responden.

Pada penelitian pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data di lapangan menggunakan suatu pedoman wawancara yang disajikan peneliti kepada aparat kepolisian yaitu pejabat Polres Metro Jakarta Selatan selaku pengemban fungsi keamanan dan ketertiban. Wawancara lainnya juga peneliti sajikan kepada pengurus Jakmania selaku koordinator Jakmania. Teknik wawancara yang digunakan secara terbuka dengan berpegangan pada pedoman wawancara, namun dalam wawancara apabila ada beberapa hal yang dianggap penting dilakukan juga pengembangan atau pendalaman pada wawancara tersebut (Creswell, 2002). Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer.

Pada tahap penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan pengumpulan beberapa dokumen yang berkaitan penanggulangan oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan dan fungsi keberadaan Pengurus Koordinator Jakmania.

3.4 Alat Pengumpul Data

Data merupakan hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta ataupun angka (Arikunto, 2002). Dalam pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner dan wawancara, peneliti juga menggunakan alat bantu seperti alat perekam dan dokumentasi. Hal tersebut dilakukan agar pengumpulan data sesuai dengan topik dan tidak melebar khususnya pada teknik wawancara.

Sebelum melakukan pengumpulan data, untuk memperlancar dan sesuai topik pembahasan dilakukan operasionalisasi tahapan pembentukan *crowd* yang dilatar belakangi fanatisme dan ekologi individu dengan tindak kekerasan kolektif oleh Smelser, dan asumsi peneliti mengenai peran kepolisian dan pengurus atau koordinator suporter dalam menangani ketidaktertiban dan penurunan kejahatan.

Pada pengumpulan data melalui kuesioner, untuk mendeteksi 6 (enam) dimensi, yaitu *Structural Conduciveness*, *Structural Strain*, *Growth and Spread of Generalized Belief*, *Precipitating Factors*, *Mobilization of Participants for Action*, dan *The Operation of Control Social* ini menggunakan skala *Likert*, di mana terdapat item yang *favorable* dan *unfavorable*. Alternatif jawaban tersebut dari nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), meliputi Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Cenderung Tidak Setuju (CTS), Cenderung Setuju (CS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Kemudian peneliti selain membuat kuesioner juga membuat susunan pedoman wawancara terbuka sebagai penjabaran atas operasionalisasi tahapan ini (terlampir).

3.5 Operasionalisasi dan Variabel Tahapan Tindakan Kolektif (Smelser)

Pada tahap operasionalisasi tahapan tindakan kolektif menurut Smelser peneliti menguraikan membagi menjadi variable penelitian bebas dan terikat, dari variable tersebut diuraikan menjadi beberapa indikator.

Tabel 2.1 : Operasionalisasi Variabel Bebas Tahapan Smelser

Tahapan	Indikator	Variabel	Indikator yang diperkirakan muncul pada Jakmania
<i>Structural Conduiveness</i> X1	Situasi dan kondisi media terbentuk <i>crowd</i> atau kerumunan : ➤ Fanatisme ➤ Faktor ekologi individu	H1	➤ Peran suporter
		H2	➤ Rasa kecintaan dan kesetiaan pada Persija
		H3	➤ Keinginan menonton Persija bertanding walaupun keadaan memaksa (belum makan, uang yang dimiliki pas-pasan)
		H4	➤ Keinginan mendampingi Persija berlaga walaupun lokasi pertandingan jauh (menimbulkan fisik lelah dan capek)
		H5	➤ Keinginan besar untuk melihat Persija menang dalam pertandingan
		H6	➤ Keluarga (ayah, ibu, adik, kakak atau yang tinggal serumah) sama-sama menyukai sepakbola dan pendukung Persija
		H7	➤ Orang tinggal serumah sama-sama suka dan dukung Persija
		H8	➤ Orang-orang dalam lingkungan kampung dan tetangga merupakan anggota Jakmania
		H9	➤ Tetangga dan teman bergabung sebagai Jakmania
		H10	➤ Ajakan teman-teman untuk menonton sepakbola secara langsung
		H11	➤ Bergabung komunitas Jakmania sebagai identitas pergaulan
		H12	➤ Sepakbola merupakan gaya atau <i>style</i> terutama laki-laki
		<i>Structural Strain</i>	➤ Suatu keadaan situasi dan kondisi

X2	<p>yang dinilai kurang tepat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasa tidak puas terhadap keadaan yang ada ➤ Munculnya atribusi untuk mencari penyebab 	H14	<p>menunggu pertandingan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mental dan fisik menurun memicu ketegangan
		H15	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perasaan cemas timnya kalah
		H16	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merasa tidak puas akan keadaan yang ada : Persija mengalami kekalahan, anggapan keputusan wasit yang kurang tepat (kontroversial)
		H17	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sikap menilai suatu keadaan yang dianggap salah menginginkan perubahan
<p><i>Growth and Spread of Generalized Belief</i> X3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pernyataan sikap keinginan terjadinya perubahan keadaan yang ada 	H18	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tindakan menginginkan perubahan atas keputusan wasit
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya peran pencetus atau <i>leaders</i> dalam menyebarkan suatu keyakinan untuk melakukan perubahan 	H19	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Merasa marah tim lawan bermain kasar dan curang
		H20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sorakan atau yel-yel menyoraki wasit dan lawan
		H21	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dorongan teriakan koordinator
<p><i>Precipitating Factors</i> X4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Munculnya indikasi peristiwa secara dramatis yang memicu terjadinya kerusuhan 	H22	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Oknum Jakmania turun dari stadion lalu mendorong atau memukul wasit dan atau pemain lawan
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikasi tindakan nyata untuk melakukan perubahan 	H23	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Siap membela tim apabila kalah
		H24	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dianulirnya gol yang didapat oleh Persija
<p><i>The Operation of Control Social</i> X5</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penanggulangan menyebarnya kerusuhan berupa tindak kekerasan (tindakan penanggulangan ketidaktertiban dan 	H30	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hubungan antara kepolisian dalam hal ini penanggung jawab kamtibmas dan Pengurus Jakmania
		H31	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peranan kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Selatan menangani

penurunan kejahatan)			tindak kekerasan
➤ Semakin meluas dampak kerusakan	H32	➤ Keterlibatan pengurus atau koordinator Jakmania dalam penanggulangan tindak kekerasan oleh suporter Persija / Jakmania	

Sumber : Peneliti

Tabel 2.2 : Operasionalisasi Variabel Terikat Tahapan Smelser

Tahapan	Indikator	Variabel	Indikator yang diperkirakan muncul pada Jakmania
<i>Mobilization of Participants for Action</i> Y	➤ Tindakan penectus aksi selaku pimpinan atau <i>leaders</i> sebagai penggerak	H25	➤ Mengikuti apa yang dilakukan koordinator sebagai pelampiasan kekecewaan
	➤ Tindakan nyata dilakukan kelompok yang terpengaruh	H26	➤ Kami melakukan tindakan sebagai pelampiasan kekecewan wujud dari kebersamaan
	➤ Munculnya tindakan kekerasan	H27	➤ Tim yang kalah akan melakukan pelampiasan dengan prilaku di jalanan yang membahayakan
		H28	➤ Pengerusakan pembatas di lapangan, gawang dan lingkungan stadion, spanduk atau baleho suporter lawan
		H29	➤ Perkelahian dengan suporter lawan

Sumber : Peneliti

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2008 : 244).

3.6.1 Pendekatan Kuantitatif

Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif digunakan pada penelitian ini antara lain *Multiple Response Analysis*, *Factor Analysis*, dan *Structural Equation Modelling (SEM)*. Dan dalam melakukan analisis menggunakan bantuan program SPSS 18 dan LISREL (*Linear Structural Relations*) 8.72.

Program SPSS 18 digunakan untuk *Multiple Response Analysis* atau analisis multi peresponden dan uji reabilitas dan validitas. Untuk analisis multi peresponden menyajikan hasil deskripsi dan frekuensi responden terhadap suatu gejala tindak kekerasan oleh Jakmania, yang kemudian diolah sesuai dengan fungsinya.

Khusus untuk teknik analisis SEM melalui beberapa langkah dengan uraian sebagai berikut di bawah ini.

3.6.1.1 Pengujian Analisis Faktor

Dan program Lisrel 8.72 digunakan untuk *Factor Analysis* ini bertujuan untuk memilih variable-variabel terukur yang dapat dijadikan indikator-indikator yang baik dari setiap variable laten penelitian (Pedhazur dan Schmelkin dalam Damayanti, 2011). Dan *Structural Equation Modelling (SEM)* atau analisis hubungan struktural, yaitu kesesuaian antara model teoritik dengan data dan kebermaknaan dari setiap koefisien hubungan kausal. Hasil analisis apabila menunjukkan model teoritis diajukan peneliti tidak sesuai, maka dapat mengajukan model lain dianggap lebih tepat yang merupakan bagian moel pengukuran. Hal ini bertujuan untuk memperoleh variable terukur yang dapat dijadikan indikator-indikator yang baik dari suatu variable (Pedhazur dan Schmelkin dalam Damayanti, 2011).

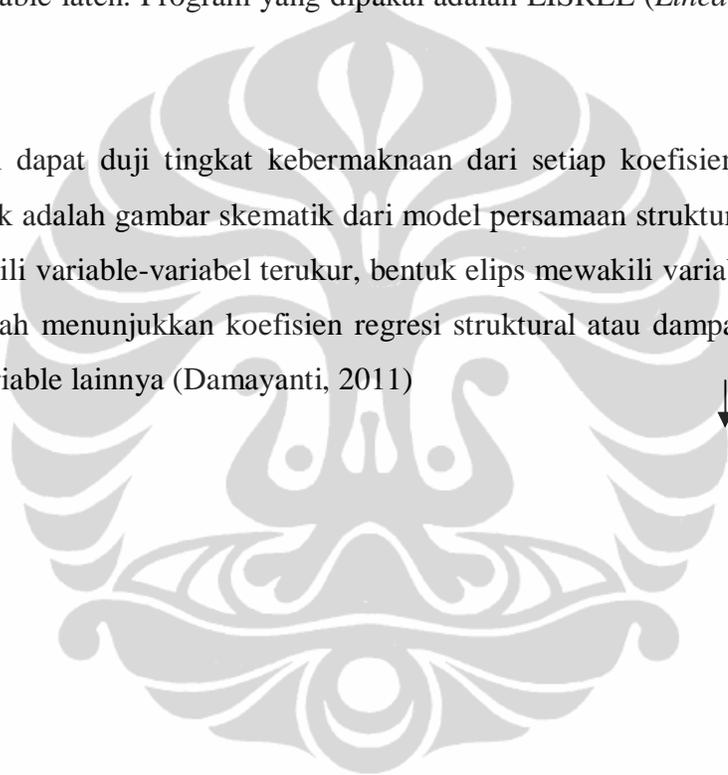
3.6.1.2 Analisis Model Persamaan Struktural

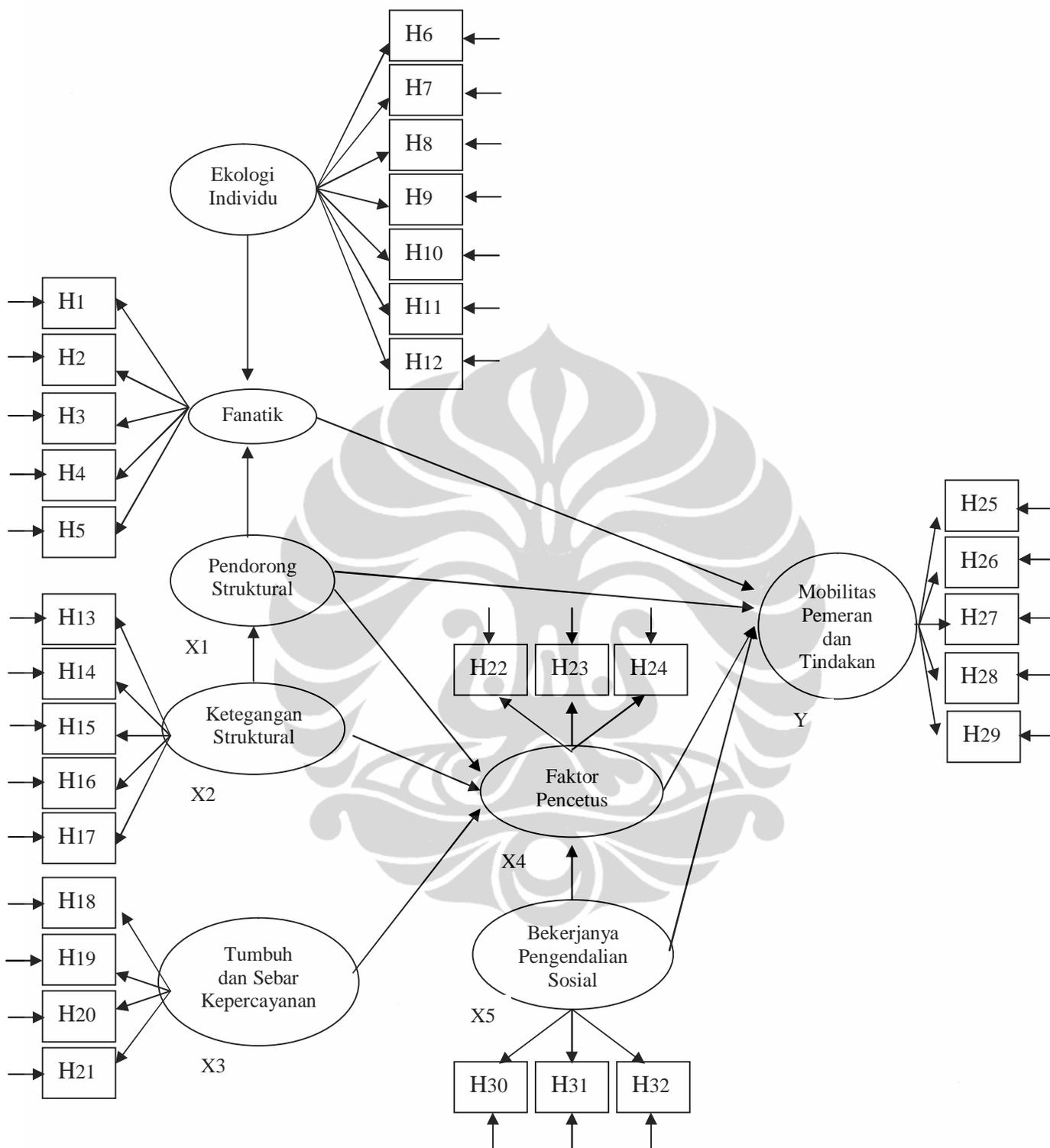
Untuk menguji hubungan *Structural Conduciveness*, *Structural Strain*, *Growth and Spread of Generalized Belief*, *Precipitating Factors*, *The Operation of Control Social* dengan *Mobilization of Participants for Action*, dan hubungan antara fanatisme dan *Mobilization of Participants for Action* digunakan teknik jejak analisis (*path analysis*)

Teknik jejak analisis ini merupakan metode untuk mempelajari hubungan langsung atau tidak langsung dari variable yang diperlakukan sebagai penyebab terhadap variable yang diperlukan sebagai akibat. Model persamaan struktural adalah model yang menggambarkan hubungan kausal antara variable penyebab (eksogen) dan variable akibat (endogen).

Pada analisis model persamaan struktural hubungan antara variable-variabel penelitian didasarkan pada variable laten. Program yang dipakai adalah LISREL (*Linear Structural Relations*) 8.72.

Dengan program ini dapat diuji tingkat kebermaknaan dari setiap koefisien hubungan kausal. Diagram jejak adalah gambar skematik dari model persamaan struktural, di mana bentuk kotak mewakili variable-variabel terukur, bentuk elips mewakili variable-variabel laten, dan tanda panah menunjukkan koefisien regresi struktural atau dampak dari satu variable terhadap variable lainnya (Damayanti, 2011)





Ket :
 X1-X5 = V. Penyebab
 Y = V. Akibat

Gambar 3.1
 Model Persamaan Struktural dan Kausal
 Sumber : Peneliti

3.6.1.3 Prosedur SEM

Metode SEM sangat tepat digunakan dalam penelitian ini, karena terdapat hubungan antar variable yang terjadi secara bersamaan. Pendekatan yang dilakukan untuk mengestimasi parameter model yang akan digunakan dengan model SEM. SEM menguji suatu rangkaian hubungan saling ketergantungan secara bersamaan (seketika). Ini sangat bermanfaat bila satu variable terikat akan menjadi variable bebas pada hubungan saling ketergantungan.

Langkah-langkah SEM :

1. Kembangkan teori yang menjadi dasar model SEM kembangkan hubungan kausal, di mana perubahan suatu variable akan mempengaruhi variable lainnya.
2. Siapkan diagram hubungan kausal tersebut, definisikan variable penyebab dan variable akibat dalam suatu hubungan dalam diagram jejak (*path diagram*).
3. Kemudian merubah *path diagram* ke dalam persamaan SEM dan tentukan model pengukuran.
4. Pilih tipe matrik masukkan dan lakukan perkiraan model yang diusulkan.
5. Melakukan penilaian identifikasi model struktural terhadap parameter penelitian.
6. Melakukan evaluasi kriteria kesesuaian model.
7. Interpretasi model, dengan memeriksa modifikasi model untuk meningkatkan *goodness of fit* atau penjelasan teoritis.

Hasil pengolahan tersebut selanjutnya di paparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memberikan suatu kesan lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi tentang tindak kekerasan yang dilakukan Jakmania. Dengan kata lain pengolahan data dengan statistik deskriptif tersebut di atas mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas, mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik suatu pengertian atau makna tertentu (Sudijono, 1987). Dari hasil analisis di atas diharapkan akan mendapatkan data empirik tentang model teoritik terjadinya tindak kekerasan Jakmania, dan hubungan antara fanatisme Jakmania dan kekerasan yang

terjadi. Kemudian hasil analisa dilakukan uji hasil pada sumber yang bisa dipercaya sebagai *cross cek* melalui wawancara.

3.6.2 Pendekatan Kualitatif

Terkait teknik analisis data pada penelitian kualitatif, Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008) mengemukakan, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data atau *data reduction*, penyajian data atau *data display*, dan penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing/verification*. yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga akan diperoleh data-data empirik data tentang keseriusan aparat keamanan dalam penanggulangan tindak kekerasan dan fungsi pengurus Jakmania selaku koordinator Jakmania, selain data sekunder lainnya.

Pada tahapan validasi data dalam pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004). *Triangulation* menurut Patton (dalam Moleong, 2004) dibagi menjadi 4 (empat), yaitu triangulasi sumber, metode, peneliti dan teori. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yang dimaksud triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Wawancara ini juga untuk menguji dari hasil penelitian pendekatan kuantitatif.

BAB 4

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penjabaran mengenai pembahasan hasil penelitian pada penelitian ini, peneliti membagi dalam tiga bagian, yaitu mengenai deskripsi wilayah penelitian, konstruk-konstruk yang berpengaruh tindak kekerasan Jakmania, dan pembahasan.

4.1 Deskripsi Penelitian

4.1.1 Jakmania

4.1.1.1 Sejarah Jakmania

Jakmania atau yang biasa di sapa dengan The Jack adalah nama kelompok pendukung atau suporter tim kesebelasan Persija (Jakarta). Jakmania didirikan sejak bergulirnya Ligin, atau tepat tanggal 19 Desember 1997. Lokasi *basecamp* kepengurusan Jakmania pertama kali di stadion Menteng, kemudian berpindah di stadion Lebakbulus sampai dengan sekarang.

Terbentuknya Jakmania merupakan ide dari Diza Rasyid Ali dan beberapa rekan-rekan serta pecinta Persija waktu itu, Diza Rasyid Ali yang pada saat itu pula menjabat sebagai manajer Persija. Ide ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur DKI Sutiyoso yang juga sebagai pembina Persija waktu itu. Tujuan dibentuknya Jakmania ini, yaitu membangkitkan kembali persepakbolaan Jakarta yang telah lama hilang baik itu tim maupun pendukungnya.

Awal berdirinya Jakmania beranggotakan 100 orang, dengan pengurus Jakmania sebanyak 40 orang yang merupakan pendiri dari Jakmania. Kepengurusan Jakmania yang pertama dengan ketua Gugun Gondrong. Pada saat itu pula pengurus Jakmania membuat lambang atau logo dari Jakmania dengan jari berbentuk huruf "J". Ide bentuk lambang ini pertama kali diperkenalkan oleh Edi Supratmo yang waktu itu juga menjabat sebagai Humas Persija. Dan lambang tersebut sampai sekarang dipakai oleh komunitas Jakmania sebagai simbol jati diri Jakmania.

Masa jabatan ketua umum dalam satu periode selama dua tahun dan dapat dipilih kembali. Setelah masa jabatan ketua umum Gugun selesai digantikan Ir. T. Ferry Indrasjarief dengan sapaan Bung Ferry. Masa Jabatan Bung Ferry sebagai ketua umum Jakmania terpilih selama tiga periode, yaitu periode pertama tahun 1999-2001, periode kedua tahun 2001-2003, dan periode ketiga tahun 2003-2005. Pada masa jabatan Bung Ferry banyak mengalami perubahan terkait dengan penataan struktur organisasi dan peningkatan jumlah anggota Jakmania. Titik awal dari kesuksesan, yaitu saat tim nasional Indonesia yang berlaga menjelang piala Asia, di sinilah pengurus merekrut anggota baru Jakmania hingga mencapai jumlah 7.200 orang. Dengan jumlah yang sudah begitu cukup banyak, maka kepengurusan Jakmania diperluas hingga ke daerah dengan membentuk Koordinator Wilayah atau Korwil.

Setelah masa jabatan Bung Ferry kemudian digantikan oleh Hanandito Ismayani, biasa dipanggil Bung Danang. Masa Jabatan Bung Danang selama dua periode, yaitu periode pertama tahun 2005-2007, dan periode kedua tahun 2007-2009. Pada masa jabatan Bung Ferry jumlah anggota semakin meningkat dan para anggota tidak hanya sebatan orang Jakarta saja, namun juga terdapat di luar wilayah Jakarta bahkan sampai di luar Jawa. Jumlah anggota Jakmania pada masa jabatan Bung Ferry sebelum berakhir sebanyak kurang lebih 50.000 orang yang dibagi dalam 50 Korwil.

Setelah masa jabatan Bung Ferry selesai digantikan Riko Lariko Ronggamone atau dengan sapaan Bung Riko sampai dengan sekarang. Masa jabatan Bung Riko banyak terjadi perombakan struktur organisasi yang lebih proposional dan efektif. Jumlah anggota Jakmania sampai dengan sekarang kurang lebih 52.000 orang yang terbagi atas 50 korwil dan ada sekitar 30% adalah perempuan atau Jakangel yang tersebar di seluruh Indonesia.

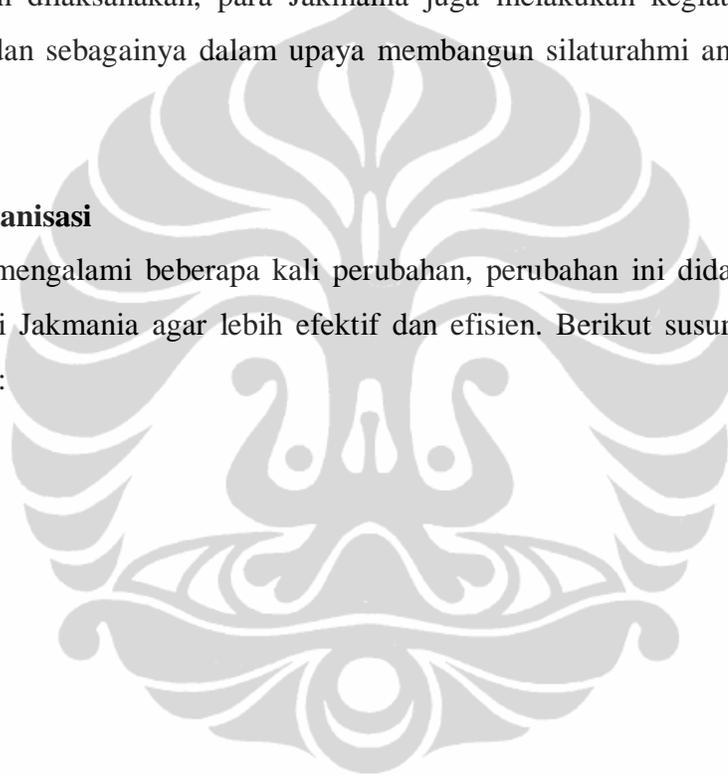
Organisasi Jakmania yang sekarang berkantor di stadion Lebakbulus ini sampai sekarang belum di daftarkan secara resmi, hal ini disebabkan ada anggapan dan penolakan atas kekhawatiran oleh para Korwil mengenai penyalahgunaan organisasi kedepan dalam hal tertentu seperti politik dan lain-lain. Untuk logo Jakmania yang berbentuk huruf "J" sudah

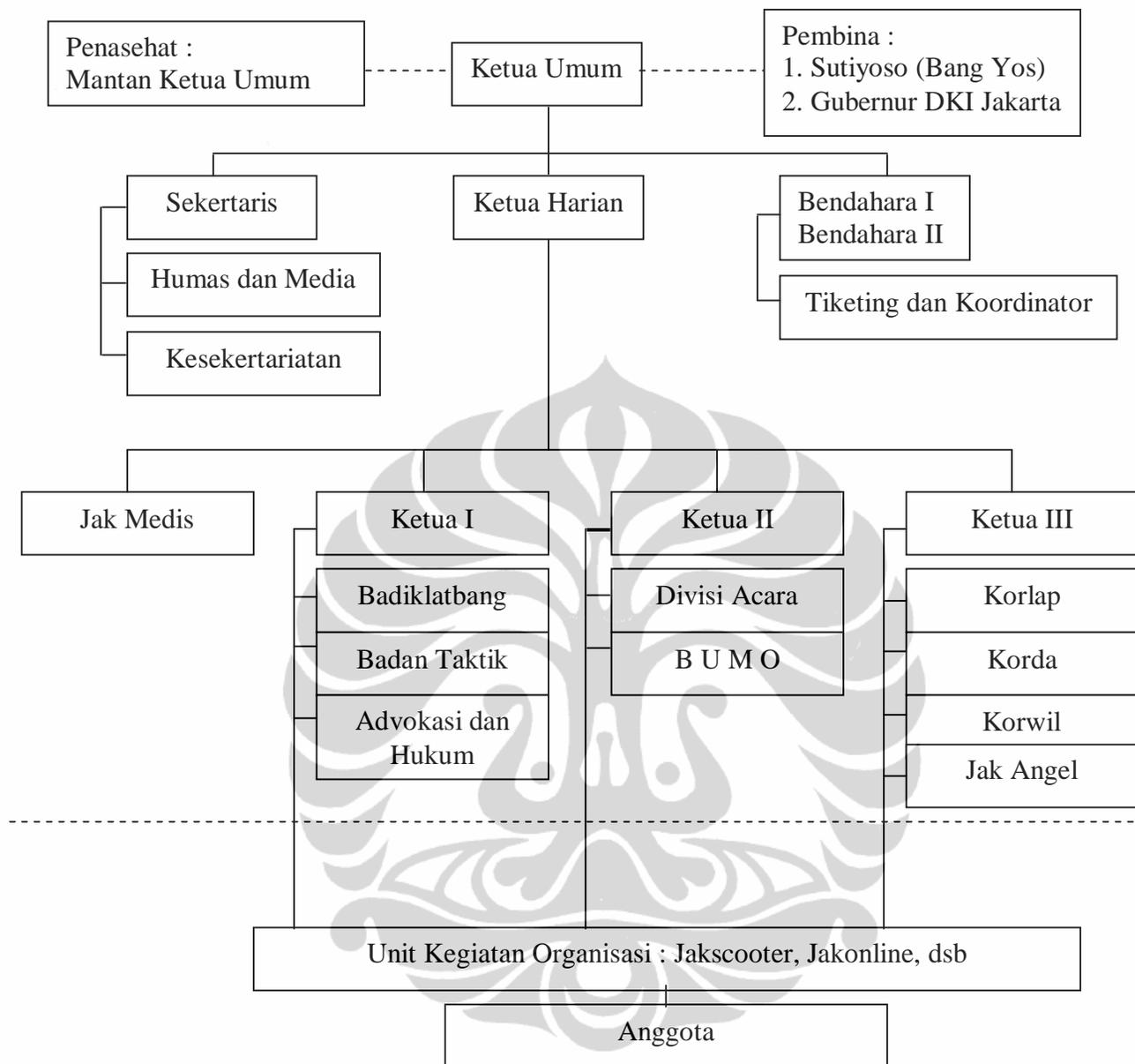
dipatenkan ke Dirjen Haki. Untuk sumber dana operasionalisasi organisasi Jakmania berasal dari hasil penjualan tiket khususnya kepada anggota Jakmania, penyelenggaraan pelatihan sepakbola, dan sumbangan.

Untuk menjalin hubungan antar anggota dengan pengurus Jakmania, selain dilakukan koordinasi pada setiap pelaksanaan pertandingan, mereka juga melakukan pertemuan secara rutin di *basecamp* stadion Lebakbulus dua kali seminggu (hari Selasa dan Jumat). Selain kegiatan rutin dilaksanakan, para Jakmania juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan sebagainya dalam upaya membangun silaturahmi antar anggota Jakmania.

4.1.1.2 Strukur Organisasi

Struktur organisasi mengalami beberapa kali perubahan, perubahan ini didasarkan atas kebutuhan organisasi Jakmania agar lebih efektif dan efisien. Berikut susunan struktur organisasi Jakmania :





Gambar 4.1
Struktur Organisasi Jakmania
Sumber : Data Humas Jakmania

Pembentukan pengurus Jakmania melalui proses tertentu, untuk pemilihan ketua umum dilakukan selama dua tahun sekali dalam satu periode melalui kongres yang dihadiri oleh para Korwil. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa pengurus sesuai gambar 4.1, pemilihan para pengurus melalui tim Formatur yang dipimpin oleh ketua umum terpilih.

4.1.2 Polres Metro Jakarta Selatan

Gambaran situasi dan kondisi wilayah Polres Metro Jakarta Selatan dari hasil gambaran penelitian dokumen, peneliti membagi sub bagian yaitu mengenai situasi umum, situasi kesatuan, dan situasi kamtibmas.

4.1.2.1 Situasi Umum

4.1.2.1.1 Geografi

Letak wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan pada $06^{\circ} 15' 40.8''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 45' 00.0''$ Bujur Timur. Untuk wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan berada pada ketinggian 26,2 meter diatas permukaan laut. Kemudian posisi perbatasan wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara.
Berbatasan dengan wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat (Sungai Ciliwung, Jl. Sultan Agung Kecamatan Setiabudi dan Jl. Manggarai Utara Kecamatan Tebet).
- b. Sebelah Selatan.
Berbatasan dengan wilayah hukum Polres Depok (Jl. Raya Kelapa Dua dan Kampus UI serta wilayah Kecamatan Ciputat, Pamulang berbatasan Kali Pesanggrahan dengan emukiman penduduk.
- c. Sebelah Timur.
Berbatasan dengan wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur dan polres Depok (Sepanjang Kali Ciliwung).
- d. Sebelah Barat.
Berbatasan dengan wilayah hukum Jakarta barat (Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Asia Afrika), Polres Jakarta Barat (Jl. Arteri Pejompongan-Pondok Indah dan Kali Pesanggrahan) Wialayah tangerang (Kali Pesanggrahan).

Luas wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan tercatat 15.184,5 Ha untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan dan 3.248,5 Ha yang termasuk dalam Kabupaten Tangerang, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kecamatan Kebayoran Lama.

Dengan luas wilayah 1.931,52 Ha meliputi Kelurahan Grogol Utara, Grogol Selatan, Cipulir, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan, dan Pondok Pinang.

b. Kecamatan Tebet.

Dengan luas wilayah 905.10 Ha meliputi 7 Kelurahan Tebet Barat, Menteng Dalam, Manggarai Selatan, Tebet Timur, Bukit Duri, Kebon Baru, Manggarai, dan Tebet Barat.

c. Kecamatan Setiabudi.

Dengan luas wilayah 884,94 Ha meliputi Kelurahan Setia Budi, Karet, Karet Semanggi, Kuningan Timur, Pasar Manggis, Guntur, Menteng Atas, dan Karet Kuningan.

d. Kecamatan Mampang Prapatan.

Dengan luas wilayah \pm 764 Ha meliputi Kelurahan Bangka, Pela Mampang, Kuningan Barat, Tegal Parang, dan Mampang Prapatan.

e. Kecamatan Pasar Minggu.

Dengan luas wilayah 2.271,18 Ha meliputi Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Barat, Jatipadang, Cilandak Timur, Pejaten Timur, Ragunan, dan Kebagusan.

f. Kecamatan Cilandak

Dengan luas wilayah 1820.37 Ha meliputi Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak Barat, Cipete Selatan, Pondok Labu, dan LebakBulus.

g. Kecamatan Kebayoran Baru

Dengan luas wilayah 1891.26 Ha meliputi Kelurahan Gandaria Utara, Cipete Utara, Kramat Pela, Gunung, Senayan, Rawa Barat, Petogogan, Selong, Pulo, dan Melawai.

h. Kecamatan Ciputat

Dengan luas wilayah 368.5 Ha meliputi Kelurahan Ciputat, Cipayung, Serua, Serua Indah, dan Jombang.

i. Kecamatan Pancoran

Dengan luas wilayah 866,74 Ha meliputi Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, Kalibata, Rajawati, dan Cikoko.

j. Kecamatan Jagakarsa

Dengan luas 2.502,5 Ha wilayah meliputi Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Srengseng Sawah, dan Cipedak.

k. Kecamatan Pamulang

Dengan luas wilayah 2.880 Ha meliputi Kelurahan Pamulang Barat, Pamulang Timur, Pondok Cabe Udik, Pondok Cabe Ilir, Pondok Benda, Benda Baru, Kedaung, dan Bambu Apus.

l. Polsek Metro Pesanggrahan

Dengan luas wilayah 1.346.89 Ha meliputi Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Ulujami, Petukangan Utara, dan Petukangan Selatan.

Wilayah Polres Metro Jakarta Selatan terdiri dari 12 Polsek, dengan masing-masing Polsek :

a. Polsek Metro Kebayoran Lama

Polsek Metro Kebayoran Lama terdiri dari 3 (tiga) Polpos, antara lain Polpos Permata Hijau, Polpos Pasar, dan Polpos Pondok Indah.

b. Polsek Metro Tebet

Polsek Metro Tebet terdiri dari 5 (lima) Polpos, antara lain Polpos Manggarai, Polpos Bukit Duri, Polpos Tebet Timur, Polpos Kebon Baru, dan Polpos Menteng Dalam.

c. Polsek Metro Setiabudi

Polsek Metro Setiabudi terdiri dari 4 (empat) Polpos, antara lain Polpos Patra Jasa, Polpos Pasar Rumpit, Polpos Mega Kuningan, dan Polpos Gema Kuningan.

d. Polsek Metro Mampang Prapatan

Polsek Metro Mampang Prapatan terdiri dari 2 (dua) Polpos, antara lain Polpos Kemang dan Polpos Gatot Soebroto.

e. Polsek Metro Pasar Minggu

Polsek Metro Pasar Minggu terdiri dari 4 (empat) Polpos, antara lain Polpos Pejaten Barat, Polpos Ampera, Polpos Ragunan, dan Polpos Pejaten Timur.

f. Polsek Metro Cilandak

Polsek Metro Cilandak terdiri dari 4 (empat) Polpos, antara lain Pospol Pondok Labu, Polpos Terminal Lebakbulus, Polpos Bona Indah, dan Polpos Cipete Selatan.

g. Polsek Metro Kebayoran Baru

Polsek Metro Kebayoran Baru terdiri dari 2 (dua) Polpos, antara lain Polpos Blok M dan Polpos Senopati.

h. Polsek Metro Ciputat

Polsek Metro Ciputat terdiri dari 6 (enam) Polpos, antara lain Polpos Cirendeui, Polpos Cinere, Polpos Serua, Polpos Pondok Raji, Polpos Bintaro, dan Polpos Jombang.

i. Polsek Metro Pancoran

Polsek Metro Pancoran terdiri dari 3 (tiga) Polpos, antara lain Polpos TMPN Kalibata, Polpos Kalibata Indah, dan Polpos Lantas Pancoran.

j. Polsek Metro Jagakarsa

Polsek Metro Jagakarsa terdiri dari 2 (dua) Polpos, antara lain Polpos Ciganjur dan Polpos Lenteng Agung.

k. Polsek Metro Pamulang

Polsek Metro Pamulang terdiri dari 2 (dua) Polpos, antara lain Polpos Pamulang dan Polpos Pondok Cabe.

l. Polsek Metro Pesanggrahan

Polsek Metro Pesanggrahan terdiri dari 3 (tiga) Polpos, antara lain Polpos Permai, Polpos Pet-Sel, dan Polpos Pet-Utara.

4.1.2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk pada daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan yang meliputi wilayah Walikota Jakarta Selatan dan sebagian wilayah Tangerang yang terbagi dalam 12 kecamatan yaitu sebesar 2.310.147 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 126,3 jiwa / Km yang berdomisili di 12 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Rincian Jumlah Penduduk di Wilayah Hukum Jakarta Selatan

No	Polsek	Laki-laki		Perempuan		Ket.
		WNI	WNA	WNI	WNA	
1.	Kebayoran Lama	120.149	80	119.524	58	
2.	Tebet	150.621	25	137.505	23	
3.	Setiabudi	60.278	51	59.454	29	

4.	Mp. Prapatan	55.815	32	49.792	21
5.	Pasar Minggu	132.565	98	124.728	99
6.	Cilandak	76.724	36	77.314	27
7.	Kebayoran Baru	72.437	82	71.642	36
8.	Ciputat	135.914	421	144.991	286
9.	Pancoran	88.271	10	60.201	4
10.	Jagakarsa	117.046	10	104.958	6
11.	Pamulang	96.674	0	97.533	0
12.	Pesanggrahan	81.302	9	73.259	7
J u m l a h		1.187.796	854	1.120.901	596

Sumber : Intel Dasar Polres Metro Jaksel, 2011

Tabel 4.2 : Rincian Jumlah Penduduk Dalam Jenis Pekerjaan di Wilayah Hukum Jakarta Selatan

No	Kecamatan	Pertanian	Industri	Bangunan	Perdagangan	Transportasi & Komunikasi	Keuangan	Perbankan	Pemerintahan	Jasa-jasa	Lain-lain
1	Keb. Lama	86	2712	1104	25145	2067	675	12499	4587	1773	
2	Pesanggrahan	169	2176	1627	994	832	1741	11483	6977	1595	
3	Tebet	5	4074	5154	11099	7188	4781	15272	13957	7555	
4	Setiabudi	37	1512	2110	7286	878	1060	10304	4792	2092	
5	Mp. Prapatan	36	1847	739	4201	2757	1491	10418	4247	4574	
6	Pasar Minggu	195	9359	4846	13388	4007	1759	18443	6169	3624	
7	Cilandak	127	1913	3114	10452	2115	2873	10530	9019	5134	
8	Keb. Baru	0	322	3079	8029	1312	1402	11073	3984	3116	
9	Pancoran	60	799	2952	2978	3654	387	2784	6624	7896	
10	Jagakarsa	5135	3102	5935	7856	3211	2488	8318	8388	2518	
	Jumlah	5850	27816	30660	91428	28021	18657	111124	68744	39877	
12	Ciputat	6081	1468	1997	1116	2114	546	11010	3322	1988	
13	Pamulang	3213	980	1610	901	1108	322	8901	1894	1110	
	Jumlah	9294	2448	3607	2017	3222	868	19911	5216	2098	
	Jumlah Seluruhnya	15144	30264	34267	93445	31243	19525	131035	73960	41975	

Sumber : Intel Dasar Polres Metro Jaksel, 2011

4.1.2.1.3 Sumber Daya Alam

Untuk wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan tidak ada sumber daya alam berupa pertambangan mineral atau migas. Sumber daya alam yang ada adalah sumber daya alam non migas seperti hasil pertanian berupa pembibitan tanaman Hortikultura di Pesangrahan, hasil perikanan budidaya lele dan hasil peternakan sapi di Pamulang.

4.1.2.2 Situasi Kesatuan

a. Komposisi Personil Polri

Komposisi personil kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan sesuai dengan jumlah DSPP 3.300 personil, namun jumlah nyata sekarang 1.989 personil, sehingga ada kekekurangan personil. Untuk lebih jelasnya rincian komposisi personil dijelaskan dengan tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 : Jumlah Komposisi Personil Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan

No	Pangkat	DSPP	Nyata		Jumlah
			Pria	Wanita	
1	KOMBES POL	1	1		1
2	AKBP	12	7	3	10
3	KOMPOL	41	36	2	38
4	AKP	155	67	14	81
5	IPTU	325	13	1	14
6	IPDA		36	8	44
7	AIPTU		493	16	509
8	AIPDA		124	3	127
9	BRIPKA	2766	415	11	426
10	BRIGADIR		245	4	249
11	BRIPTU		412	18	430
12	BRIPDA		60		60
Jumlah		3300	1909	80	1989

Sumber : SDM Polres Metro Jakarta Selatan, 2011

b. Komposisi Personil PNS Polri

Untuk komposisi personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Polres Metro Jakarta Selatan dengan rincian tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 : Jumlah Komposisi Personil PNS Polres Metro Jakarta Selatan

No	Golongan	Nyata
1	Golongan IV	
2	Golongan III	36
3	Golongan II	45
4	Golongan I	2
Jumlah		83

Sumber : SDM Polres Metro Jakarta Selatan, 2011

c. Komposisi Materiil, Fasilitas dan Jasa

Data materiil yang saat sekarang ini dimiliki Polres Metro Jakarta Selatan dapat dilihat dengan rincian tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 : Data Komposisi Materiil Polres Metro Jakarta Selatan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranmor					
	R4	173	103	49	21	MT-88
	R2	344	140	69	135	MT-88
	R6	10	7	2	1	HSD
2	Senpi					
	Senpi Genggam	1.536	1.514	12	1	9 Hilang : 7 TGR, 2 PROSES
	Senpi bahu	330	259	60	11	
	Pelontar/Laras Licin	16	7	7	2	
3	Amunisi					
	Hampa	48.720	-	-	-	

Tajam	88.890	-	-	-
Karet	27.340	-	-	-
Gas Air Mata	973	-	-	-

Sumber : SDM Polres Metro Jakarta Selatan, 2011

d. Komposisi Fasilitas

Untuk komposisi fasilitas yang dimiliki Polres Metro Jakarta Selatan antara lain :

(1) Fasilitas Sosial

- Sekolah PT = 1 buah
- Gedung Aula / Ops = 1 buah

(2) Fasilitas Kesehatan

- Poliklinik = 5 buah

(3) Fasilitas Perkantoran

- Mapolres = 1 buah
- Mapolsek = 12 buah
- Pos Polisi = 39 buah

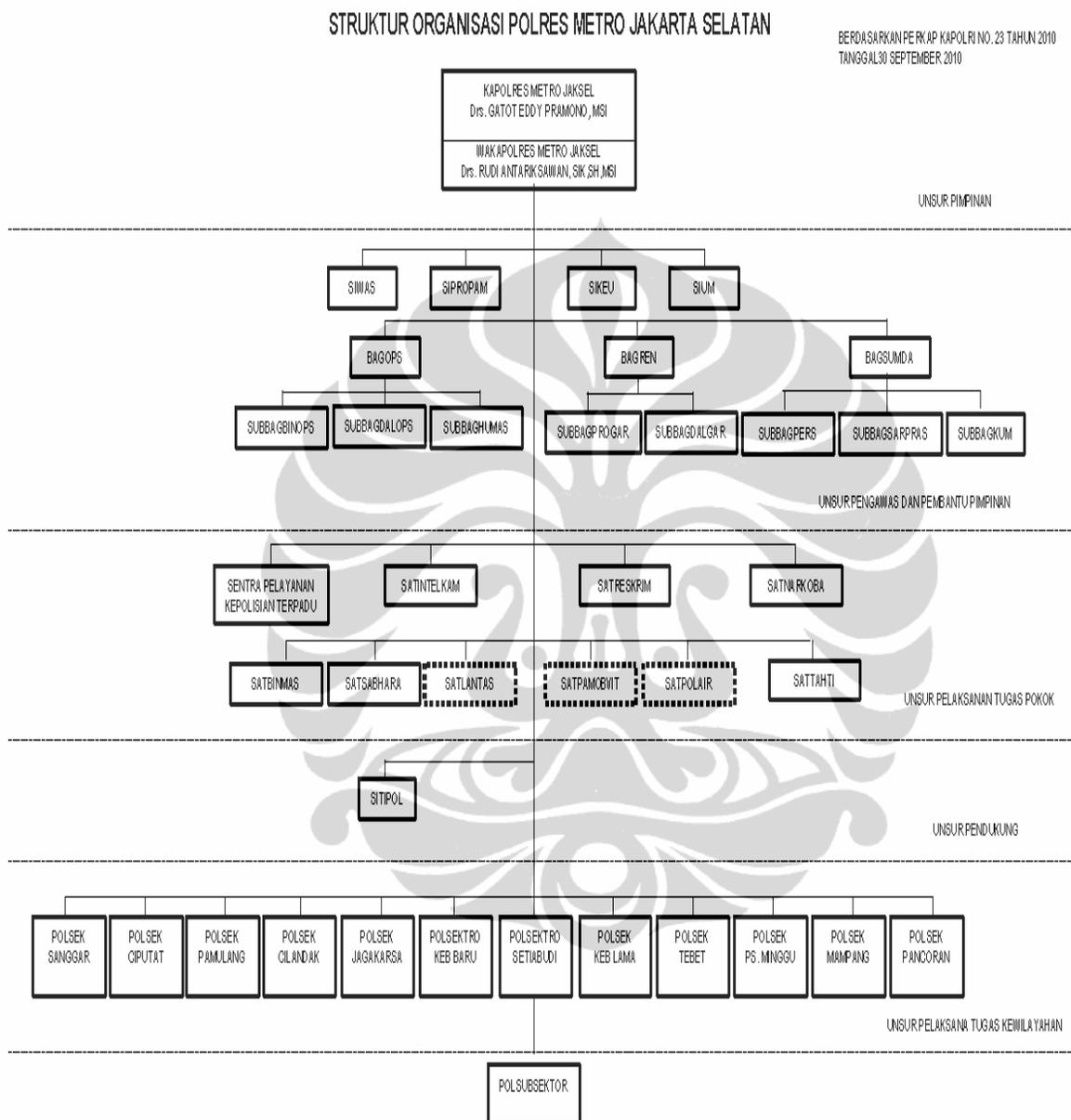
(4) Fasilitas Bangunan

- Masjid = 1 buah
- Asrama = 8 buah
- Garasi = 1 buah

e. Struktur Organisasi

Dalam rangka pembagian pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian di wilayah negara Republik Indonesia, disusunlah struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai daerah hukum menurut tugas kepolisian. Mengenai struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005. Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/07/I/2005, organisasi kepolisian pada tingkat wilayah Kotamadya Jakarta Selatan yaitu Polres Metro Jakarta Selatan (Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan). Sehingga Polres Metro Jakarta Selatan merupakan

pelaksana utama kewilayah Polda Metro Jaya (Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya) dibawah kedudukan Kapolda.



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Polres Metro Jakarta Selatan

Sumber: SDM Polres Metro Jakarta Selatan, 2011

f. Visi dan Misi Polres Metro Jaksel

Visi Polres Metro Jakarta Selatan adalah mewujudkan keamanan diwilayah Jakarta Selatan yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menampilkan Polri yang profesional, bermoral dan modern, yang dipercaya dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian visi tersebut diatas, sebagai penjabaran misi Polres Metro Jakarta Selatan ke depan adalah :

- (1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, sehingga masyarakat merasa aman, tentram, nyaman dan damai;
- (2) Mengelola sumber daya manusia Polri Polres Metro Jakarta Selatan, agar terampil, Profesional dan bermoral yang baik dan memadai guna mendukung tugas – tugas Kepolisian;
- (3) Menggelar kekuatan anggota, guna menekan segala bentuk gangguan Kamtibmas diwilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, melalui tindakan pre-emptif, preventif serta penegakan hukum yang terukur, profesional serta menjunjung tinggi hak azasi manusia, dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat;
- (4) Mengelola sumber daya Materiil dan fasilitas Polres Metro Jakarta Selatan yang tersedia dengan tepat waktu dan tepat alokasi dalam rangka menunjang kebutuhan pelaksanaan operasional;
- (5) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi hukum melalui Pemolisian masyarakat;
- (6) Melakukan upaya pendekatan personil Polres Metro Jakarta Selatan dan masyarakat melalui kegiatan nyata yaitu mendatangi, berkomunikasi, saling berbagi informasi dan berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam kerangka Pemolisian yang berbasis kepada masyarakat guna meraih kepercayaan dalam penegakan hukum.

g. Kebijakan Kapolres Metro Jakarta Selatan.

(1) Kegiatan pembangunan kekuatan

a) Pembangunan system dan metoda.

- Melaksanakan validasi organisasi sampai tingkat Polpos.
- Dilaksanakan pemasangan CCTV pada Mapolres Metro Jakarta Selatan yang ditempatkan diruang - ruang vital.
- Diupayakan system komputerisasi *on line* sampai tingkat Polsek.
- Diusulkan upaya pengembangan Polsek Ciputat dan Polsek Pamulang dari Polsek tipe B menjadi tipe A.

b) Pembangunan Personil.

- Mengajukan rencana kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan kekuatan Personil.
- Mengupayakan masing - masing Polsek dapat menjaring putra - putri daerah untuk dapat mendaftarkan diri menjadi Ba Polri potensial.

c) Pembangunan Materiil.

Pembangunan Materiil difokuskan untuk memberdayakan peralatan yang langsung mendukung operasional dilapangan antara lain :

- Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta (bergerak dalam perawatan kendaraan dinas).
- Mengupayakan penambahan komputer terutama Pentium 4 untuk kelancaran tugas staf yang sekaligus menunjang kelancaran tugas operasional.
- Merawat dan memaksimalkan peralatan khususnya yang mendukung kegiatan operasional berupa borgol, tongkat Polri, alat PHH dan alat - alat dalmas.
- Merenovasi ruang rekreasi sekaligus ruang rapat Mapolres.

d) Pembangunan Fasilitas.

Pembangunan fasilitas yang akan dilaksanakan dan dalam tahap pelaksanaan antara lain : merenovasi ruang PPA, loby Mapolres, ruang informasi serta penggantian plafon dengan *sign gypsum*.

(2) Kegiatan pembinaan Kekuatan :

a) Perawatan Personil.

- Peningkatan pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak anggota Polri.
- Melaksanakan olah raga rutin setiap hari Sabtu dengan mendatangkan peraga senam aerobik yang professional.
- Peningkatan pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan klinik yang ada.

b) Pembinaan / Pemeliharaan Materiil dan Fasilitas.

- Pemeliharaan materiil dan fasilitas diharapkan memperpanjang usia pakai dengan mengadakan kerjasama dengan pihak bengkel.
- Pendistribusian materiil khususnya BBM secara tepat dan cepat.
- Merenovasi fasilitas mako untuk layak huni dan menghindari kerusakan yang lebih parah.

(3) Kegiatan fungsi / Peningkatan fungsi

a) Pengawasan dan Pemeriksaan.

- Melaksanakan kegiatan anev para pejabat utama Polres dan Kapolsek untuk sosialisasi dibidang pembinaan maupun operasional.
- Pemberdayagunaan Pamen Was maupun Pa siaga guna pengawasan dan pemeriksaan serta pemberdayagunaan optimalisasi kegiatan bidang operasional maupun staf.

b) Pembinaan Personil.

- Pemberian penghargaan terhadap anggota yang berprestasi pada apel bulanan dan penindakan hukum secara tegas terhadap anggota yng melakukan penyimpangan / pelanggaran hukum secara konsekwen.
- Pemberian promosi Jabatan, kepangkatan dan pendidikan pengembangan dilaksanakan berdasarkan rangking dan wanjak.
- Mutasi Personil dilaksanakan atas dasar kebutuhan organisasi.

c) Pembinaan Kemitraan.

- Membina hubungan kemitraan dengan berbagai potensi dalam masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan pemecahan masalah masyarakat.

- Pemberdayaan Babinkamtibmas untuk meningkatkan Pam swakarsa maupun deteksi dini serta peningkatan pelayanan masyarakat.
- Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dalam merekrut Calon Bintara Polri.
- Peningkatan pelayanan pendidikan pelatihan satpam serta meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait.

d) Profesi dan Pengamanan internal.

- Melaksanakan Pengamanan internal terhadap personil dan kegiatan operasional Kepolisian dengan memasang CCTV.
- Melaksanakan system satu pintu (membuka pintu masuk dan menutup pintu keluar) guna memudahkan pengawasan keamanan mako dan fasilitas.

e) Hubungan Masyarakat.

- Melakukan giat penerangan keliling untuk menyampaikan himbuan maupun sosialisasi kebijakan Pimpinan.
- Melakukan pertemuan antara lain dengan Chief security maupun pimpinan perusahaan guna membentuk opini masyarakat bagi kepentingan tugas Polri maupun kepentingan masyarakat.

f) Pembinaan Hukum.

Memberikan bantuan hukum dan nasehat terhadap anggota yang memerlukan sesuai Kebutuhan.

(4) Permasalahan yang dihadapi

a) Masalah Kriminalitas

Kejadian tindak pidana dari data kriminalitas yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli 2010, kejahatan yang cukup meresahkan masyarakat adalah :

- Pencurian dengan Kekerasan (Curas).

Pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di pemukiman / perumahan dan di jalan raya. Pemukiman dan perumahan yang menjadi sasaran adalah pemukiman tertentu / eksklusif / real estate, sedangkan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan lebih banyak menimpa kepada para nasabah

bank, kurir/seles perhiasan, dengan berbagai macam modus operandi dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Alat yang digunakan tidak hanya senjata tajam akan tetapi menggunakan senjata api rakitan / standar TNI - Polri. Pengungkapan terhadap tindak pidana dengan kekerasan dirasakan masih kurang, sehingga persentase penyelesaian perkaranya sangat kecil.

- Pencurian dengan pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan yang menjadi sasaran utama adalah kendaraan bermotor roda dua / empat yang di parkir di tempat yang penjagaannya kurang bagus, di samping itu pencurian dengan pemberatan dilaksanakan / terjadi di perumahan - perumahan mewah / eksklusif yang sedang ditinggal penghuninya (rumah kosong, atau rumah yang hanya dijaga oleh pembantu). Modus operandi yang dilakukan beraneka macam. Pengungkapan terhadap tindak pidana dengan pemberatan juga dirasakan masih kurang, sehingga persentase penyelesaian perkaranya sangat kecil.

- Ancaman peledakan Bom.

Ancaman peledakan bom terjadi beberapa kali di wilayah hukum Polres Metropolitan Jakarta Selatan. Sasaran atau obyek yang menjadi ancaman bom adalah gedung bertingkat baik yang berupa perkantoran atau pusat perbelanjaan / sentra ekonomi, dimana ditempat - tempat tersebut terdapat konsentrasi massa yang cukup banyak. Beberapa sarana / alat yang digunakan untuk melakukan ancaman yaitu melalui telepon kabel dan berita melalui SMS. Pengungkapan perkaranya cukup rumit, tidak mudah untuk mencari pelaku yang mengancam untuk meledakkan bom.

b) Masalah Lalu Lintas.

- Kejadian kecelakaan Lalu lintas bulan Januari s/d Juli 2010.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi menyebar di seluruh wilayah Polres Metropolitan Jakarta Selatan dalam arti tidak ada tempat tertentu yang menjadi tempat yang paling rawan terhadap kecelakaan lalu lintas dan juga tidak ada tempat atau jalan yang terbebas dari kecelakaan atau kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas, akan tetapi semua tempat adalah rawan

terjadi kecelakaan lalu lintas, hal itu biasa terjadi karena tingkat disiplin pemakai jalan yang rendah, sehingga memungkinkan kecelakaan lalu lintas terjadi dimana saja, oleh karena itu Dit Lantas Polda Metro Jaya menyarankan kepada pengguna sepeda motor agar menyalakan lampu di siang hari, dan pada malam hari pada saat pengguna jalan mulai berkurang atau sepi cenderung untuk dijadikan ulah pengguna jalan tertentu untuk week end menjadi trend tersendiri bagi kawula muda untuk menunjukkan ketrampilannya mengendarai kendaraan bermotornya dengan memacu kendaraannya di jalan raya yang disaksikan oleh banyak penonton atau sering juga disebut kebut – kebutan liar / trek trekan liar.

- Tempat Kemacetan Lalu Lintas bulan Januari s/d Juli 2010. Wilayah Jakarta Selatan merupakan wilayah pemukiman, perkantoran dan perekonomian, sehingga sangat memberi corak terhadap masalah lalu lintas. Pola pergerakan arus lalu lintas dari pemukiman ke tempat kerja dan sebaliknya. Pergerakan anak sekolah dimulai pagi hari, siang hari dan sore hari, sedangkan pergerakan menuju kawasan perekonomian dan sebaliknya dilakukan pada siang hari sampai malam hari. Tempat - tempat hiburan akan dipadati oleh arus lalu lintas setelah matahari terbenam sampai dengan menjelang pagi hari. Belum tertatanya transportasi dengan baik dan banyak pasar tumpah dari pedagang kaki lima turut memperparah kemacetan arus lalu lintas di beberapa wilayah Metropolitan Jakarta Selatan.
- Tempat kesemerawutan arus Lalu Lintas bulan Januari s/d Juli 2010, yang diakibatkan tingkat disiplin yang rendah dikombinasikan adanya pertokoan, pasar, pembangunan jalan dan pedagang kaki lima yang berada hampir di sepanjang pinggir jalan terlebih menjelang hari raya keagamaan dan sarana prasarana jalan yang minim menyebabkan kesemerawutan lalu lintas tidak terhindarkan. Kesemerawutan terjadi di berbagai tempat khususnya di jalan - jalan arteri.

(5) Program Kegiatan dalam Penanganan Masalah tahun 2010.

Dalam rangka menangani masalah sebagaimana tersebut diatas program kegiatan

Polres Metro Jakarta Selatan melakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

a) Masalah Kriminalitas

Upaya untuk menekan kejadian tindak pidana yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan adalah :

(a) Upaya Babinkamtibmas :

Upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah niat dan kesempatan orang berbuat jahat di antaranya adalah :

- Kunjungan atau silaturahmi kamtibmas :

Kunjungan atau silaturahmi kamtibmas dilaksanakan oleh Kapolres / Wakapolres, Para Kabag, para Kasat dan para Kapolsek beserta Kanitnya kepada para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda untuk mendapatkan masukan tentang situasi kamtibmas yang ada didaerahnya serta memberikan informasi kepada para tokoh tersebut.

Kunjungan atau silaturahmi kamtibmas yang dilaksanakan oleh anggota Bhabinkamtibmas di desa atau kelurahan wilayah masing - masing untuk menerima masukan dan memberikan informasi hal - hal yang berkait dengan masalah kamtibmas.

- Bimbingan dan penyuluhan kepada anggota satuan pengamanan dan anggota pos keamanan lingkungan antara lain:

- ✓ Melaksanakan apel kesiapan secara berkala kepada satuan pengamanan yang bertugas di pusat - pusat perbelanjaan atau niaga dan di pemukiman - pemukiman.
- ✓ Hal yang sama melaksanakan apel Kapos Kamling
- ✓ Mendatangi pos - pos penjagaan satuan pengamanan atau pos kamling.

Dalam melaksanakan kunjungan tersebut masing - masing anggota membuat catatan dan dokumentasi yang kemudian dikumpulkan di unit atau satuan masing - masing untuk di analisa dan evaluasi (anev) sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya.

- Meningkatkan kualitas patroli Polres dan Polsek.

Patroli mobil yang diperankan dengan mobil Kia Carens dan Kia Spektra sebanyak 67 mobil dan mendapat tambahan mobil sedan Ford Focus sebanyak 85 Unit dan Mobil Ford Ranger 2 Unit, diharapkan harus mampu menjangkau tempat -tempat yang benar - benar di indikasikan sebagai rawan kriminalitas yang meresahkan (benar - benar Police Hazard). Patroli dilaksanakan dengan cara berdialog dengan kelompok masyarakat yang berada di wilayah patrolinya (beatnya).

Hasil dialog tersebut direkam / dicatat dan dilaporkan kepada Kanit Patroli masing - masing. Kanit Patroli melakukan rekapitulasi laporan dari masing - masing petugas dan mengelompokkan, kemudian menganalisa dan mengevaluasi untuk bahan patroli berikutnya, bahan laporan ke Kasat Samapta / Kapolsek dan bahan kordinasi dengan para Perwira yang ada di Mapolsek / di satuannya untuk mencari solusi atau jalan keluar.

- Patroli Simpatik Polres Metro Jakarta Selatan.

Patroli ini diluncurkan ke tempat - tempat rawan kriminalitas dan tidak terkait daerah / beat patroli seperti yang diperankan oleh patroli dengan mobil Kia Carens atau Kia Spektra.

Anggota patroli juga melaksanakan dialog dengan masyarakat / kelompok masyarakat untuk mencari masukan - masukan. Hasil dialog dicatat dan dilaporkan kepada Kanit Patroli masing - masing. Kanit Patroli melakukan rekapitulasi laporan dari masing - masing petugas dan mengelompokkan. kemudian menganalisa dan mengevaluasi untuk bahan rengiat patroli berikutnya, kemudian bahan laporan ke Kasat Samapta / Kapolsek dan bahan kordinasi dengan para Perwira yang ada di Mapolsek / di satuannya untuk mencari solusi atau jalan keluar.

- Patroli dengan metode titik singgung.

Pelaksanaan patroli Polisi di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan tidak hanya diperankan oleh anggota Polres dan Polsek jajaran di Jakarta Selatan, namun juga diperankan oleh Patroli dari Polda Metropolitan Jakarta Raya. Untuk itu dalam meningkatkan kualitas patroli sekaligus untuk meningkatkan sinergi hasil patroli pada jam-jam tertentu patroli Polda, Polres dan Polsek, melaksanakan pertemuan di satu titik yang telah ditentukan untuk tukar menukar informasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan bersama atau masing - masing unit patroli tersebut.

- Pengawasan Lalu Lintas.

Anggota Polisi Lalu Lintas atau Samapta baik Polres maupun Polsek pada jam - jam tertentu melaksanakan tugas fungsi lalu lintas. Tugas fungsi lalu lintas tersebut berupa pengawasan arus lalu lintas di berbagai tempat secara stationer / menetap maupun secara bergerak.

Dalam pelaksanaan tugasnya tidak sekedar melakukan pengaturan arus lalu lintas akan tetapi melakukan pengawasan lalu lintas, sehingga hal - hal yang perlu mendapat bantuan kepolisian atau yang menyangkut penyimpangan dari pemakai jalan juga dapat dengan cepat teridentifikasi.

Apabila melihat hal-hal tersebut, petugas dengan segera dapat bertindak, dalam melaksanakan patroli tersebut masing - masing anggota melakukan dialog dengan masyarakat, membuat catatan dan dokumentasi yang kemudian dikumpulkan di unit atau satuan masing - masing untuk di analisa dan evaluasi sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya.

(b) Upaya penegakan hukum.

Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus - kasus menonjol yang meresahkan masyarakat diawali dengan upaya mengumpulkan informasi yang sebanyak - banyaknya di tempat kejadian perkara (TPTKP) dan olah TKP yang benar - benar merupakan salah satu faktor utama untuk

dapat mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi, serta untuk membekali anggota dalam penanganan TPTKP dan olah TKP ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu :

- Pelatihan dengan materi khusus.

Kabagmin dengan berkoordinasi dengan Kasat Reskrim merencanakan pelatihan terhadap anggota dengan materi yang spesifik yang menyangkut pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan serta penanganan ancaman peledakan bom. Sedangkan Kabag Ops menyiapkan skenario kejadian yang berkaitan dengan tujuan rencana pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri agar lebih profesional.

- Berlatih sambil melaksanakan tugas.

Anggota yang tergabung dalam team TPTKP dan Olah TKP diawasi oleh Ka SPK dan Kanit Reskrim Polsek atau Perwira Reserse yang ditunjuk untuk melaksanakan olah TKP. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana TPTKP dan olah TKP telah dilaksanakan, kalau hal ini dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten, maka team TPTKP dan olah TKP akan memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi. Informasi lanjutan tentunya didapat dari analisa dan evaluasi hasil olah TKP didukung dengan jaringan informasi yang dibentuk melalui kegiatan wajib kunjung yang dilakukan oleh anggota reserse atau anggota intelkam.

Penyidikan terhadap kasus - kasus yang sangat meresahkan masyarakat ditangani secara seksama oleh penyidik dan penyidik pembantu. Penyidik aktif melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi dan juga tersangka, tidak lagi hanya menyerahkan kepercayaan kepada para penyidik pembantu, sehingga ada kecenderungan para penyidik hanya melakukan pembubuhan tandatangan dari apa yang telah dilakukan oleh para penyidik pembantu. Dengan pemberdayaan penyidikan tersebut maka akan didapat kualitas tenaga penyidik yang profesional, setiap pemberkasan perkara yang diserahkan kepada Jaksa

atau Penuntut Umum tidak dikembalikan, serta senantiasa Kordinasi dengan instansi terkait termasuk instansi CJS (Criminal Justice System) dilaksanakan secara konsisten dan berlanjut, demikian juga kordinasi dengan PPNS, sehingga apa yang dihasilkan benar - benar berkualitas.

b) Masalah Lalu Lintas.

(a) Penanganan Internal.

- Kejadian kecelakaan lalu lintas.

Penanganan kecelakaan lalu lintas memerlukan kecepatan dan profesionalisme. Arus lalu lintas yang demikian padat khususnya pada siang hari dan malam hari libur di beberapa tempat hiburan, perlu kemampuan yang terbaik dalam menangani apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur jalan padat tersebut. Kecepatan penanganan akan berdampak pada arus lalu lintas itu sendiri, sedangkan penanganan yang lambat akan memperparah ketidak lancarannya arus lalu lintas. Kemampuan penanganan yang baik akan mempercepat pulihnya arus lalu lintas yang terblokir akibat kecelakaan lalu lintas. Disamping itu membantu mempercepat pengurusan asuransi jasa raharja akan dapat memberikan tingkat kepercayaan masyarakat khususnya yang terlibat kecelakaan lalu lintas kepada petugas Polisi lalu lintas. Untuk memberikan bekal kemampuan terhadap anggota Polisi lalu lintas tentunya perlu diberi pelatihan - pelatihan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Tempat kemacetan lalu lintas.

Penempatan anggota Polisi lalu lintas dan Samapta ditempat kemacetan khususnya jalur - jalur jalan utama. Penempatan dilakukan baik secara stationer dan mobile / bergerak. Petugas yang stationer mempunyai tugas untuk mencairkan kemacetan yang berada ditempat tersebut sedangkan petugas yang mobile / bergerak mempunyai tugas untuk melihat simpul - simpul kemacetan yang bergerak sekaligus bertugas untuk mencairkan kemacetan lalu lintas tersebut. Pengamatan dengan

cermat terhadap penyebab utama kemacetan lalu lintas dan melakukan tindakan yuridis pro yustitia dan atau secara persuasif edukatif terhadap pelanggaran lalu lintas akan sangat membantu mencairnya kemacetan lalu lintas tersebut.

- Tempat kesemerawutan lalu lintas.

Kesemerawutan atau ketidak tertiban lalu lintas muncul akibat ketidak disiplin dari para pemakai jalan. Menaikkan dan menurunkan penumpang disembarang tempat, menyeberang jalan tidak pada tempatnya, dalam pengawasan dan penjagaan arus lalu lintas diimbangi dengan penindakan terhadap para pelanggar pada tempat potensial kesemerawutan yang menyebabkan bertambahnya kemacetan arus lalu lintas, dan dapat memberikan tanggapan negatif dari masyarakat terhadap petugas Kepolisian dilapangan.

- Penyuluhan atau *Open House* masalah Lalu Lintas.

Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat lalu lintas baik secara langsung dilapangan (penerangan keliling) atau ketempat - tempat tertentu (sekolah, terminal, pasar dll) disamping itu memberikan kesempatan kepada masyarakat (khususnya siswa sekolah) untuk mendatangi kantor Polisi lalu lintas untuk melihat dari dekat aktifitas Polisi lalu lintas.

- Pengetatan pengeluaran perpanjangan surat ijin mengemudi (SIM) kendaraan bermotor.

(b) Penanganan eksternal

Penanganan masalah lalu lintas tidak hanya monopoli anggota Polri, berbagai kepentingan masyarakat tumpah ruah di jalan raya, sehingga penanganan masalah lalu lintas juga harus dilaksanakan secara bersama - sama oleh semua pihak yang memiliki kepentingan di jalan raya. Sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai, disiplin berlalu lintas yang masih minim, penggunaan fasilitas jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya menjadi sasaran utama atau obyek utama dalam

penanganan masalah lalu lintas. Forum bersama dalam suatu wadah perlu diadakan atau dibentuk dalam rangka menyamakan persepsi tentang permasalahan yang ada di jalan sehingga didapat solusi yang terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas berlalu lintas di jalan.

h. Data Kriminal dan Kecelakaan Lalulintas

Tabel 4.6 : Perbandingan Data Gangguan Kamtibmas 11 (Sebelas) Jenis Kasus Tahun 2009 Dengan 2010

No.	Jenis Kasus	Th. 2009	Th. 2010	Tren
1	Curas	92	65	Turun
2	Curat	691	572	Turun
3	Anirat	267	212	Turun
4	Pembunuhan	9	14	Naik
5	Curanmor	1.376	699	Turun
6	Kebakaran	50	53	Naik
7	Judi	72	47	Turun
8	Peras atau Ancam	39	30	Turun
9	Perkosaan	4	3	Turun
10	Narkotika	783	545	Turun
11	Kenakalan Remaja	24	23	Turun
Jumlah		3.407	2.263	Turun

Sumber : Bag Ops Polres Metro Jaksel 2011

Tabel 4.7 : Data Jenis Kecelakaan Lalulintas Tahun 2010

No.	Jenis Kasus	Jumlah	Ket.
1	Kecelakaan Lalulintas	646	
2	Korban Meninggal Dunia	70	
3	Korban Luka-luka	779	
4	Kerugian Materiil	Rp. 1.013.450.000,-	
5	Jumlah Penyelesaian Kasus	328 Kasus	

Sumber : Bag Ops Polres Metro Jaksel 2011

4.2 Gambaran Karakteristik Profil Responden

Responden yang terkumpul dalam penelitian ini sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang, tetapi yang dapat dianalisis sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) orang dan 4 (empat) orang tidak disertakan, hal ini dikarenakan mereka 3 (tiga) orang tidak lengkap mengisi kuesioner yang telah diberikan dan 1 (satu) merupakan supporter Persita.

(1) Jenis Kelamin dan Usia Responden

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat perbandingan responden laki-laki dengan perempuan lebih dominan laki-laki dengan jumlah 105 orang (83%), dan perempuan sebanyak 21 orang (17%). Dengan demikian suporter sepakbola Jakmania selain mempunyai suporter laki-laki juga suporter perempuan walaupun minoritas.

Untuk usia responden para Jakmania mencakup mulai anak-anak, remaja sampai dengan orang tua, namun rata-rata dalam usia remaja menginjak dewasa umur 17-24 tahun sebanyak 89 orang (71%), sedangkan usia 23-35 tahun sebanyak 28 orang (22%). Deskripsi lengkap jenis kelamin dan usia responden Jakmania tabel 4.6.

Tabel 4.8 : Perbandingan Jenis Kelamin dan Usia Responden

Jenis Kelamin	Kelompok Usia					Total
	< 16 th	17-24 th	25-35 th	36-45 th	> 45 th	
Laki-laki	4	71	27	2	1	105
Perempuan	2	18	1	0	0	21
Total	6	89	28	2	1	126

Sumber : hasil olah data 2011

(2) Hobi Responden

Berdasarkan tabel 4.9 hobi responden selain olahraga sepakbola yang utama juga mempunyai beberapa hobi, responden Jakmania juga mempunyai hobi yang berhubungan dengan bola kaki yaitu futsal sebesar 41%, untuk renang 33 15.9%, bulutangkis 13.5 %, bola voli sebesar 9.7%, tenis meja sebesar 5.3%, dan selebihnya 2.4% terbagi atas beberapa cabang olahraga lainnya.

Tabel 4.9 : Presentasi Hobi Responden Selain Sepakbola

Jenis Hoby	Frequency	Percent
Basket	25	12,1
Voli	20	9,7
Tenis Meja	11	5,3
Berenang	33	15,9
Futsal	85	41,1

Bulu Tangkis	28	13,5
Lain-lain	5	2,4
Total	207	100,0

Sumber : hasil olah data 2011

(3) Jabatan Kepengurusan Jakmania Dari Responden

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa dari 126 responden, presentase jabatan kepengurusan Jakmania dari responden, presentase jabatan yang dipegang responden wakil ketua 0.8 %, sekertaris 4 %, bendahara 2.4 %, koordinator lapangan 42.9 %, lainnya (anggota) 50 %.

Tabel 4.10 : Presentase Jabatan Kepengurusan Jakmania Dari Responden

Jabatan	Frequency	Percent
Ketua	0	0
Wakil ketua	1	0.8
Sekretaris	5	4
Bendahara	3	2.4
Koordinator Lapangan	54	42.9
Lainnya (anggota)	64	50
Total	126	100.0

Sumber : hasil olah data 2011

(4) Jangka Waktu Responden Bergabung Jakmania

Berdasarkan tabel 4.11 terlihat bahwa jangka waktu responden bergabung dengan supporter Jakmania dari 126 responden, presentase responden dengan jangka waktu bergabung di bawah enam bulan 7.1%, antara enam bulan sampai dengan satu tahun 12.7%, antara satu sampai dengan dua tahun 19.8%, antara dua sampai dengan empat tahun 32.5%, dan di atas empat tahun 27.8%.

Tabel 4.11 : Presentase Jangka Waktu Responden Bergabung Jakmania

Jangka Waktu	Frequency	Percent
Dibawah 6 bulan	9	7.1
Antara 6 bln sd 1 tahun	16	12.7
Antara 1 sd 2 tahun	25	19.8
Antara 2 sd 4 tahun	41	32.5

Diatas 4 tahun	35	27.8
Total	126	100.0

Sumber : hasil olah data 2011

(5) Wilayah Group Responden

Berdasarkan tabel 4.12 terlihat bahwa asal wilayah group responden dari 126 responden, presentase responden yang berasal dari wilayah Jakarta Pusat 9.5%, Jakarta Barat 5.6%, Jakarta Utara 2.4%, Jakarta Selatan 36.5%, dan untuk wilayah responden di luar Jakarta 30.2%.

Tabel 4.12 : Presentase Wilayah Group Responden

Wilayah	Frequency	Percent
Jakarta Pusat	12	9.5
Jakarta Barat	7	5.6
Jakarta Utara	3	2.4
Jakarta Selatan	46	36.5
Luar / Sekitar Jakarta	20	15.9
Total	38	30.2

Sumber : hasil olah data 2011

(6) Perkiraan Jumlah Suporter Sama Wilayah Dengan Responden

Berdasarkan tabel 4.13 terlihat bahwa dari 126 responden, presentase perkiraan jumlah suporter yang sama wilayah dengan responden dengan jumlah 1 s/d 100 orang yaitu 32%, jumlah suporter antara 101 s/d 200 yaitu 26 %, jumlah suporter antara 201 s/d 500 orang adalah 18%, dan dengan jumlah di atas 500 orang ada sekitar 23%.

Tabel 4.13 : Presentase Perkiraan Jumlah Suporter Sama Wilayah Dengan Responden

Jumlah Suporter	Frequency	Percent
1 s/d 100 orang	40	31.7
101 s/d 200 orang	33	26.2
201 s/d 500 orang	23	18.3
Diatas 500 orang	29	23.0
Total	126	100.0

Sumber : hasil olah data 2011

(7) Jenis Kendaraan Yang Digunakan Responden

Berdasarkan tabel 4.14 terlihat bahwa dari 126 responden, presentase jenis kendaraan yang digunakan responden untuk menonton sepakbola cenderung bervariasi dan ada beberapa yang menggunakan lebih dari satu jenis kendaraan untuk mencapai tujuan, presentase responden berdasarkan urutannya yang menggunakan sepeda motor yaitu 50.5%, menggunakan metromini / bis kota 27.9%, menggunakan mobil pribadi 9.5%, menggunakan kereta 6.3%, menggunakan busway 3.2%, dan yang tidak memakai kendaraan 2.6%.

Tabel 4.14 : Presentase Jenis Kendaraan Yang Digunakan Responden

Jenis Kendaraan	Frequency	Percent
Sepeda motor	96	50,5
Mobil pribadi	18	9,5
Metromini / Bis Kota	53	27,9
Busway	6	3,2
Kereta	12	6,3
Tidak Pakai Kendaraan	5	2,6
Total	190	100,0

Sumber : hasil olah data 2011

(8) Frekuensi Responden Menonton Sepakbola

Berdasarkan tabel 4.15 terlihat bahwa dari 126 responden ada beberapa responden yang memilih lebih dari satu jawaban, presentase frekuensi menonton sepakbola para responden di dominasi menonton sepakbola seminggu sekali yaitu 52.9% kemudian dua minggu sekali 30.1%, sebulan sekali 9.6%, setiap dua bulan 5.1%, setiap enam bulan 2.2%, setahun sekali dan tidak pernah yaitu 0%.

Tabel 4.15 : Presentase Frekuensi Responden Menonton Sepak Bola

Frekuensi Menonton	Frequency	Percent
Seminggu sekali	72	52,9
Dua minggu sekali	41	30,1
Sebulan sekali	13	9,6
Setiap dua bulan	7	5,1

Setiap enam bulan	3	2,2
Setahun sekali	0	0
Tidak pernah	0	0
Total	136	100.0

Sumber : hasil olah data 2011

(9) Teman Menonton Responden

Berdasarkan tabel 4.16 terlihat bahwa dari 126 responden ada beberapa responden yang menonton sepakbola lebih dari satu pilihan, presentase secara umum menonton sepakbola bersama dengan rombongan suporter satu daerahnya sebesar 49.5%, bersama keluarga 13.1%, dengan beberapa suporter yang ditemui responden di stadion 11.9%, dengan satu sampai dengan dua orang teman sebesar 11.3%, dengan tetangga 6.5%, bersama teman kantor 4.8%, dan pergi menonton sendirian sebesar 3%.

Tabel 4.16 : Presentase Teman Menonton Responden

Teman Menonton	Frequency	Percent
Keluarga	22	13,1
Dengan 1 s/d 2 orang teman	19	11,3
Tetangga	11	6,5
Teman kantor	8	4,8
Dengan beberapa suporter yang saya temui di station	20	11,9
Dengan rombongan suporter dari daerah saya	83	49,4
Sendirian	5	3,0
Total	168	100,0

Sumber : hasil olah data 2011

(10) Alasan Responden Menonton Sepakbola

Berdasarkan tabel 4.17 terlihat bahwa dari 126 responden, presentase alasan responden menonton pertandingan sepakbola dengan rincian alasan tertinggi yaitu untuk melihat tim atau kesebelasan favorit saya dengan 73%, alasan melihat pertandingan kesebelasan yang baik 14.9%, alasan sekedar untuk bersenang-senang 6.8%, alasan menemui teman yang

ada di stadion 2.7%, alasan karena responden olahragawan 2% dan alasan menonton yang sudah direncanakan dengan keluarga untuk menonton bersama-sama sebesar 0% atau tidak ada.

Tabel 4.17: Presentase Alasan Responden Menonton Sepakbola

Alasan Menonton	Frequency	Percent
Sekedar untuk bersenang-senang	10	6,8%
Menemui teman yang ada di stadion	4	2,7%
Melihat pertandingan kesebelasan yang baik	22	14,9%
Untuk melihat tim / kesebelasan favorit saya	108	73,0%
Karena saya olahragawan	3	2,0%
Saya sudah merencanakan dengan keluarga untuk nonton pertandingan bersama-sama	1	,7%
Karena tidak ada kegiatan dirumah	10	0
Total	4	100.0

Sumber : hasil olah data 2011

(11) Tindakan Yang Dilakukan Responden Saat Pertandingan Berlangsung

Berdasarkan tabel 4.18 terlihat bahwa dari 126 responden, presentase tindakan yang responden lakukan pada saat pertandingan sepakbola berlangsung bervariasi dan ada beberapa responden yang menjawab lebih dari satu, presentase yang responden lakukan yaitu mengepalkan tangan ke atas untuk memberi semangat sebesar 42.5%, meneriakkan slogan sebesar 30.6%, berbicara sebesar 11.8%, hanya diam dan menonton saja sebesar 6.5%, mengomentari pemain lawan sebesar 7%, mengomentari suporter lawan sebesar 2.7%, dan mengomentari wasit sebesar 2.2%.

Tabel 4.18 : Presentase Tindakan Yang Dilakukan Responden Saat Pertandingan Berlangsung

Tindakan	Frequency	Percent
Berbicara	22	11,8%
Mengepalkan tangan ke atas untuk memberi semangat	79	42,5%
Meneriakkan slogan	57	30,6%

Mengomentari pemain lawan	7	3,8%
Mengomentari wasit	4	2,2%
Mengomentari suporter lawan	5	2,7%
Hanya menonton saja	12	6,5%
Total	186	100,0%

Sumber : hasil olah data 2011

(12) Tindakan Suporter Yang Dilihat Responden Pada Saat Terjadi Tindakan Menyimpang

Berdasarkan tabel 4.19 terlihat bahwa dari 126 responden ada beberapa responden yang menjawab lebih dari satu jawaban, presentase tindakan suporter yang dilihat responden pada saat terjadi tindakan menyimpang yaitu dengan dominant mereka diam saja sebesar 47.5%, menyerukan kata-kata kotor 15.8%, penghinaan berbau sara sebesar 12.5%, melempar benda-benda sekitar sebesar 10.5%, melakukan perbuatan mendorong suporter lain 7.9%, melempar koin dan melakukan pemukulan sebesar 2.6%, serta melempar tempat duduk

Tabel 4.19 : Presentase Tindakan Suporter Yang Dilihat Responden Pada Saat Terjadi Tindakan Menyimpang

Tindakan	Frequency	Percent
Diam saja	72	47,4
Menyerukan kata-kata kasar	24	15,8
Melempar koin	4	2,6
Mendorong	12	7,9
Melempar tempat duduk	1	0,7
Melempar benda-benda sekitar	16	10,5
Memukul	4	2,6
Penghinaan yang berbau SARA	19	12,5
Total	152	100,0

Sumber : hasil olah data 2011

4.3 Pembahasan

Mengacu pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Maka dalam penjabaran hasil penelitian dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu analisis data yang membahas pada pendekatan kuantitatif, dan pembahasan model teoritik dengan realita di lapangan.

4.3.1 Hasil Analisis Data

Penjabaran analisis data ini dalam komposisi pendekatan kuantitatif, uraian hasil pengolahan dan analisis data dari masukan yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner. Penjabaran dan analisis meliputi penggunaan *Factor Analysis* (FA) dan *Structural Equation Modeling* (SEM) dalam pengolahan data dan terdiri atas analisis model pengukuran dan struktural, serta pembahasan hasil uji hipotesis.

4.3.1.1 Pengujian Validasi dan Reabilitas

Sebelum membahas analisis tersebut di atas, sebelumnya dilakukan uji validitas dan reabilitas terhadap kuesioner yang diberikan terhadap 130 responden. Namun setelah dilakukan pengecekan data 4 dari 130 responden dinyatakan gugur karena responden tidak melakukan pengisian dengan lengkap, sehingga sisa data kuesioner yang bisa diolah hanya 126 responden. Kemudian hasil jawaban kuesioner tersebut diolah secara sederhana dengan memasukan data pada program *SPSS 18.0 for windows*.

Untuk mengetahui tingkat validitas yakni dengan membandingkan angka *corrected item total correlation* yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item (nilai r hitung) dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel atau r hitung $>$ r tabel, maka item tersebut adalah valid. Nilai r tabel pada tingkat signifikansi 5 % dengan jumlah responden (n) 126 adalah 0,176.

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas yakni menentukan kestabilan serta konsistensi alat ukur yang digunakan. *Coefficient Cronbach's Alpha* sangat umum digunakan untuk menguji reliabilitas suatu alat ukur dan metode *alpha Cronbach* diukur berdasarkan skala

alpha Cronbach 0 sampai 1, sekecil apapun angka dalam skala ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan (Triton, 2006).

Jika skala itu itu dikelompok ke dalam lima kelas dengan reng yang sama, maka ukuran kemantapan *alpha* dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- (1) Nilai *alpha Cronbach* 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang *reliable*
- (2) Nilai *alpha Cronbach* 0,21 s.d. 0,40, berarti agak *reliable*
- (3) Nilai *alpha Cronbach* 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup *reliable*
- (4) Nilai *alpha Cronbach* 0,61 s.d. 0,80, berarti *reliable*
- (5) Nilai *alpha Cronbach* 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat *reliable* (Triton, 2006)

Pada langkah awal dilakukan pengukuran validitas dan reabilitas instrumen, dengan menggunakan SPSS. Pada keseluruhan instrumen dinyatakan valid karena seluruh instrumen mempunyai *r* hitung antara 0.285-0.658, sehingga jumlah di atas atau >0.176 yang dinyatakan valid. Untuk hasil uji reabilitas pada instrumen sebagai berikut :

Tabel 4.20 : Uji Reabilitas Instrumen Tindakan Kolektif

Item Pertanyaan	<i>Cronobach Alpha</i>	N of items	Keputusan
<i>Struktural Condisiveness</i>	0.814	12	Sangat Reliable
<i>Structural Strain</i>	0.678	5	Cukup Reliable
<i>Growth and Spread of Generalized Belief</i>	0.622	4	Cukup Reliable
<i>Precipitating Factors</i>	0.483	3	Cukup Reliable
<i>Mobilization of Participants for Action</i>	0.770	5	Cukup Reliable
<i>The Operation of Control Social</i>	0.684	3	Cukup Reliable

Sumber: hasil olah data 2011

Dalam pembahasan analisis dalam penelitian ini harus menghubungkan beberapa dimensi untuk mengukur dan mengetahui hubungan masing-masing dimensi. Hal tersebut senada

dengan pendapat Anderson, Gerbing, dan Hunter (1987), bahwa mendokumentasikan unidimensionalitas pengukuran, suatu kerja penting dalam teori testing dan riset pengembangan. Peran dari unidimensi yaitu menunjukkan adanya satu ciri yang melandasi sekelompok skala ukuran. Pendekatan teori klasik dengan reliabilitas *Cronbach-alpha* tidak mengukur unidimensi, tetapi hanya mengasumsikan unidimensi telah ada saat dihitung. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dalam penelitian ini digunakan analisis faktor. Analisis faktor digunakan untuk mengecek unidimensi serta memastikan setiap item pada model pengukuran yang sama (Anderson, Gerbing, dan Hunter :1987).

Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau item-item yang merupakan penjabaran dari indikator yang telah ditentukan. Berdasarkan tingkat signifikan data dalam dimensi, suatu data tersebut dikatakan signifikan apabila RMSEA lebih kecil dari 0.08, t-value lebih besar daripada 1.96 dan standardaliesed harus di atas 0.3) (Anderson, Gerbing, dan Hunter :1987).

Perincian hasil analisis faktor konfirmatori terhadap masing-masing dimensi menggunakan Lisrel, sebagai berikut :

Tabel 4.21 : Item-item dimensi Tindakan Kolektif

First Order Confirmatory Factor Analysis

Variable	Estimate (Koefisien [^])	Standardized Coefficient	T-value	Keterangan
<i>Structural Condisivennes</i>				
Fanatisme				
1 H1	1.00	0.64	Fixed	Siknifikan
2 H2	0.89	0.77	4.41	Siknifikan
3 H3	1.09	0.78	6.64	Siknifikan
4 H4	1.50	0.98	4.39	Siknifikan
5 H5	1.06	0.71	7.24	Siknifikan
Ekologi				
6 H6	1.19	0.94	Fixed	Siknifikan
7 H7	0.92	0.72	7.46	Siknifikan
8 H8	0.79	0.74	6.20	Siknifikan
9 H9	0.57	0.56	3.82	Siknifikan

10	H10	0.51	0.28	3.07	Tidak Siknifikan
11	H11	0.57	0.31	3.22	Siknifikan

Structural Strain

1	H13	0.70	0.46	3.82	Siknifikan
2	H14	1.18	0.74	8.10	Siknifikan
3	H15	1.05	0.67	4.35	Siknifikan
4	H17	0.74	0.47	4.68	Siknifikan

Growth and Spread of Generalized Belief

1	H18	1.00	0.69	Fixed	Siknifikan
2	H19	1.27	0.94	9.48	Siknifikan
3	H20	0.50	0.31	2.83	Siknifikan
4	H21	0.30	0.32	2.65	Siknifikan

Precipitating Factors

1	H22	0.70	0.46	3.82	Siknifikan
2	H23	1.18	0.74	8.10	Siknifikan
3	H24	1.05	0.67	4.35	Siknifikan

Mobilization of Participants for Action

1	H25	1.00	0.48	Fixed	Siknifikan
2	H26	0.57	0.28	3.55	Tidak Siknifikan
3	H27	2.08	0.90	5.53	Siknifikan
4	H28	2.11	0.91	5.70	Siknifikan
5	H29	0.90	0.38	4.02	Siknifikan

The Operation of Control Social

1	H30	1.00	0.97	fixed	Siknifikan
2	H31	0.65	0.56	6.04	Siknifikan
3	H32	0.40	0.45	3.41	Siknifikan

Sumber: hasil olah data 2011

Menggunakan analisis faktor konfirmatori diperoleh 11 (sebelas) item meliputi indikator Fanatik (H1, H2, H3, H4, H5) dan Ekologi (H6, H7, H8, H9, H10, H11) benar-benar mengukur konstruk *Structural Condisiveness* dan model fit terhadap data (Chi-Square=63.46, df=35, p-value=0.16, RMSEA=0.043), dan ke 11 (sebelas) indikator tersebut mempunyai bobot yang bermakna dalam mengukur konstruk *Structural Condisiveness* (koefisien λ , Standardized coeficient, dan t-value) tabel 5.12. Sedangkan item H12 dihilangkan sebagai indikator, karena kurang bermakna sumbangannya mengukur konstruk *Structural Condisiveness* ($t < 2$).

Menggunakan analisis faktor konfirmatori diperoleh 4 (empat) item (H13, H14, H15, dan H16) yang benar-benar mengukur konstruk *Structural Strain* terhadap data $n=126$ (Chi-Square=2.23, $df=2$, P-value=0.32760, RMSEA=0.000), dan ke-4 (empat) indikator tersebut mempunyai bobot yang bermakna dalam mengukur konstruk *Structural Strain*.

Menggunakan analisis faktor diperoleh 4 (empat) item (H18, H19, H20, dan H21) benar-benar mengukur konstruk *Growth and Spread of Genralized Belief* terhadap data $n=126$ (Chi-Square=3.63, $df=3$, P-value=0.30416, RMSEA=0.000), dan ke-4 (empat) indikator tersebut mempunyai bobot yang bermakna dalam mengukur konstruk *Growth and Spread of Genralized Belief*.

Menggunakan analisis faktor konfirmatori diperoleh 3 (tiga) item (H22, H23, dan H24) yang benar-benar mengukur konstruk *Precipiting Factors* terhadap data $n=126$ (Chi-Square=0.72, $df=1$, P-value=0.39754, RMSEA=0.000), dan ke-3 (tiga) indikator tersebut mempunyai bobot yang bermakna dalam mengukur konstruk *Precipiting Factors*.

Menggunakan analisis faktor konfirmatori diperoleh 5 (lima) item meliputi *Mobilization of Participants for Action* (H25, H26, H27, H28, dan H29) benar-benar mengukur konstruk *Mobilization of Participants for Action* dan model fit terhadap data (Chi-Square=8.88, $df=4$, p-value=0.06415, RMSEA=0.084), dan ke 5 (lima) indikator tersebut mempunyai bobot yang bermakna dalam mengukur konstruk *Mobilization of Participants for Action*.

Menggunakan analisis faktor konfirmatori diperoleh 3 (tiga) item (H22, H23, dan H24) yang benar-benar mengukur konstruk *The Operation of Control Social* terhadap data $n=126$ (Chi-Square=0.11, $df=1$, P-value=0.74227, RMSEA=0.000), dan ke-3 (tiga) indikator tersebut mempunyai bobot yang bermakna dalam mengukur konstruk *The Operation of Control Social*.

4.3.1.2 Uji Kecocokan

Analisis data menggunakan *Measurement Model Structural* (SEM) ditujukan untuk melakukan estimasi parameter-parameter dari model penelitian dalam rangka menguji hipotesis-hipotesis penelitian. Model penelitian yang ada dianalisis dan diuji melalui evaluasi tingkat kecocokan data dengan model dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain :

- (1) Kecocokan keseluruhan model (*overall model fit*).
- (2) Kecocokan model pengukuran (*measurement model fit*).
- (3) Kecocokan model struktural (*structural model fit*) (Hair et.al dalam Damayanti, 2011).

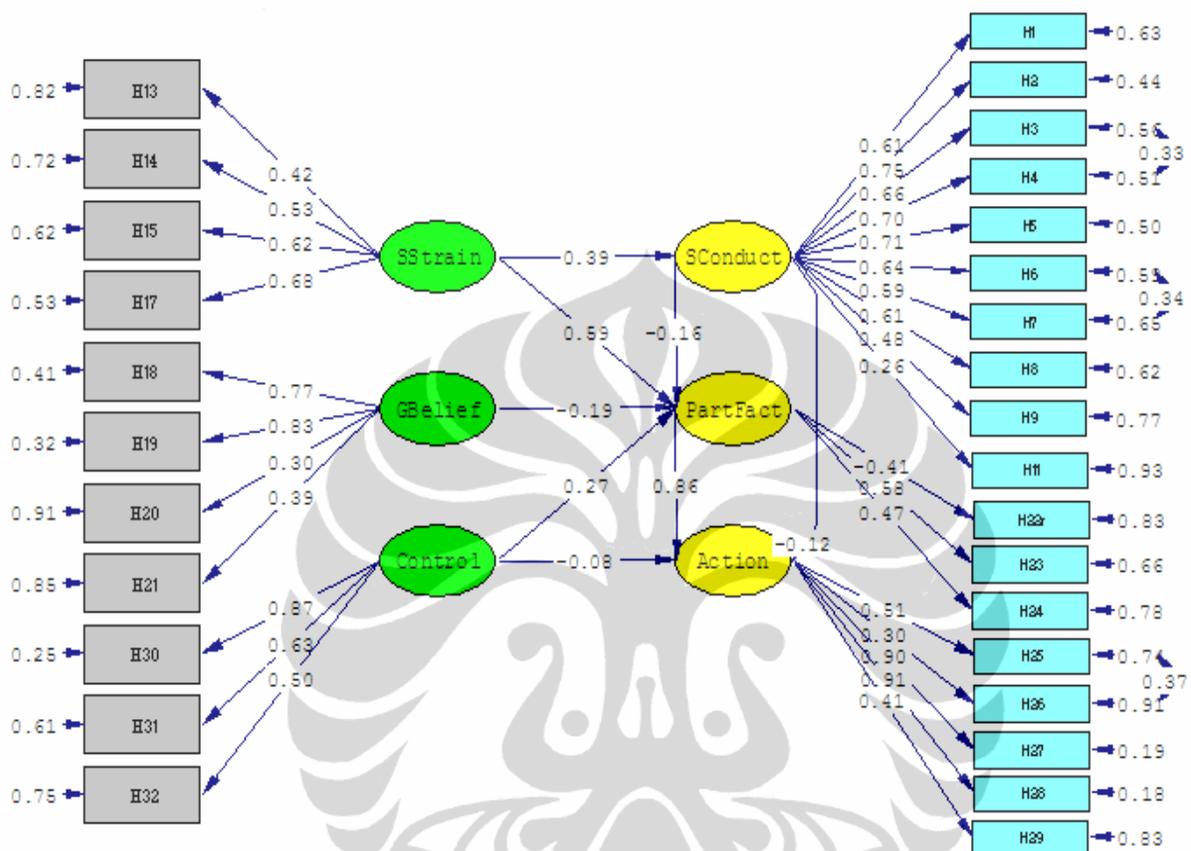
Tahap pertama dari uji kecocokan keseluruhan model ini diperuntukkan dalam mengevaluasi derajat kecocokan secara umum atau *Goodness of Fit Index* (GFI) antara hasil olah data dan model yang diterapkan. Model dan data secara keseluruhan dikatakan baik apabila nilai derajat kecocokan secara umum atau *Goodness of Fit Index* (GFI) lebih besar 9 ($GFI > 9$).

Tahap kedua dari uji kecocokan model pengukuran, maksudnya adalah melakukan pengujian validitas terhadap dimensi dan indikator. Namun penerapan evaluasi validitas dan reabilitas diterapkan melalui hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel teramati atau indikator secara terpisah. Suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap konstruk atau variabel lainnya jika t muatan faktornya (*factor loadings*) lebih besar dari nilai kritis (>1.96 atau dibulatkan menjadi ≥ 2).

Kemudian dari uji kecocokan model struktural untuk menganalisis hubungan antara semua variabel laten penelitian utama yang membentuk hipotesis-hipotesis penelitian yang telah disederhanakan.

Berikut ini adalah hasil pengujian model struktural hipotesis.

(a) Uji Model 1



Gambar 4.3

Hasil Modifikasi Model Hipotesa Penerapan Teori Smelser

Hasil uji kecocokan untuk model struktural keseluruhan, model hipotesis telah memenuhi persyaratan, yaitu $p\text{-value}=0,00$ GFI (Goodness of Fit Index)=0.73, serta RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)=0.067 ini berarti model telah sesuai (fit) untuk menjelaskan model struktural dinyatakan sesuai dengan data penelitian dan besarnya 73%.

Tabel 4.22 : Nilai -t dan Koefisien Persamaan Struktural Pada Model Struktural

Lintasan (Path)	Standardized Loading Factor	T-value	Keterangan
<i>Structural Strain</i> → <i>Structural Conduvisiveness</i>	0.39	2.57	Signifikan
<i>Structural Strain</i> → <i>Precipitating Factors</i>	0.59	2.06	Signifikan
<i>Growth and Spread of Generalized Belief</i> → <i>Precipitating Factors</i>	-0.19	-0.90	Tidak Signifikan
<i>The Operation of Control Social</i> → <i>Precipitating Factors</i>	0.27	1.25	Tidak Signifikan
<i>The Operation of Control Social</i> → <i>Mobilization of Participants for Action</i>	-0.08	-0.41	Tidak Signifikan
<i>Structural Conduvisiveness</i> → <i>Precipitating Factors</i>	-0.16	-1.25	Tidak Signifikan
<i>Structural Conduvisiveness</i> → <i>Mobilization of Participants for Action</i>	-0.12	-1.27	Tidak Signifikan
<i>Precipitating Factors</i> → <i>Mobilization of Participants for Action</i>	0.86	2.57	Signifikan

Sumber: hasil olah data 2011

Pada tabel 4.32 di atas menunjukkan bahwa beberapa indikator model tersebut menghasilkan *Standardized Loading Factor* lebih dari 0.3 atau >0.3 dan t-value beberapa indikator memenuhi persyaratan dengan nilai di atas >1.96 atau dibulatkan lebih besar sama dengan 2. Beberapa indikator model yang memenuhi syarat atau signifikan yaitu *Structural Strain* ke *Structural Conduvisiveness*, *Structural Strain* ke *Precipitating Factors*, dan *Precipitating Factors* ke *Mobilization of Participants for Action*.

Model teoritik dari *Structural Conduciveness*, *Structural Strain*, *Growth and Spread of Generalized Belief*, *Precipitating Factors*, *Mobilization of Participants for Action*, dan *The Operation of Control Social* setelah melewati dari beberapa modifikasi untuk mendapatkan kesesuaian (*fit*), maka *Structural Strain* (x1), *Growth and Spread of Generalized Belief* (x2), *The Operation of Control Social* (x3) merupakan faktor pencetus atau penyebab dan mempengaruhi serta mengakibatkan tahapan faktor lainnya, yaitu *Structural Conduciveness* (y1), *Precipitating Factors* (y2), dan *Mobilization of Participants for Action* (y3).

Sehingga model teoritik tersebut untuk menjelaskan bahwa :

- (1) *Structural Strain* atau tipe ketegangan ini sangat mempengaruhi terjadinya beberapa faktor dalam tahapan terjadinya suatu tindak kekerasan oleh suporter Jakmania (*Mobilization of Participants for Action*), sehingga dapat dikatakan bahwa *Structural Strain* merupakan gejala awal mulanya atau sebagai faktor penyebab. Gejala ini ditandai dengan adanya pola ketegangan hubungan antara suporter Persija yaitu Jakmania dan suporter tim kesebelasan lawan. Hasil penelitian di atas berbeda dengan pendapat Smelser (1962) yang menyatakan, bahwa *Structural Conduciveness* merupakan faktor penyebab atau gejala awal terjadinya situasi *Structural Conduciveness* yang terjadinya tingkah laku kolektif pada umumnya. Secara rinci situasi *Structural Strain* apabila tidak ditangani secara baik akan langsung meningkat pada situasi *Precipitating Factors* atau faktor-faktor pencetus yang mempunyai potensi besar terjadinya tindakan kolektif. Sehingga *Precipitating Factors* atau faktor-faktor pencetus yang terjadi pada kerumunan suporter Jakmania akibat dari pola ketegangan struktural yang terjadi baik karena kondisi rasa kebosanan suporter dan hasil pertandingan akibat dari *Struktural Strain*.. Sedangkan situasi munculnya faktor-faktor pencetus ini ditandai para Jakmania sudah bertemu secara langsung atau tidak langsung dengan suporter tim kesebelasan lawan di lapangan, kemudian dipicu akibat adanya tindakan putusan wasit yang kontroversial merugikan tim Persija, seperti dianulirnya “gol” yang masuk dari tim lawan. Situasi demikian yang memicu para suporter turun kelapangan sebagai

ekspresi pelampiasan kemarahan atas putusan wasit. Pada saat suporter turun lapangan, pada saat itu pula para suporter Jakmania juga siap melakukan perlawanan dengan suporter lawan.

Kemudian secara rinci setelah tahap *Precipitating Factors* akan meningkat pada situasi *Mobilization of Participants for Action* atau mobilitas para pemeran serta pada tindakan, pada tahap ini terjadinya suatu tindakan kolektif yang dilakukan oleh Jakmania terkait dengan bentuk tindakan kekerasannya. Tindakan kolektif para suporter Jakmania dalam bentuk kekerasan akan lebih efektif apabila didorong oleh para koordinator lapangan, hal ini sependapat dengan apa yang dikemukakan Smelser (1962).

Pada situasi timbulnya suatu tindakan kolektif dalam bentuk kekerasan oleh para suporter Jakmania dilatarbelakangi oleh pelampiasan rasa kekecewaan yang diawali dengan tindakan tertentu yang dilakukan koordinator atau oknum yang mengawali, dan pada saat itu pula para suporter lainnya mengikutinya. Tindakan pelampiasan para suporter ini dilakukan pada saat pertandingan berlangsung maupun se usai pertandingan, menurut tempatnya antara lain : pertama, yang terjadi di dalam dan di sekitar stadion. Tindakan amuk suporter tersebut, yaitu berupa pengerusakan spanduk suporter, pembatas lapangan, fasilitas stadion, perkelahian dan lain sebagainya. Dan kedua, yang terjadi di jalan raya pada saat suporter kembali dilakukan dengan mengendarai dan atau menumpang kendaraan secara ugal-ugalan, sehingga membuat pengguna jalan lainnya resah. Tidak jarang jika terjadi kerusuhan para suporter Jakmania berkumpul dengan tim suporternya untuk mempertahankan diri (menjaga keselamatan) dengan menggunakan peralatan yang ada.

Namun kondisi tersebut di atas tidak terjadi, apabila pada situasi *Structural Strain* berkembangnya menjadi *Structural Conduiveness* yang ditandai dengan kepanikan-kepanikan maka justru tidak akan berpeluang terhadap terjadinya tindak kolektif oleh Jakmania.

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

- a. Situasi *Structural Strain* yang terjadi suporter Jakmania merupakan titik awal penyebab terjadinya tingkah laku kolektif oleh suporter Jakmania.
- b. Gejala yang muncul pada situasi *Structural Strain* ini indikasi awal yang cukup

- mempunyai kompetensi terjadinya tindakan kolektif. ditandai para Jakmania sudah bertemu secara langsung atau tidak langsung dengan suporter tim kesebelasan lawan di lapangan, kemudian dipicu akibat adanya tindakan putusan wasit yang kontroversial merugikan tim Persija, seperti dianulirnya “gol” yang masuk dari tim lawan. Situasi demikian yang memicu para suporter turun kelapangan sebagai ekspresi pelampiasan kemarahan atas putusan wasit.
- c. Proses terjadinya tindak kekerasan oleh Jakmania diawali gejala situasi *Structural Strain* berkembang *Precipitating Factors* kemudian muncul tindakan nyata tindakan kekerasan situasi *Mobilization of Participants for Action*. Proses ini berbeda dengan pendapat Smelser (1962) mengenai proses tindakan kolektif.
 - d. Gejala *Structural Strain* tidak akan menjadi suatu tindakan kekerasan oleh Jakmania, apabila situasi berkembang menjadi suatu *Structural Conduciveness*.
- (2) Pada situasi *Growth and Spread of Generalized Belief* atau menyebarnya suatu kepercayaan ini menurut hasil olah model di atas justru tidak mempengaruhi atau tidak berkompetensi terhadap terjadinya tindakan kekerasan oleh Jakmania. Secara rinci situasi *Growth and Spread of Generalized Belief* tidak mempengaruhi atau tidak berlaku proses terjadinya tindak kekerasan oleh Jakmania. Hal ini berbeda dengan pendapat Smelser (1962), bahwa suatu tindakan kolektif dipengaruhi oleh suatu situasi *Growth and Spread of Generalized Belief* yang muncul suatu kepercayaan bersama dalam melakukan suatu tindakan kolektif.
- (3) *The Operation of Control Social* atau bekerjanya pengendalian sosial merupakan juga faktor penentu dalam proses terjadinya tindakan kolektif oleh suporter Jakmania (Smelser, 1962). Pengendali sosial itu meliputi aparat kepolisian dibantu oleh pihak koordinator lapangan maupun pengurus Jakmania. Sehingga penyelesaian konflik yang terjadi pada waktu sebelum sampai dengan saat pertandingan usai menjadi tanggungjawab aparat kepolisian dan koordinator lapangan. Secara rinci para suporter sepakbola dan masyarakat secara umum beranggapan, bahwa kepolisian dinilai belum maksimal dalam menanggulangi terjadinya tindakan kekerasan oleh Jakmania sebelum nyata terjadi tindak kekerasan tersebut atau

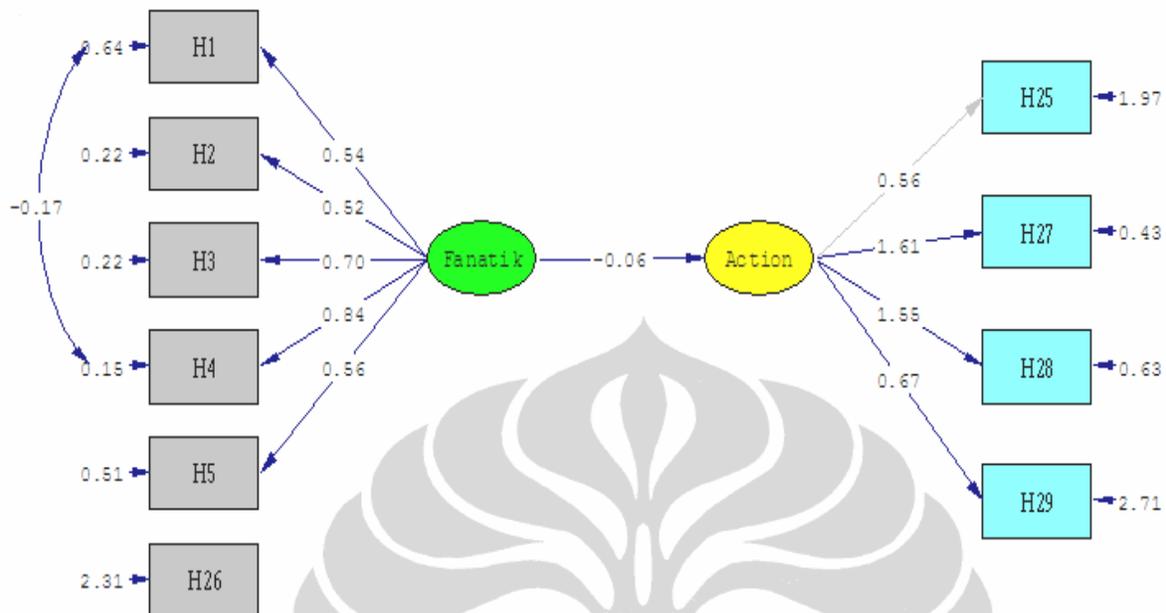
Precipitating Factors dan saat terjadinya tindak kekerasan.

Maka dapat disimpulkan, bahwa belum maksimalnya penanggulangan ini disebabkan kepolisian selaku penanggung jawab kamtibmas serta penegak hukum belum secara maksimal melibatkan peran serta koordinator lapangan dan atau kepengurusan Jakmania (Pam Swakarsa).

Kesimpulan di atas mengandung arti bahwa :

- (1) Penyebab awal terjadinya tingkah laku kolektif oleh suporter Jakmania adalah adanya *Structural Strain* atau tipe ketegangan.
- (2) Proses nyata terjadinya tindakan kolektif berupa tindak kekerasan oleh Jakmania lebih cepat atau rentan terjadi, karena tanpa adanya pendorong struktural atau *structural condusiveness*, dan situasi tumbuh dan berkembang kepercayaan atau *Growth and Spread of Generalized Belief* tetap mempunyai berpotensi besar terjadi. Kemudian bekerjanya pengendalian sosial atau *the operation of social control* belum optimal sehingga tindakan kekerasan oleh Jakmania masih terjadi. Hal ini terjadi perbedaan dengan apa yang dikemukakan Smelser (1962) mengenai proses tahapan *collective behaviour*.
- (3) Gejala *Structural Strain* tidak akan menjadi suatu tindakan kekerasan oleh Jakmania, apabila situasi berkembang menjadi suatu *Structural Condusiveness*.
- (4) Pada situasi mulai muncul faktor-faktor pencetus atau *Precipitating Factors* memerlukan perhatian khusus, apabila muncul faktor pencetus maka sangat besar berpeluang terjadinya tindak kekerasan .
- (5) Tingkat kepercayaan masyarakat khususnya suporter Jakmania terhadap kepolisian dalam menangani kerusuhan sepakbola sangat rendah.
- (6) Belum adanya peran fungsi kepengurusan Jakmania dalam mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

(b) Uji Model 2



Gambar 4.4

Hasil Modifikasi Model Hipotesa Fanatik to MPA

Hasil uji kecocokan untuk model struktural keseluruhan, model hipotesis telah memenuhi persyaratan, yaitu $p\text{-value}=0.064$, GFI (Goodness of Fit Index) $=0.91$, serta RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) $=0.057$ ini berarti model telah sesuai (fit) untuk menjelaskan model struktural dinyatakan sesuai dengan data penelitian dan besarnya 91%.

Tabel 4.23 : Nilai $-t$ dan Koefisien Persamaan Struktural Pada Model Struktural

Lintasan (Path)	Standardized Loading Factor	T-value	Keterangan
Fanatik \rightarrow <i>Mobilization of Participants for Action</i>	0.06	0.74	Tidak Signifikan

Sumber: Data penelitian

Pada tabel 4.33 di atas menunjukkan bahwa semua indikator model tersebut menghasilkan *Standardized Loading Factor* sebesar 0.06 yang berarti tidak signifikan sesuai standarnya kurang dari 0.3 atau <0.3 , walaupun T-value lebih dari 0.5.

Model teoritik dari hubungan Fanatik dengan *Mobilization of Participants for Action* (MPA) ini menjelaskan, bahwa hubungan antara fanatisme dalam mendukung tim kesebelasan Persija yang dimiliki masing-masing individu suporter Jakmania dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suporter Jakmania yaitu kurang memberi sumbangan atau sangat kurang sekali pengaruhnya.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa sikap fanatisme para suporter Jakmania adalah hal yang wajar dan bukanlah sesuatu yang mempunyai potensi besar akan mengakibatkan suatu tindakan menyimpang yang mengganggu kamtibmas, dengan kata lain sikap fanatisme merupakan hal yang sah-sah saja.

4.3.2 Pembahasan Model Teoritik Dengan Realita di Lapangan

4.3.2.1 Faktor Determinan Terjadinya Tindak Kekerasan Suporter Jakmania

Dari hasil uji model 1 (satu) terlihat bahwa penyebab utama terjadinya tingkah laku kolektif oleh suporter Jakmania adalah adanya gejala situasi *Structural Strain* atau tipe ketegangan. Keadaan ini dilandasi ketegangan hubungan antara suporter Jakmania dan suporter tim lain, situasi kerawanan pola hubungan antar suporter ini dimulai pada titik awal keberangkatan menuju stadion sampai dengan selesai pertandingan atau sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing dan pada saat pertandingan sepakbola berlangsung.

Berkumpulnya para suporter ini menjadi suatu situasi yang perlu diperhatikan oleh aparat kepolisian, seperti apa yang dikatakan Le Bon (1895) dengan berkumpulnya para suporter Jakmania mengakibatkan mereka berfikir irrasional, yang mengakibatkan para suporter mudah terpengaruh sikapnya terkait situasi yang terjadi.

Situasi seperti di atas dikatakan sebagai suatu ancaman faktual (AF) bagi aparat keamanan, dan apabila tidak segera diantisipasi, maka akan mengakibatkan peluang yang besar terjadinya tindak kekerasan. Hal senada dikatakan oleh Novian Pratama, Hinca Pandjaitan, dan Harry Sulistiadi sebagai berikut :

Novian Pratama (Personil Biro Psikologi Mabes Polri) menyampaikan :

“...kerawanan awalnya muncul pada saat para suporter berkumpul pada titik-titik tertentu seperti di persimpangan jalan menuju ke stadion, situasi ini sebagai ancaman faktual. Karena apabila mereka sudah berkumpul rasa kebersamaan akan muncul, sehingga sangat mudah terpengaruh untuk ikut melakukan sesuatu sebagai wujud kebersamaan Jakmania. Untuk mengantisipasi maka biasanya ada pihak kepolisian Mas, mereka melakukan pengawalan dalam bahasa polisi dengan sandi 91 rombongan atau iring-iringan suporter sepakbola yang akan menuju Gelora Bung Karno.”

Hinca Pandjaitan (Pengurus PSSI dan Pengamat Sepakbola) menyampaikan :

“Menurut kami, bahwa meluruskan pengertian suporter, suporter menurut kami adalah orang yang duduk menonton pertandingan sepakbola dengan membayar karcis, sehingga orang diluar stadion sesuai kriteria tersebut bukanlah suporter, melainkan sebuah kerumunan. Dan kerumunan menurut kami sangat rentan terhadap keributan dan kerusuhan daripada suporter.....awal dari permasalahan ini rata-rata terjadi apabila mereka sudah berkumpul, mereka lebih berani keroyokan daripada sendiri-sendiri.”

Harry Sulistiadi (Bag Opsnal Itwasda Polda Metro Jaya) menyampaikan :

“Saat mereka berkumpul di titik-titik wilayah tertentu sudah merupakan ancaman gangguan kamtibmas terutama lalulintas, lihat saja kadang mereka membuat lalulintas macet sampai dengan saat berlangsung pertandingan dan seiasi pertandingan terkadang juga mereka terlibat perkelahian. Saya sependapat dengan rusuh massa seperti yang dilakukan oleh komunitas Jakmania yang memiliki sifat seponatan, cepat dan tiba-tiba, dan saya juga memiliki pengalaman mengenai penanganan massa.”

Secara rinci bekumpulnya para suporter Jakmania merupakan awal gejala akan terjadinya tindak kekerasan, dan peluang terjadinya tindak kekerasan lebih besar dan cepat, karena tanpa adanya pendorong struktural atau *structural condusiveness*, dan situasi tumbuh dan berkembang kepercayaan atau *Growth and Spread of Generalized Belief* tindak kekerasan tetap terjadi, serta ditambah dengan bekerjanya pengendalian sosial atau *the operation of social control* belum optimal. Sehingga proses nyata dari berkumpulnya para suporter Jakmania sampai dengan terjadinya tindakan kolektif berupa tindak kekerasan

mempunyai frekuensi lebih cepat dan sangat rentan terjadi daripada yang dikemukakan Smelser (1962).

Secara rinci pendapat beberapa pihak dan khususnya pihak kepolisian berpendapat, bahwa ancaman *factual* (AF) akibat hadirnya para Jakmania diawali pada saat massa atau para Jakmania berkumpul di suatu titik. Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian pergerakan anggota kepolisian yang melakukan pengamanan tidak diatur menurut situasi dan kondisi akibat kehadiran Jakmania, maka terkesan pergeseran anggota sangat kurang tepat dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap fisik dan psikis anggota dilapangan yang jenuh dan capek saat melakukan pengamanan disebabkan waktu yang relatif lama. Menurut peneliti dengan melihat hasil penelitian pada model uji pertama situasi *structural condusiveness* dikategorikan pada *police hazard* (PH), karena pada situasi ini para Jakmania hanya berkumpul dan kemungkinan besar tidak akan terjadi tindak kekerasan kolektif.

Secara rinci menurut persepsi para suporter, bahwa tindak kekerasan oleh suporter Jakmania masih terjadi disebabkan pihak aparat kepolisian kurang dapat mengantisipasi terhadap setiap gejala situasi serta kondisi yang muncul, dan tidak adanya keterlibatan kepengurusan Jakmania dalam mengendalikan anggotanya.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan, bahwa potensi terjadinya tindak kekerasan oleh suporter Jakmania pada saat ini masih besar dan frekuensi proses terjadinya lebih cepat (dibandingkan dengan tindak kekerasan pada umumnya) dengan ditandai pada saat Jakmania berkumpulnya para suporter Jakmania dan terjadi situasi ketegangan hubungan antar suporter. Pergeseran anggota kepolisian dalam menangani suporter Jakmania belum berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi para suporter Jakmania di lapangan berkaitan analisa PH dan AF, sehingga berdampak pada fisik maupun psikis anggota di lapangan. Selain hal tersebut terlihat juga tindak kekerasan ini masih sering terjadi diakibatkan pihak kepolisian kurang mengantisipasi gejala awal yang terjadi, serta kepolisian belum memanfaatkan peranan kepengurusan Jakmania.

4.3.2.2 Hubungan Fanatisme Dengan Tindak Kekerasan

Hasil uji model 2 (dua) menunjukkan kuantitas resiko dampak sikap fanatik Jakmania terhadap tindak kekerasan yang dilakukan, yaitu sangat kecil sekali dan hampir tidak ada pengaruhnya. Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian terdahulu oleh Brown dan Ucu Kuspriadi. Brown (1998) dalam bukunya '*Fanatic! Power, Identity, & Social Fandom in Football*' yang meneliti suporter sepakbola di Eropa termasuk *Hooligan* di Inggris yang mengatakan, bahwa fanatik merupakan penyebab menguatnya perilaku kelompok suporter yang tidak jarang menimbulkan perilaku agresi. Sedangkan hasil tesis Ucu Kusprayadi (2008) yang menjelaskan, bahwa kerusuhan dan bentrokan yang terjadi pada umumnya didasari oleh adanya fanatisme yang berlebihan pada diri suporter sepakbola.

Sehingga dapat disimpulkan, sikap fanatik para suporter Jakmania kurang sekali berpengaruh terhadap tindakan kekerasan atau agresi, dari pada suporter *hooligan* yang mempunyai potensi lebih besar. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil pengujian dari data tindakan yang biasa dilakukan para suporter Jakmania, motivasi mereka awalnya menonton pertandingan sepakbola untuk mendukung Tim Persija, dan apabila terjadi tindakan menyimpang atau kerusuhan sepakbola awalnya hanya diam saja sebelum adanya pencetus.

Pernyataan di atas sedikit berbeda dari segi kuantitas, dengan pendapat Novian Pratama (Personil Biro Psikologi Mabes Polri), bahwa :

“Menurut saya sikap fanatik yang dimiliki oleh para suporter Jakmania ada peran walaupun sedikit terhadap terjadinya tindak kekerasan, selain itu suporter Jakmania rata-rata anak muda sampai anak-anak yang hanya ikut-ikutan serta mempunyai psikis yang masih labil atau mudah terpengaruh.....dan memang para aparat penegak hukum dan masyarakat menganggap fanatisme Jakmania identik dengan tindak kekerasan”

Secara rinci sikap fanatisme para suporter Jakmania mayoritas para remaja sampai dengan saat ini hanyalah sebatas ekspresi terhadap suatu keyakinan dan kegemaran pada tim kesebelasan Persija, para Jakmania juga kurang mengerti perannya sebagai suporter. Mereka juga mempunyai keyakinan, bahwa Persija adalah yang terbaik (apabila bertanding pasti akan menang) dan mereka mempunyai keinginan berusaha mendukung

tim Persija pada saat bertanding. Hal tersebut senada dengan pendapat Hinca Pandjaitan (Pengurus PSSI dan Pengamat Sepakbola), bahwa :

“...sikap fanatik yang dimiliki para suporter Jakmania ini hanyalah sebatas aktualisasi diri saja, coba lihat saja Mas mayoritas para Jakamia adalah anak muda dan bahkan ada anak-anak. Ini berbeda dengan para *holigan* di luar negeri seperti Belanda, para *holigan* rata-rata orang tua dan dewasa sehingga mereka mengerti betul peranan suporter sesuai dengan aturan FIFA, di mana dikatakan suporter apabila mereka sudah masuk di lapangan duduk di stadion dan membayar tiket.”

Maka sikap fanatik yang dimiliki para suporter Jakmania apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka menjadi hal yang positif. Karena pada dasarnya sikap fanatik umumnya adalah keyakinan tentang sesuatu yang positif dan atau negatif, hal ini dinilai akibat dari sikap fanatik tersebut (Mubarok, 2010). Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Harry Sulistiadi (Bag Opsnal Itwasda Polda Metro Jaya), bahwa :

“Saya sependapat Dik, bahwa sikap fanatik yang dimiliki para Jakmania awalnya adalah ekspresi saja. Namun akan menjadi suatu hal buruk atau berakibat menjadi gangguan kamtibmas apabila tidak ditangani secara dini oleh anggota kepolisian di lapangan. Seharusnya memang para anggota kepolisian di lapangan mempunyai persepsi, bahwa kehadiran suporter Jakmania bukanlah sebagai ancaman seperti anggapan mayoritas anggota yang salah, namun seharusnya sebagai mitra. Untuk mengelola sikap fanatik Jakmania, menurut saya dengan mengedepankan model Polmas.”

Secara rinci sikap fanatik suporter Jakmania mempunyai sifat yang sependapat dengan Mubarok (2010), bahwa fanatik merupakan suatu keyakinan pada pandangan tentang sesuatu yang mendalam sehingga susah diluruskan. Dan sikap fanatik sesuai pendapat Brown (1998), bahwa fanatisme merupakan ketidakmampuan mereka memahami masalah, mengerti faham atau filsafat selain yang mereka yakini itu adalah yang benar dan terbaik.

Secara rinci analisis tersebut di atas sekaligus meluruskan persepsi masyarakat dan penegak hukum selaku pelaksana dan pemelihara kamtibmas, bahwa sikap fanatisme masing-masing individu suporter Jakmania bukanlah hal yang harus dianggap suatu yang negatif atau identik sebagai ancaman gangguan kamtibmas.

Beberapa analisis di atas dapat disimpulkan, bahwa sikap fanatik para suporter Jakmania pada dasarnya hanya sebagai ungkapan ekspresi atas dukungan tim kesebelasan Persija secara umum, persepsi sebagian anggota kepolisian terhadap fanatisme Jakmania masih negatif, dan seharusnya pihak kepolisian sebagai salah satu unsur dalam mengarahkan dan membina para suporter Jakmania.

4.3.2.3 Penanggulangan Tindak Kekerasan Suporter Jakmania

Dalam menjalankan fungsi kepolisian yang salah satunya adalah menanggulangi tindak kekerasan kolektif yang dilakukan oleh suporter Jakmania, maka agar penanggulangan dapat dilakukan dengan maksimal kepolisian (sesuai dengan pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002) dibantu salah satunya adalah bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Berdasarkan fungsi kepolisian tersebut, uraian analisis penanggulangan tindak kekerasan kolektif ini, meliputi peranan kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Selatan dan Peranan Kepengurusan Jakmania.

Pihak Polres Metro Jakarta Selatan dalam mengantisipasi terjadinya suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh Jakmania membuat rencana pengamanan. Namun rencana pengamanan ini bersifat imbalan saja, dikarenakan mulai sekitar tahun 2010 pihak Polres Metro Jakarta Selatan tidak memberikan ijin Persija bertanding di Wilayah Jakarta Selatan kepada panitia pelaksana. Tidak diberikan ijin tersebut berdasarkan telahaan staf yang dikeluarkan pihak satuan Intelkam demi alasan keamanan, dan disarankan untuk menggunakan lapangan Gelora Bung Karno yang dianggap lebih memenuhi persyaratan dari segi keamanan dan ketertiban (terlampir salah satu surat jawaban tidak diberikan surat ijin atau rekomendasi). Sehingga pada jadwal pertandingan di Jakarta akhir-akhir ini yang melibatkan Persija hanya dipergunakan lapangan Gelora Bung Karno. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan, bahwa :

“Pada awalnya tim Persija diperbolehkan melakukan pertandingan di stadion Lebakbulus, namun karena alasan keamanan maka untuk sementara rekomendasi kami tidak dikeluarkan. Pertimbangannya adalah faktor stadion Lebakbulus yang relatif sempit dimungkinkan *over* kapasitas dari jumlah suporter yang hadir, mengganggu arus lalu lintas karena stadion hanya memiliki 2 (dua) pintu masuk dan keluar. Maka kami menganjurkan ke stadion Gelora Bung Karno dengan kapasitas lebih besar dan memenuhi standart keamanan Mas”

Apabila ada pertandingan sepakbola yang melibatkan Persija, pihak Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Pengamanan Polres Metro Jakarta Selatan melakukan tindakan pre-emptif dan preventif, bahkan represif. Tindakan pencegahan dilakukan dengan menyampaikan himbauan dengan pengeras suara, dan patroli ke beberapa titik kumpul massa suporter Jakmania. Kegiatan tersebut dilakukan pada titik rawan khususnya daerah simpang Permata Hijau sebagai titik kumpul bertemunya rombongan suporter Jakmania dari arah Lebah bulus, Pondok Cabe, Ciputat, dan Tangerang menuju ke Gelora Senayan Bung Karno, dan apabila diperlukan melakukan pengawalan rombongan para suporter Jakmania tersebut dan dilakukan razia-razia.

Pada keadaan tertentu di mana Persija melawan Persib (Bandung) maka personil yang dilibatkan akan ditambah lebih banyak lagi, sebab antara pendukung Persib dengan Persija selalu melakukan bentrok. Seperti yang dikemukakan personil Bag Ops Polres Metro Jakarta Selatan :

“Polres Metro Jakarta Selatan membuat rencana pengamanan berdasarkan surat telegram Kapolda Metro Jaya sebagai pengamanan imbalan terhadap pertandingan sepakbola yang diikuti Persija di Gelora Bung Karno. Perlibatan kekuatan pengamanan dari seluruh satuan fungsi untuk kepentingan pengamanan terbuka dan tertutup. Para petugas kepolisian kita siapkan pada titik rawan terutama di persimpangan Permata Hijau karena sebagai titik kumpul bertemunya rombongan suporter Jakmania dari arah Lebah bulus, Pondok Cabe, Ciputat, dan Tangerang menuju ke Gelora Senayan Bung Karno. Di lokasi tersebut petugas polisi dari satuan fungsi Binmas memberikan himbauan kepada para suporter, yang dibantu oleh satuan lantasi dalam mengatur lalu lintas jalan raya serta dari fungsi samapta dan fungsi lainnya melakukan patroli dan penjagaan, kemudian untuk yang berpakaian tertutup dari satuan fungsi Intelkam melakukan pemantauan secara tertutup yang dibantu pihak Reskrim. Dan saat Persija melawan Persib maka atas masukan satuan Intelkam, perlibatan kekuatan ditambah dan dilakukan razia untuk mengantisipasi bentrokan yang terjadi, sebab kedua tim kesebelasan ini para suporternya selalu membuat ulah.”

Pada situasi tertentu, apabila terjadi suatu tingkah laku kolektif berupa tindak kekerasan oleh para suporter Jakmania yang berawal dari kejadian di stadion Gelora Senayan Bung Karno, antisipasi yang dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan adalah melakukan pengamanan sepanjang jalan yang kemungkinan dilewati oleh para suporter Jakmania. Selain melakukan pengamanan dan ketertiban, hal ini juga bertujuan mencegah agar para

suporter Jakmania tidak berpapasan atau bertemu dengan suporter lawan maupun suporter Anti Jakmania (*basecamp* Anti Jakmania di Jakarta Utara) di jalan saat kembali usai pertandingan. Dan biasanya yang sering dilakukan oleh para suporter Jakmania adalah mengendarai serta menumpang metro mini atau bus secara ugal-ugalan yang membahayakan para suporter sendiri maupun pengguna jalan lainnya, terkadang juga mereka melakukan pelemparan sepanjang jalan yang mereka lewati serta melakukan pengeroyokan.

Dalam melaksanakan tugas kepolisian pihak Polres Metro Jakarta Selatan (sesuai pasal 19 ayat 2 dan kebijakan Kapolres Metro Jakarta Selatan) seluruh permasalahan sosial mengedepankan aspek pencegahan dari pada penindakan (*represif*). Menanggapi hal tersebut, pihak kesatuan atas yaitu Polda Metro Jaya yang berwenang mengeluarkan ijin atau rekomendasi pertandingan sepakbola yang melibatkan Persija di stadion Gelora Senayan Bung Karno mengundang jajarannya termasuk Polres Metro Jakarta Selatan melakukan rapat koordinasi dengan para pengurus Jakmania, PSSI beserta panitia pelaksana. Dari hasil rapat koordinasi tersebut biasanya Polres Metro Jakarta Selatan membuat rencana pengamanan dalam rangka penanggulangannya.

Di sisi lain Polres Metro Jakarta Selatan hanya melakukan pelaksanaan sesuai dengan rencana penanganan yang dibuatnya. Aplikasi upaya lainnya secara khusus pihak Polres Metro Jakarta Selatan tidak ada, seperti melakukan koordinasi khusus dengan pihak pengurus Jakmania yang kantor pusatnya terletak di Lebakbulus Jakarta Selatan (merupakan wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan). Hal ini disebabkan pihak Polres Metro Jakarta Selatan menganggap kepengurusan Jakmania merupakan urusan tingkat Polda Metro Jaya, karena para suporter Jakmania tersebar diseluruh wilayah Jakarta bahkan di luar Jakarta, dan lokasi pertandingan (Stadion Gelora Bung Karno) merupakan wilayah Polres Metro Jakarta Pusat. Seperti yang dikemukakan Kasat Intelkam, personil Bag Ops, dan personil Binmas Polres Metro Jakarta Selatan :

Kasat Intelkam menyampaikan :

“Upaya yang dilakukan oleh Sat Intelkam selaku pengemban tugas penggalangan terhadap ormas, maupun ormas lainnya, kami tidak melakukan upaya penggalangan yang khusus, karena posisi kepengurusan Jakmania setingkat Polda. Maka seharusnya Polda

yang melakukan penggalangan, dan kami tidak mempunyai program kerja sehubungan hal tersebut, hanya kadang-kadang apabila ada pertandingan kami dilibatkan dalam pengamanan tertutup untuk mengidentifikasi.....memang kami rasa hal ini perlu dilakukan penggalangan, namun tidak ada instruksi khusus dari Polda, tetapi kami kadang melakukan inisiatif dengan menelpon Ketua Umum Jakmania.”

Personil Bag Ops menyampaikan, bahwa :

“...hasil dari rapat koordinasi biasanya membahas rencana pengamanan saja, dan kami mengaplikasikan dengan membuat rencana pengamanan saja pada hari ‘H’ dan tidak ada rencana kegiatan lainnya.”

Personil Binmas menyampaikan, bahwa:

“...pada saat hari ‘H’ pertandingan kami melakukan tugas sesuai dengan surat perintah, biasanya kami ditempatkan pada lokasi rawan seperti di persimpangan Permata Hijau dan tempat-tempat lainnya yang dianggap rawan. Di sana kami terkadang melakukan himbuan sebagai upaya pre-emptif pada rombongan suporter Jakmania.....pelaksanaan tugas secara khusus dalam rangka upaya pre-emptif lainnya tidak ada, sebab dalam program kerja juga disebutkan secara rinci.....”

Secara rinci persepsi tersebut seharusnya tidak terjadi, hal ini bertolak belakang dengan visi dan misi serta kebijakan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Seharusnya staf pelaksana Polres Metro Jakarta Selatan tanpa diperintah seharusnya melaksanakan koordinasi tersebut, tindakan penjabaran ini berdasarkan amanat kebijakan tersebut. Hal ini sependapat dengan Harry Sulistiadi (Bag Opsnal Itwasda Polda Metro Jaya), bahwa :

“.....sepengatuan saya Dik, segala kebijakan mengenai pembinaan dan penggalangan terhadap organisasi massa seperti ini sudah dimuat dalam Grand Strategi Polri yang dijabarkan dalam rencana kegiatan setiap jajaran dari tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek. Selain itu Polda Metro sudah sering memberikan telegram kepada polres jajaran juga pada Polres Metro Jakarta Selatan mengenai pelaksanaan pemolisian terhadap organisasi massa, salah satunya Jakmania. Seharusnya tanpa diperintah ataupun melalui rapat koordinasi yang dilakukan selama ini, pihak jajaran polres khususnya Polres Metro Jakarta Selatan melakukan kegiatan tersebut, terlebih lagi seperti yang Adik sampaikan Kantor Pusat Jakmania sekarang terletak di Lebakbulus.”

Meskipun sudah dilakukan beberapa tahapan pencegahan oleh kepolisian, tetapi kejadian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Jakmania tetap saja terjadi, baik yang dapat diidentifikasi oleh aparat kepolisian maupun yang tidak dapat terdeteksi. Berdasarkan observasi di lapangan (saat pertandingan Persija melawan Persija bulan maret lalu dan Persija kalah 1-0) ternyata ditemukan hanya beberapa kejadian yang dapat dideteksi oleh

pihak kepolisian, salah satunya pengerusakan ruangan kantor pengurus PSSI di stadion Gelora Bung Karno. Sedangkan yang tidak terdeteksi pihak kepolisian, antara lain saat pertandingan berlangsung di dalam stadion terjadi perkelahian antara beberapa orang pendukung Persita (Tangerang) yang memakai kostum Jakmania yang meneriakan “lawan saja koordinator lapangan, tidak ada gunanya”, hal ini memicu perkelahian antara mereka dan pendukung Jakmania. Namun perkelahian dapat dihentikan oleh koordinator lapangan Jakmania, dan justru koordinator mengalami cedera luka di bagian kepala dan kaki (foto terlampir). Perkelahian berlanjut setelah pertandingan usai, pada saat para reporter keluar menuju jalan raya (masuk kewilayah Polres Metro Jakarta Selatan) sekelompok suporter Jakmania meneriakan “itu dia orang Persita”, selanjutnya beberapa orang suporter Jakmania memburu dan berhasil menangkap satu orang dimaksud dan dibawa sambil dipukul ke tempat para pengurus Jakmania dan Korlap Jakmania berkumpul (di sekitaran stadion).

Penyebab dari tidak terdeteksi beberapa kejadian tersebut yaitu melihat keterbatasan personil dan sarana prasarana kepolisian, sehingga kurangnya deteksi dan kurangnya penanganan dari pihak kepolisian. Seperti yang dikemukakan personil Bag Ops dan Kasat Intelkam. Personil Bag Ops menyampaikan, bahwa :

“Rencana pengamanan kita sudah secara maksimal dengan menempatkan personil di beberapa titik rawan, namun semua kembali lagi pada kesiapan anggota di lapangan.”

Kasat Intelkam menyampaikan, bahwa :

”...namun memang mas dari pengamatan anggota yang bertugas, apabila saat hujan kami sadari bahwa seperti kendaraan mobil patroli yang kami miliki air masuk dalam mobil terkadang membuat macet. Terkadang juga jika hujan turun personil meneduh ditempat-tempat yang tidak terkena hujan.”

Sebenarnya hal tersebut tidak bisa menjadi suatu alasan, seperti yang dikatakan Momo Kelana (2010) apabila bentuk kepolisian sekarang ini berbeda dengan masa lampau, setelah reformasi polisi harus lebih dekat dengan masyarakat sehingga kedekatan ini akan membuat tugas-tugas kepolisian dapat dilaksanakan secara dinamis salah satunya upaya deteksi dini. Seperti halnya juga dikemukakan Ahwil Luthan (2010b), dengan terjalinnya hubungan masyarakat dan kepolisian yang dinamis, maka tujuan kepolisian akan tercapai.

Hubungan tata cara kerja oleh petugas di lapangan selain mengemban fungsi masing-masing, personil Polres Metro Jakarta Selatan yang terlibat dalam pengamanan juga saling memberikan informasi umumnya melalui radio baik secara periodik maupun secara insidental apabila terjadi suatu masalah khusus. Tukar menukar informasi tersebut juga dilakukan dengan jajaran polres lainnya dan polda, dengan harapan pengamanan dapat berjalan dengan lancar. Posisi Polres Metro Jakarta Selatan melakukan imbalan pengamanan kepada Polres Metro Jakarta Pusat selaku penanggungjawab yang dikoordinatori oleh Polda Metro Jaya.

Sehingga dapat disimpulkan, walaupun pihak kepolisian sudah melakukan upaya pencegahan, namun kejadian tindak kekerasan yang dilakukan suporter Jakmania tetap saja terjadi. Sehingga diperlukan peran serta aktif Pam Swakarsa (dalam hal ini pengurus Jakmania) sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 3 ayat 1. Dengan adanya peran Pam Swakarsa bersama-sama kepolisian, Sir Robert Peel (dalam Kelling dan Coles, 1998) berpendapat bahwa hubungan dinamis ini akan menguntungkan tercapai misi kepolisian dalam mencegah kejahatan dan ketidaktertiban.

Secara rinci upaya yang dilakukan untuk menanggulangi suporter Jakmania dalam jangka waktu pendek dengan mengedepankan Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan tindakan kepolisian sebagai penanggungjawab koordinasi antara pengurus Jakmania dengan pihak kepolisian, dikarenakan *basecamp* Jakmania di wilayahnya dan para anggota serta pelaksana pengurus di tingkat bawah sudah terjadi interaksi secara tidak langsung. Kebijakan seperti ini juga disampaikan oleh Novian Pratama, Harry Sulistiadi, dan Hinca Pandjaitan, sebagai berikut :

Novian Pratama (Personil Biro Psikologi Mabes Polri) menyampaikan, bahwa :

“Personil sudah dibekali dengan ilmu psikologi dan psikologi massa, hanya memang kita sadari hanya sebatas pengenalan saja, sehingga untuk membaca gejala seperti tindak kekerasan seperti Jakmania perlu diadakan lagi pendalaman dengan pelatihan-pelatihan. Sehubungan....dalam jangka waktu sekarang ini diperlukan suatu kebijakan seperti mengeluarkan surat perintah dan sebagainya kepada unit yang ada untuk melakukan koordinasi.”

Hinca Pandjitan (Anggota PSSI dan Pengamat Sepakbola) menyampaikan, bahwa :

”.....melihat perkembangan sepakbola yang diikuti perkembangan suporter yang jumlahnya semakin besar sehingga menimbulkan beberapa masalah, sekarang kita lihat Mas dulu Jakmania jamannya sebelum Gubernur Sutiyoso berapa jumlahnya sangat sedikit tetapi sekarang jumlahnya sudah banyak sekali dan anggotanya saya dengar sudah keseluruh Indonesia entah itu anak-anak yang hanya ikut-ikutan saja. Apabila melihat perkembangan sepakbola di Indonesia semakin banyak klub-klub terutama di Jawa Timur tumbuh subur, dengan melihat perkembangan itu sangat perlu kepolisian membuat suatu unit khusus menangani masalah persepakbolaan seperti di negara maju lainnya. Hal ini perlu, pertama, aspek hukum, filosofi aturan hukum nasional dengan aturan transnasional seperti aturan sepakbola dalam Fifa akan sedikit bersinggungan; kedua aspek keamanan, di Fifa saya sudah katakan ada suatu badan kajian penanganan suporter dalam pertandingan, sehingga masukan selalu dapat dimonitor pihak kepolisian; dan lain sebagainya.”

Harry Sulistiadi (Bag Opsnal Itwasda Polda Metro Jaya) menyampaikan, bahwa :

“Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seharusnya Polres Jakarta Selatan memberikan masukan atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Jakmania. Hal ini berkaitan dengan beban moral mengenai lokasi Kantor Pusat Lebakbulus di wilayah Polres Jakarta Selatan, yang seyogyanya mereka lebih dekat daripada kita yang di polda..... Dengan melihat itensitas kerawanannya saya sampaikan tadi, kalau perlu dibentuk tim khusus atau unit khusus dalam organisasi yang sudah ada dengan menambahkan *job discription* terkait penanganan suporter sepakbola ini, karena mau tidak mau akhir-akhir ini hal-hal yang berkaitan sepakbola sudah menjadi perhatian publik yang sangat kompleks, dengan demikian diharapkan penanganan oleh pihak kepolisian lebih profesional”

4.3.2.4 Optimalisasi Kepengurusan Jakmania

Dengan melihat hasil analisis mengenai persepsi masyarakat khususnya para suporter Jakmania terhadap kinerja kepolisian dalam menanggulangi kerusuhan amuk massa suporter sepakbola yang masih kurang memuaskan (lihat pembahasan di atas mengenai *The Operation of Control Social*), salah satu alasannya adalah masih adanya beberapa kejadian yang tidak terdeteksi oleh aparat kepolisian. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa masyarakat tidak mengetahui siapakah personil Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Pusat dan lainnya, yang mereka tahu hanyalah aparat kepololisian.

Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian yang dikoordinatori oleh Polda Metro Jaya mengundang jajarannya, utamanya Polres Metro Jakarta Selatan yang mempunyai massa Jakmania lebih dibandingkan wilayah Jakarta lainnya (lihat tabel 4.13), dan wilayahnya merupakan kantor pusat pengurus Jakmania di Lebakbulus. Dalam

rapat koordinasi tersebut, dihadiri oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya dan jajarannya dengan para pengurus Jakmania.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pihak Polda Metro Jaya belum sepenuhnya efisien, karena pihak yang hadir dalam rapat tersebut dari hanya unsur pimpinan-pimpinan kesatuan Polda Metro Jaya beserta jajarannya, dan pihak suporter Jakmania yang hadir meliputi beberapa pengurus Jakmania yang ditunjuk saja. Penunjukan perwakilan pengurus Jakmania yang hadir dalam rapat koordinasi dilakukan, dikarenakan undangan yang dialokasikan kepada mereka hanya berjumlah 5 (lima) orang saja. Maka pengurus Jakmania tingkat daerah dan wilayah tidak pernah mengikuti rapat tersebut. Seperti yang disampaikan ketua umum Jakmania, bahwa :

“Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di Polda undangan kami hanya sebatas 5 (lima) orang saja, sehingga kami harus memilih beberapa orang saja yang kami anggap penting. Kami menginginkan seharusnya yang diundang meliputi rekan-rekan di daerah dan wilayah serta Korlap, soalnya mereka yang langsung di lapangan Mas.”

Dampak dari pembatasan peserta undangan menimbulkan *gap* atau kesenjangan koordinasi antara pelaksana dari kepolisian di lapangan dan pengurus Jakmania dalam hal ini koordinator lapangan masing-masing wilayah. Yang dimaksud *gap* atau kesenjangan ini dalam praktek koordinasi di lapangan, seperti pihak koordinator wilayah terendah tingkat kelurahan (contoh; seperti Koordinator Jakmania Wilayah Pondok Cabe) tidak tahu dengan siapa dan harus kemana melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian apabila terjadi gejala-gejala perilaku menyimpang. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan koordinasi di lapangan kurang berjalan di level bawah antara petugas lapangan kepolisian (seperti Kanit, Panit atau penanggung jawab sektor dan sebagainya) dan koordinator lapangan Jakmania, sehingga terjadi beberapa peristiwa yang tidak dapat terdeteksi dan petugas kepolisian di lapangan tidak bisa menangani dengan cepat. Seperti dikemukakan Humas Jakmania dan Korlap Pondok Cabe dibawah ini.

Humas Jakmania :

“Kami sering mendatangi kantor kepolisian Polda pak untuk melakukan koordinasi sebelum berlangsungnya pertandingan. Setelah itu kami pengurus diundang rapat koordinasi dengan Polda dan di hadiri oleh para kepolisian se Jakarta.....masalah perilaku menyimpang seperti kekerasan kami menyadari masih terjadi, karena pihak kami koordinator wilayah dan lapangan tidak tahu dengan siapa berkoordinasi di lapangan

sebab mereka tidak tahu dengan pak siapa kami berkoordinasi dan di mana. yang pada intinya tidak ketemulah pak.....sebenarnya kami malahan lebih mengenal anggota dari Polsek Metro Cilandak pak, apabila ada pertandingan sepakbola antar tim non divisi utama yang skupnya tidak melibatkan Persija dan dilaksanakan di stadion Lebakbulus biasanya Polsek sebagai penanggungjawab, dan kami saat itu bekerjasama lebih efektif karena tahu siapa polisi yang bertanggung jawab dengan minimal masing-masing koordinator lapangannya serta wilayah kami.....biasanya kami juga sebelumnya diundang rapat koordinasi dengan pihak Polsek dan Polres Metro Jakarta Selatan dengan jumlah undangan relatif cukup banyak sekitar sepuluh orang daripada di Polda hanya lima orang.....”

Korwil Jakmania Wilayah Pondok Cabe :

“Kalau ada peristiwa pak kami tidak tahu koordinasi dengan siapa ? Paling hanya kita coba reda kalau tidak bisa biasanya setelah peristiwa perkelahian contohnya terjadi baru setelah itu polisi datang.....tapi pak kalau yang bertanding di Lebakbulus masih mendingan pak, karena kami sudah tahu polisi siapa yang harus kami datangi, dan mereka juga sudah tahu dengan kami seperti orang polsek begitu.”

Melihat situasi demikian, seharusnya dalam rapat koordinasi di Polda ditindaklanjuti oleh Polres Metro Jakarta Selatan yang wilayahnya mempunyai massa terbanyak dan wilayahnya merupakan tempat *basecamp* Jakmania untuk melakukan upaya pencegahan dengan penggalangan, rapat koordinasi lapangan antara pengurus Jakmania yang berkompetensi dan petugas kepolisian dilapangan dan lain sebagainya. Harapan melibatkan para pengurus Jakmania dapat bekerjasama dengan kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Selatan dalam mencegah tindak kekerasan para suporter. Dengan demikian, kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Selatan dapat mengutamakan tindakan pencegahan (sesuai pasal 19 ayat 2 UU No. 2 tahun 2001) dengan memberikan informasi terkait gejala-gejala prilaku menyimpang berupa tindak kekerasan dari pengurus Jakmania, informasi ini dikaitkan dengan antisipasi dalam pergerahan kekuatan personil Polres dan kepada jajaran Polda Metro Jaya sebagai bentuk antisipasi.

Secara rinci upaya melibatkan secara penuh dalam menjaga dan memberikan rasa aman para anggota suporternya, peranan pengurus Jakmania sendiri untuk melakukan deteksi dini gejala-gejala yang timbul dan kontrol sosial. Untuk menjalankan hal tersebut kepengurusan Jakmania sudah terbentuk sehingga Polres Metro Jakarta selatan tinggal melakukan optimalisasi saja atas keberadaannya. Sedangkan peran kepolisian (Polres

Metro Jakarta Selatan) menerima hasil informasi yang didapat dari pengurus Jakmania, yang kemudian menangani gejala-gejala tersebut pada kesempatan pertama serta menginformasikan kepada jajaran secara vertikal maupun horisontal, sehingga permasalahan tidak meluas. Hal ini sesuai dengan pendapat Kelling dan Wilson (dalam Kelling dan Coles, 1998) mengenai teori *fixing broken window*.

Upaya tindakan kepolisian semacam ini sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi kepolisian Indonesia, namun terkadang pada pelaksanaannya sering terlupakan sehingga perlu peningkatan (Ahwil Luthan, 2010b). Upaya melakukan optimalisasi kepengurusan ini juga dikatakan sebagai salah satu cara tindakan kepolisian yang merupakan bagian dari pemolisian masyarakat. Seperti halnya pendapat Harry Sulistiadi (Bag Ops Itwasda Polda Metro Jaya) yang menyampaikan, bahwa :

“Upaya optimalisasi ini saya sangat setuju, karena dengan kerjasama antara kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan sebagai garis terdepan dan masyarakat dalam hal ini organisasi Jakmania maka segala gejala gangguan kamtibmas yang diakibatkan kehadiran suporter Jakmania ini bisa diminimalisir dan diantisipasi. Dan menurut saya ini merupakan bagian dari tugas kepolisian yang tercakup dalam bagian Polmas, dan kepengurusan Jakmania diaktifkan dalam FKPM.”

Dalam rangka mengoptimalkan partisipasi kepengurusan Jakmania, pihak kepolisian melalui pihak PSSI dapat mengendalikan para suporter Jakmania secara tidak langsung. Ini dapat dilakukan, karena secara normatif (menurut *Statuta* Fifa) kendali suporter Jakmania di bawah Tim Persija, dan Tim Persija tunduk kepada aturan-aturan Fifa termasuk mengatur suporter dalam pertandingan, bahkan PSSI dapat memberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan suporter oleh masing-masing tim sepakbola. Pendapat ini di kemukakan oleh Hince Pandjaitan (Pengurus PSSI dan Pengamat Sepakbola), bahwa :

“...sudah kami sampaikan bahwa dalam *statute* Fifa, pihak pelaksana sepakbola dalam hal ini PSSI pada ketentuan nomor 1 (satu) pelaksanaan persepakbolaan harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat....suporter adalah milik tim masing-masing sepakbola, kami sering memberikan sanksi kepada tim sepakbola yang suporternya berbuat anarkis sehingga mengakibatkan ancaman bagi para pemain dan suporter lawan, sehingga kadang kita lihat dalam sebuah pertandingan tanpa kehadiran suporter....aplikasi dari *statute* Fifa, PSSI pernah mengundang untuk melakukan MOU dengan pihak kepolisian (Mabes Polri), maksud dari MOU ini saling bertukar informasi berkaitan persepakbolaan termasuk di dalamnya cara-cara menangani suporter, karena di

Fifa terdapat kajian perkembangan penanganan suporter di dunia. Namun pihak kepolisian belum menanggapi dengan alasan penanganan permasalahan seperti ini tiap-tiap daerah berbeda sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.”

Dari analisis di atas dapat disimpulkan, bahwa pihak kepolisian belum melakukan koordinasi secara maksimal baik di tingkat polda dan polres khususnya Polres Metro Jakarta Selatan yang mempunyai wilayah sebagai *basecamp* Jakmania dalam melakukanantisipasi tindak kekerasan oleh suporter Jakmania. Dan penjabaran dari tugas kepolisian dalam rangka pembinaan pengamanan swakarsa yang berkaitan keberadaan kepengurusan Jakmania belum sepenuhnya dimengerti oleh anggota kepolisian khususnya personil Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga menimbulkan kesenjangan HTCK secara vertikal maupun horisontal.

Peran kepolisian dalam penanganan terhadap gejala-gejala mengarah kepada tindakan kekerasan Jakmania, diklasifikasikan menurut tahapan-tahapan dalam tingkah laku kolektif yang sudah dibahas di sub –bab sebelumnya, lalu dari tahapan-tahapan tersebut bisa diperkirakan sejauh mana penanganan harus dilakukan baik menyangkut pergerakan anggota maupun kebijakan lainnya. Dengan adanya kerjasama antara pengurus Jakmania dan Polres Metro Jakarta Selatan selaku aparat penegak hukum dan kamtibmas, maka :

- (1) fungsi kepolisian dikatakan berhasil,
- (2) dalam melaksanakan tugasnya kepolisian dapat mengedepankan pencegahan,
- (3) kepolisian lebih cepat merespon mengenai adanya gejala-gejala menyimpang mengarah kepada tingkah laku kolektif yang dilakukan suporter Jakmania, seperti tindak kekerasan, dan
- (4) mengembalikan kepercayaan masyarakat menciptakan ketertiban dan rasa aman, sehubungan memaksimalkan deteksi dini terkait tindakan yang mengarah ke kriminalitas oleh para suporter sepakbola.

4.4 Keterbatasan Penelitian

Dengan tetap mengacu kepada tujuan penelitian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu :

- (1) Presentase responden yang berhasil didapat hasil kuesionernya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan suporter Jakmania yang heterogen tersebar di Jakarta sampai dengan di luar pulau jawa adalah sekitar 52.000 orang yang terdaftar di pengurus Jakmania, yaitu jumlah 130 responden dan yang dapat diambil hasilnya hanya 126 orang. Walaupun perbedaan jumlah yang cukup berbeda dan komunitas dengan jumlah besar hanya dapat dijumpai saat pertandingan saja, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel non random ini dengan sampel tanpa sengaja atau *accidental sampling*, sehingga dapat memenuhi syarat untuk menganalisis data menggunakan *Structural Equation Model* (SEM).
Peneliti menyadari untuk memenuhi keakuratan yang tinggi dan lebih mewakili seluruh asal daerah suporter Jakmania, seyogyanya teknik pengambilan sampel dengan kombinasi dari beberapa teknik atau *multifarious sampling*. hal ini tidak dilakukan peneliti karena mempertimbangkan waktu penelitian.
- (2) Waktu yang diberikan peneliti untuk melakukan penelitian adalah sekitar dua bulan, meliputi penyusunan pendahuluan sampai dengan hasil penelitian dengan menggunakan metode gabungan ini.
- (3) Belum ada acuan tesis terdahulu yang menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) di program Kajian Ilmu Kepolisian, sehingga peneliti harus mempelajari dengan menyita waktu penelitian dan mencari referensi di luar.
- (4) Tahap wawancara belum bisa mewawancarai para pimpinan kepolisian baik di Polres (Kapolres) maupun di Polda, dikarenakan kesibukan beliau dan waktu penelitian.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa :

- (1) Penyebab awal terjadinya tingkah laku kolektif oleh suporter Jakmania adalah adanya *Structural Strain* atau tipe ketegangan. Situasi ini ditandai dengan para Jakmania sudah berhadapan dengan suporter lawan ditandai para Jakmania sudah bertemu secara langsung atau tidak langsung dengan suporter tim kesebelasan lawan di lapangan, kemudian dipicu akibat adanya tindakan putusan wasit yang kontroversial merugikan tim Persija, seperti dianulirnya “gol” yang masuk dari tim lawan. Situasi demikian yang memicu para suporter turun kelapangan sebagai ekspresi pelampiasan kemarahan atas putusan wasit.
- (2) Proses nyata terjadinya tindakan kolektif berupa tindak kekerasan oleh Jakmania lebih cepat atau rentan terjadi diawali gejala situasi *Structural Strain* berkembang *Precipitating Factors* kemudian muncul tindakan nyata tindakan kekerasan situasi *Mobilization of Participants for Action*. Hal ini terjadi perbedaan dengan apa yang dikemukakan Smelser (1962) mengenai proses tahapan *collective behaviour*. Sehingga dapat dikatakan tanpa adanya pendorong struktural atau *structural condusiveness*, dan situasi tumbuh dan berkembang kepercayaan atau *Growth and Spread of Generalized Belief* tetap mempunyai berpotensi besar terjadi. Kemudian bekerjanya pengendalian sosial atau *the operation of social control* belum optimal sehingga tindakan kekerasan oleh Jakmania masih terjadi..
- (3) Pada situasi mulai muncul faktor-faktor pencetus atau *Precipitating Factors* memerlukan perhatian khusus, apabila muncul faktor pencetus maka sangat besar berpeluang terjadinya tindak kekerasan. Namun kenyataannya pihak kepolisian tidak mengantisipasinya secara tepat, hal ini disebabkan pergeseran anggota kepolisian dalam melaksanakan pengamanan belum berdasarkan analisa perkembangan situasi dan kondisi komunitas Jakmania di lapangan. Hal ini terlihat pihak kepolisian menempatkan situasi pendorong struktural atau *structural condusiveness* pada AF

yang seharusnya cukup PH dan situasi *structural strain* pada AF, sehingga tidak mempengaruhi kondisi fisik dan psikis anggota kepolisian di lapangan.

- (4) Sikap fanatisme para suporter Jakmania adalah hal yang wajar dan bukanlah sesuatu yang mempunyai potensi besar akan mengakibatkan suatu tindakan menyimpang yang mengganggu kamtibmas. Dengan kata lain sikap fanatisme merupakan wujud dari ekspresi kecintaan dalam mendukung Persija dan sebagai aktualisasi diri sebagai pendukung Persija yang rata-rata mereka adalah anak muda dan remaja.
- (5) Masih adanya persepsi yang salah pada masyarakat dan penegak hukum, bahwa sikap fanatik Jakmania identik dengan tindak kekerasan. Yang seharusnya para suporter Jakmania sebagai mitra dari kepolisian yang harus dilayani.
- (6) Tingkat kepercayaan masyarakat khususnya suporter Jakmania terhadap kepolisian dalam menangani kerusuhan sepakbola sangat rendah. Ini terbukti masih banyaknya terjadi beberapa kejadian yang terdeteksi maupun yang tidak terdeteksi oleh aparat kepolisian, walaupun pihak kepolisian sudah melakukan antisipasi dengan membuat rencana pengamanan melalui rapat koordinasi dan pelaksanaan pengamanan seolah-olah terkesan menjadi rutinitas dan kebiasaan.
- (7) Belum adanya peran fungsi kepengurusan Jakmania dalam mengantisipasi terjadinya kerusuhan. Di mana kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya khususnya Polres Metro Jakarta Selatan kurang memanfaatkan peranan fungsi kepengurusan Jakmania. Koordinasi hanya pada level pejabat pusat saja, dan pada level bawah yang terdiri dari Korlap, Korwil, dan Korda tidak dilibatkan, padahal mereka yang bertindak langsung di lapangan mengetahui siapa-siapa anggota Jakmania-nya serta mengetahui secara persis gejala perubahan situasi paling dini di lapangan. Koordinasi hanya sebatas mengundang pengurus pusat saja (undangan max. 5 orang) yang biasanya dilakukan pada saat sebelum ada pelaksanaan pertandingan saja. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik maka semua situasi dan kondisi dapat terkuasai (Kunarto, 1990). Sehingga penggunaan kekuatan kepolisian secara isik bisa dikurangi (Sir Robert Phil dalam Kelling dan Coles, 1998), dengan penggunaan kekuatan fisik yang minim secara langsung akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

- (8) Adanya persepsi yang salah sebagian besar personel Polres Metro Jakarta Selatan, bahwa permasalahan yang berkaitan dengan Jakmania menjadi urusan sepenuhnya Polda Metro Jaya. Hal ini tidak sejalan dengan Kebijakan Kapolres Metro Jakarta Selatan bidang Kemitraan.

5.2 Saran

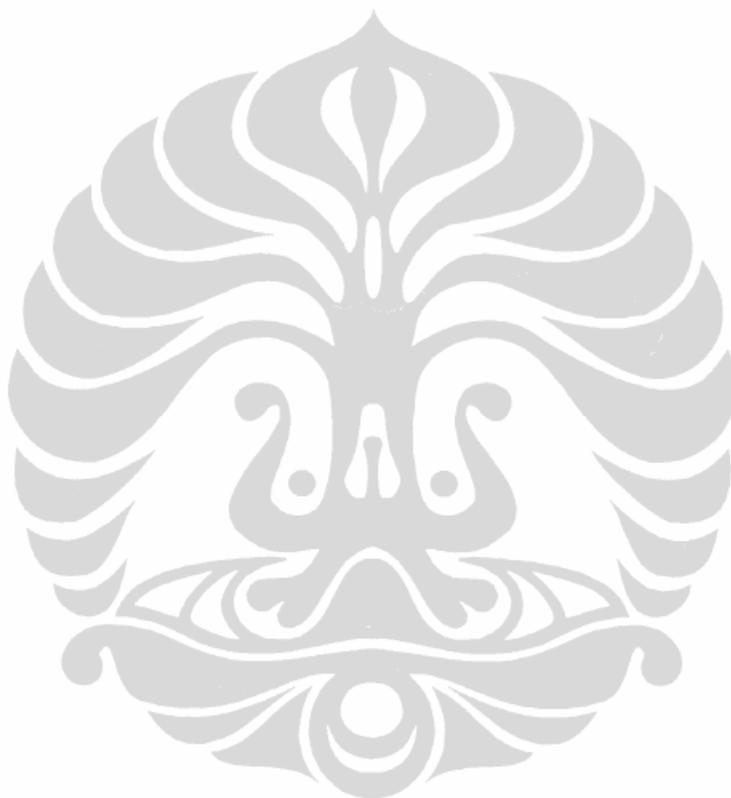
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dalam menanggulangi tindak kekerasan oleh Jakmania disarankan perlu beberapa tindakan teknis kepolisian dan penelitian lanjutan, antara lain :

- (1) Melakukan penambahan undangan rapat koordinasi pada pihak pengurus Jakmania sampai level Korlap, Korda, dan Korwil terutama wilayah Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian terjadi *gap* atau kesenjangan koordinasi di lapangan antara pihak kepolisian kepala unit yang bertugas di lapangan dan pihak koordinator masing-masing wilayah serta lapangan Jakmania.
- (2) Menghilangkan persepsi staf operasional Polres Metro Jakarta Selatan, bahwa penggalangan serta koordinasi antara Jakmania dan kepolisian hanyalah tugas dari Polda Metro Jaya yang mengeluarkan rekomendasi. Seharusnya Polres Metro Jakarta Selatan menjadi tulang punggung penggalangan dan koordinasi dengan pengurus Jakmania, sebab wilayah Polres merupakan *basecamp* serta sudah terjalin interaksi antara sebagian besar staf operasional Polres dan pengurus Jakmania, dan anggota Jakmania terbesar di wilayah selatan Jakarta yang merupakan wilayah hukum Polres juga.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan poin 2, melakukan perubahan persepsi Jakmania sebagai musuh (ancaman) dan merubah *mind set* para anggota staf operasional Polres Metro Jakarta Selatan dalam melakukan pengamanan sepakbola bukan berlandaskan prinsip “biasanya” atau kebiasaan atau rutinitas, namun berpedoman pada visi dan misi serta kebijakan Kapolres Metro Jakarta Selatan (implementasi dari Grand Strategi Polri) yang seharusnya sudah dimengerti dan dipahami oleh masing-masing anggota, terutama bidang kemitraan.
- (4) Memberikan pengertian sewaktu APP kepada anggota khususnya yang bertugas di lapangan sebelum menjalankan tugasnya, bahwa sikap fanatik yang dimiliki para

suporter Jakmania bukanlah ancaman. Namun pada dasarnya merupakan wujud dari ekspresi pendukung Jakmania yang harus dilayani dan diamankan serta diarahkan dalam perannya sebagai suporter yang baik.

- (5) Mengaktifkan lagi peranan dan mengundang para Korda, Korwil, Korlap, dan Pengurus Jakmania untuk ikut dalam FKPM, khususnya di wilayah Jakarta Selatan yang memiliki jumlah keanggotaan terbesar.
- (6) Melakukan pelatihan dan atau kursus kepada para anggota minimal kepala unit di lapangan mengenai psikologi massa. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa para suporter Jakmania melakukan tindak kekerasan diawali dengan beberapa tahapan gejala atau situasi yang terjadi.
- (7) Melakukan penelitian untuk menjawab optimalisasi penanganan oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya sebagai koordinator pelaksanaan pengamanan sepakbola. Sehingga akan diketahui *gap* atau kesenjangan HTCK secara horizontal dan vertikal, Dengan demikian dapat merumuskan tindakan kepolisian yang tepat berdasarkan gejala yang muncul, dan lain sebagainya.
- (8) Melakukan penelitian perilaku para suporter sepakbola di Indonesia secara umum sebagai pedoman tindakan Polri dalam penanggulangan tindak kekerasan oleh suporter sepakbola.
- (9) Melakukan penelitian terhadap penawaran MOU yang di ajukan PSSI antara Mabes Polri dan pihak PSSI sebagai perwakilan Fifa yang sampai sekarang belum disetujui atau ditandatangani oleh pihak Mabes Polri. Yang isi MOU didalamnya salah satu poinnya berkaitan dengan suporter sepakbola.
- (10) Melakukan penelitian berkaitan aspek perlunya kebijakan pimpinan kepolisian menambahkan *job description* pada unit dan atau satuan operasional atau membentuk unit dan atau satuan tugas yang khusus menangani dinamika sepakbola di Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil penelitian, antara lain; pertama, aspek kamtibmas dengan kecenderungan peningkatan kriminalitas yang mengakibatkan kerugian harta benda bahkan nyawa; kedua, perilaku suporter Jakmania yang begitu cepat dan sangat besar berpeluang terjadi tindakan kekerasan kolektif; dan ketiga, *gap* atau kesenjangan penerapan antara hukum nasional dan hukum transnasional berkaitan aturan persepakbolaan dunia (Hinca Pandjaitan, 2011).

- (11) Melakukan penelitian secara komprehensif mengenai kelayakan fasilitas keamanan yang dimiliki Gelora Bung Karno, dengan membandingkan sistem kelayakan keamanan di negara lainnya. Hal ini untuk mengantisipasi ancaman kekerasan dan atau kebrutalan para suporter khususnya Jakmania yang diakibatkan hasil pertandingan dan sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel :

- Anderson, J.C., Gerbing, D.W., dan Hunter, J.E.1987. *On The Assesment of Unidimensional Measurement : Internal and Exsternal Consistency, and Overall Consistency Criteria. Journal of Marketing Reasearch*, Vol XXIV (Nov 1987), 432-437.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek) Edisi Revisi V*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bachtiar, Harsja W. 1994. *Ilmu Kepolisian : Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, Jakarta : PTIK, Gramedia.
- Bayley, David H. 1998. *Police For The Future*, penyadur oleh Kunarto dkk, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Bronfenbrenner, Urie. 1979. *The Ecology of Human Development : Experiment by Nature and Design*, Cambridge, Massachusetts, and London : Harvard University Press.
- Brown, Adam (ed). 1998. *Fanatic! Power, Identity, & Social Fandom in Football*. London: Routledge.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana.
- Creswell, John W. 2002. *Research Design*, penyadur KIK UI angkatan III dan IV, Jakarta: KIK Press.
- Damayanti, Setia. 2011. *Model Pembangunan Rumah Susun Berkelanjutan di Perkotaan; Kajian Persepsi, Kepuasan, dan Prilaku Penghuni Rumah Susun Cinta Kasih di DKI Jakarta*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Lingkungan-Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Kelling, George L. and Catherene M. Coles. 1996. *Fixing Broken Window*, penyadur Kunarto dkk, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kelono, Momo. 2010. *Perkembangan Hukum Pidana dan Kepolisian*, dalam materi perkuliahaan mahasiswa KIK UI angkatan XIV, tidak diterbitkan.
- Kunarto. 1999. *Merenungi Kiprah Polri Dalam Menangani Berbagai Kerusakan (Seri : Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku Ke-9)*, Jakarta: Cipta Manunggal.

- Le Bon, Gustave. 1895. *The Crowd : A Study of a Popular Mind*, Mineola New York : Dover Publications.
- Luthan, Ahwil. 2010a. *Perbandingan Sistem Kepolisian*, dalam materi perkuliahan mahasiswa KIK UI angkatan XIV, tidak diterbitkan.
- 2010.b Disampaikan dalam *Hasil Seminar Kasus Gayus : Ditinjau Dari Pendekatan Interdisipliner*, diselenggarakan oleh Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, di Hotel Sultan Jakarta tanggal 16 Desember.
- Mannheim, H. 1965. *Comparative Criminology*. London : Routledge and Kegan Poul, Volume II.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1999. *Sejarah Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Mabes Polri.
- Moleong, Lexi J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi, cetakan ke dua puluh lima*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Ahmad. 2010. *Fanatik dan Toleransi*. Dimuat dalam situs <http://mubarok-institute.blogspot.com/2010/12/fanatik-dan-toleransi-oleh-prof-dr.html>. Diakses tanggal 14 Maret 2011.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulatan*, Jakarta: Peradaban.
- Pandjaitan, Hinca IP. 2011. *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan Fifa: dalam Kompetisi Sepak Bola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pardede, Parlindungan. 2010. *Paradigma Penelitian*. Dimuat dalam situs http://www.fkip.uki.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77:paradigma-penelitian&catid=41:artikel&Itemid=55. Diakses tanggal 14 Mei 2011.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2005. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- 2007. *Massa Punya Psikologi Sendiri*, dimuat dalam situs <http://sarlito.hyperphp.com/articles/social-processes-and-social-issues/massa-punya-psikologi-sendiri.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2011.
- 2010. *Bangsa Bonek*, dimuat dalam situs <http://sarlito.hyperphp.com/articles/social-processes-and-social-issues/bangsa-bonek.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2011.
- Sudijono, Anas. 1987. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT. Alfabeta, Bandung.

Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi ed rev*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

Suparlan, Parsudi. 2004a. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta : YPKIK.

----- 2004b. *Hubungan Antar Suku Bangsa*, Jakarta : YPKIK.

Smelser, Neil J. 1978. *Theory of Collective Behavior*, New York : the Free Press.

Soekanto, S. 1990. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*, USA : Newbery Award Record.

Triton, PB. 2006. *SPSS 13.0 Terapan Riset Statistik Parametrik*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Situs dan Media Informasi Online:

<http://www.antaraneews.com>

<http://www.jakmania.org>

<http://www.kompas.com>

<http://www.news.okezone.com>



LAMPIRAN 1

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	126	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	126	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.814	.848	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Saya memahami tugas dan peran sebagai seorang supporter	54.02	69.767	.362	.408	.808
Saya cinta dan setia serta bangga pada Persija	53.63	69.884	.525	.555	.802
Demi Persija apapun kulakukan	53.89	69.188	.470	.672	.803
Dukungan suporter penting bagi kemenangan tim sepakbola, maka saya selalu ingin mendampingi dan mendukung Persija bertanding	53.94	67.612	.530	.716	.798
Saya selalu menargetkan agar tim sepakbola kami menang	53.97	67.839	.523	.477	.799
Salah satu atau semua anggota keluarga saya suka sepakbola dan pendukung Persija	54.47	62.939	.587	.622	.789
Orang yang tinggal serumah dengan saya juga suka sepakbola dan pendukung Persija	54.44	63.177	.575	.598	.790

Tetangga dan teman saya sekampung merupakan suporter Persija	54.37	65.772	.549	.467	.795
Orang yang tinggal disekitar saya ada juga yang menjadi anggota Jakmania	54.17	67.505	.485	.367	.800
Saya menonton sepakbola ini diajak bersama-sama oleh teman	55.23	61.779	.388	.405	.815
Menurut saya orang Jakarta dikatakan "gaul" jika mendukung tim Persija	55.49	58.380	.516	.627	.799
Menurut saya dikatakan laki-laki apabila suka dan cinta dengan sepakbola.	55.21	60.746	.445	.524	.807

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	126	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	126	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,678	5

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Saya sudah sangat lama menunggu dan antri sebelum pertandingan dimulai	16,48	20,252	,328	,670
Kodisi badan saya cukup lelah dan capek saat pertandingan berlangsung	17,17	18,252	,466	,611
Saat pertandingan berlangsung perasaan saya sangat cemas	17,10	18,023	,504	,594
Saya melihat ada kesalahan wasit yang menyebabkan kekalahan tim sepakbola kami	16,75	19,819	,332	,670
Kekalahan tim kami dalam pertandingan tidak bisa diterima bila tim lawan bermain curang	16,56	17,544	,536	,579

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	126	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	126	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
,622	4

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Perasaan kami sangat kecewa ketika wasit mengambill keputusan yang salah (kontroversial)	14,48	7,835	,471	,498
Saya merasa sangat marah apabila tim lawan bermain kasar dan curang	14,41	7,348	,631	,371
Kami berteriak dan bernyanyi yel-yel menyoraki wasit dan tim lawan yang kami anggap curang	14,86	8,859	,256	,680
Kami mengikuti sorakan dan nyanyian yel-yel yang koordinator suarakan	14,04	10,902	,320	,611

Lampiran 4**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	126	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	126	100,0

Cronbach's Alpha	N of Items
,483	3

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pada saat itu Anda melihat ada penonton yang lari kelapangan dan memukul wasit atau pemain Persija lalu beberapa supporter secara spontan ke lapangan juga. Anda hanya diam saja ditempat.	7,36	7,079	,285	,416
Pada saat konflik dengan wasit, tim kami (Jakmania) siap bertempur dengan tim lawan	7,93	6,835	,298	,394
Kerusuhan terjadi biasanya disulut oleh ketidakpuasan yang salah satunya adalah dianulirnya gol yang sudah masuk ke tim lawan	6,87	7,792	,331	,346

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	126	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	126	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,770	5

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kami mengikuti apa yang dilakukan oleh sesama supporter untuk melampiaskan kekecewaan	14,40	24,865	,584	,714
Saya mengikuti tindakan yang dilakukan oleh orang dalam kelompok kami sebagai kebersamaan Jakmania	13,87	27,574	,414	,767
Ketika pertandingan usai, para supporter yang timnya kalah biasanya ugal-ugalan di jalanan dan membahayakan pengguna jalan	15,22	22,830	,638	,692
Sasaran amuk massa di stadion yang sering terjadi adalah pengrusakan spanduk supporter, pembatas lapangan, fasilitas stadion, dan lain-lain yang ada disekitar stadion	15,09	22,544	,658	,684
Karena beberapa sebab, kerusuhan terjadi. Sikap saya adalah bergabung dengan tim supporter kami (Jakmania) dan siap mempertahankan diri dengan peralatan yang ada	14,06	25,660	,426	,769

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	126	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	126	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,684	3

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penyelesaian konflik menjadi tanggungjawab tugas koordinator lapangan dan aparat hukum (kepolisian)	9,76	4,039	,621	,422
Peran aparat hukum (kepolisian) berhasil dalam meredam amuk massa suporter	10,05	3,998	,497	,605
Koordinator kami selalu memberikan pengarahan untuk antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan	9,27	5,591	,402	,703

DATE: 5/ 4/2011

TIME: 7:43

L I S R E L 8.72

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by
 Scientific Software International, Inc.
 7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
 Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
 Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
 Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005
 Use of this program is subject to the terms specified in the
 Universal Copyright Convention.
 Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:\Documents and
 Settings\user\My Documents\Data Yugo\KIK\TESIS\Kuantitatif\Final
 Lama\SC-CFA.Spl:

Raw Data from File DataLisrel.psf
 Asymptotic Covariance Matrix from File DataLisrel.acm
 Latent Variables Conduct Fanatik Ekologi

Relationships:

H1 =1*Fanatik
 H2 - H5 = Fanatik
 H6 H7 H8 H9 H10 H11 = Ekologi
 Fanatik Ekologi = Conduct

Set Error Variance of Conduct to 0
 Set Error Variance of Fanatik to 0
 !Set Error Variance of Acohesvns to 0
 !Set Error Variance of TaskCnf to 0
 Let Error Covariance of H1 and H3 Free
 Let Error Covariance of H4 and H5 Free
 Let Error Covariance of H1 and H4 Free
 Let Error Covariance of H6 and H9 Free
 Let Error Covariance of H6 and H8 Free
 Let Error Covariance of H2 and H4 Free
 Let Error Covariance of H10 and H11 Free
 Let Error Covariance of H2 and H3 Free

Admissibility Check Off
 Iterations: 500
 Path Diagram

End Of Problem

Sample Size = 126

Covariance Matrix

	H1	H2	H3	H4	H5
H6					
H1	0.93				
H2	0.32	0.49			
H3	0.31	0.35	0.71		
H4	0.28	0.42	0.62	0.85	
H5	0.41	0.35	0.38	0.43	0.83
H6	0.49	0.38	0.37	0.55	0.60
1.64					
H7	0.51	0.28	0.31	0.46	0.58
1.18					
H8	0.45	0.29	0.30	0.32	0.37
0.71					
H9	0.25	0.23	0.31	0.32	0.22
0.24					
H10	-0.06	0.10	-0.02	0.06	0.25
0.56					
H11	-0.07	0.22	0.18	0.31	0.21
0.53					

Covariance Matrix

	H7	H8	H9	H10	H11
H7	1.64				
H8	0.71	1.16			
H9	0.38	0.51	1.01		
H10	0.57	0.27	0.45	3.43	
H11	0.48	0.48	0.58	2.01	3.47

Number of Iterations = 17

LISREL Estimates (Robust Maximum Likelihood)

Measurement Equations

H1 = 1.00*Fanatik, Errorvar.= 0.55 , R² = 0.40
(0.21)
2.56

H2 = 0.89*Fanatik, Errorvar.= 0.20 , R² = 0.60

(0.20) (0.069)
4.41 2.87

H3 = 1.09*Fanatik, Errorvar.= 0.28 , R² = 0.61
(0.16) (0.079)
6.64 3.50

H4 = 1.50*Fanatik, Errorvar.= 0.026, R² = 0.97
(0.34) (0.12)
4.39 0.22

H5 = 1.06*Fanatik, Errorvar.= 0.42 , R² = 0.50
(0.15) (0.10)
7.24 4.14

H6 = 1.19*Ekologi, Errorvar.= 0.20 , R² = 0.88
(0.21)
0.95

H7 = 0.92*Ekologi, Errorvar.= 0.79 , R² = 0.52
(0.12) (0.16)
7.46 5.02

H8 = 0.79*Ekologi, Errorvar.= 0.53 , R² = 0.54
(0.13) (0.13)
6.20 4.08

H9 = 0.57*Ekologi, Errorvar.= 0.69 , R² = 0.32
(0.15) (0.17)
3.82 4.12

H10 = 0.51*Ekologi, Errorvar.= 3.17 , R² = 0.077
(0.17) (0.32)
3.07 9.89

H11 = 0.57*Ekologi, Errorvar.= 3.14 , R² = 0.094
(0.18) (0.28)
3.22 11.26

Error Covariance for H3 and H1 = -0.07
(0.065)
-1.11

Error Covariance for H3 and H2 = 0.00
(0.059)
-0.03

Error Covariance for H4 and H1 = -0.27
(0.087)
-3.11

Error Covariance for H4 and H2 = -0.08
(0.091)
-0.88

Error Covariance for H5 and H4 = -0.16
 (0.069)
 -2.26

Error Covariance for H8 and H6 = -0.20
 (0.11)
 -1.85

Error Covariance for H9 and H6 = -0.41
 (0.092)
 -4.44

Error Covariance for H11 and H10 = 1.72
 (0.32)
 5.44

Structural Equations

Fanatik = 0.61*Conduct, , R² = 1.00
 (0.15)
 4.19

Ekologi = 0.57*Conduct, Errorvar.= 0.67 , R² = 0.33
 (0.13) (0.21)
 4.55 3.23

Correlation Matrix of Independent Variables

Conduct

 1.00

Covariance Matrix of Latent Variables

	Fanatik	Ekologi	Conduct
	-----	-----	-----
Fanatik	0.37		
Ekologi	0.35	1.00	
Conduct	0.61	0.57	1.00

W_A_R_N_I_N_G: Matrix above is not positive definite

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 35
 Minimum Fit Function Chi-Square = 62.39 (P = 0.0030)
 Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 63.46 (P =
 0.0023)
 Satorra-Bentler Scaled Chi-Square = 43.22 (P = 0.16)
 Chi-Square Corrected for Non-Normality = 62.82 (P = 0.0027)
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 8.22

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 29.08)

Minimum Fit Function Value = 0.50
 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.066
 90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.23)
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.043
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.082)
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.061

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.00
 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.78 ; 1.01)
 ECVI for Saturated Model = 1.06
 ECVI for Independence Model = 8.20

Chi-Square for Independence Model with 55 Degrees of Freedom =
 1002.77

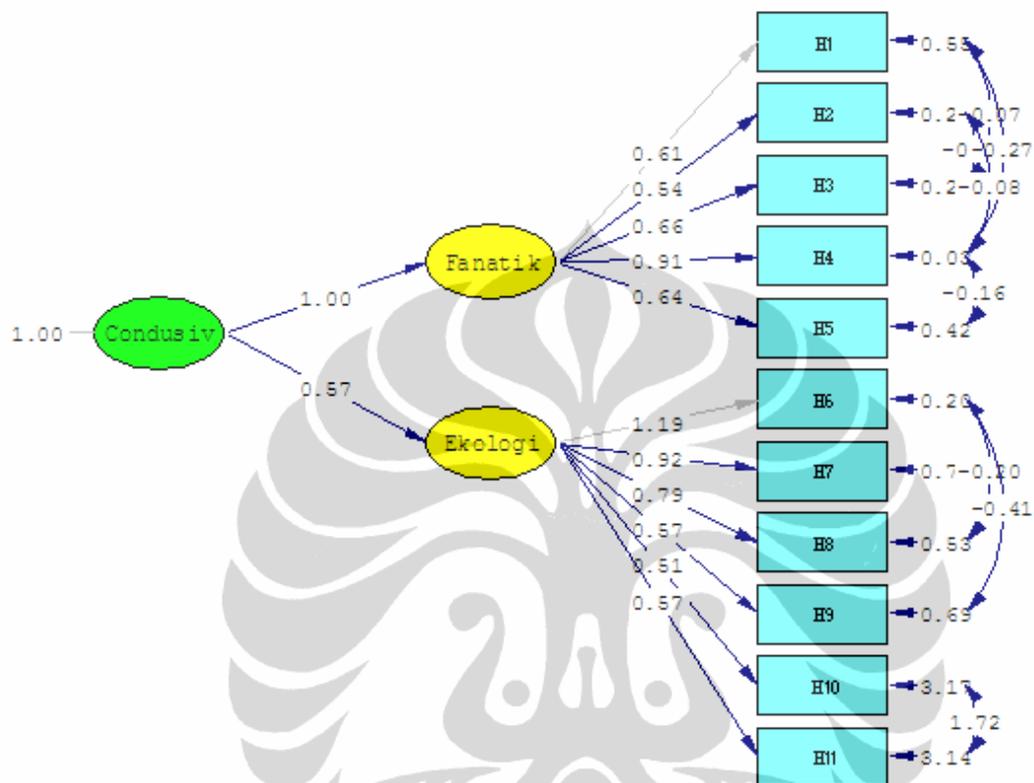
Independence AIC = 1024.77
 Model AIC = 125.46
 Saturated AIC = 132.00
 Independence CAIC = 1066.97
 Model CAIC = 244.39
 Saturated CAIC = 385.19

Normed Fit Index (NFI) = 0.96
 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.61
 Comparative Fit Index (CFI) = 0.99
 Incremental Fit Index (IFI) = 0.99
 Relative Fit Index (RFI) = 0.93

Critical N (CN) = 166.86

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.096
 Standardized RMR = 0.068
 Goodness of Fit Index (GFI) = 0.92
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.84
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.49

Time used: 0.406 Seconds



Chi-Square=63.46, df=35, P-value=0.16, RMSEA=0.043

DATE: 5/ 4/2011
 TIME: 7:44

L I S R E L 8.72

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by
 Scientific Software International, Inc.
 7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
 Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
 Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
 Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005
 Use of this program is subject to the terms specified in the
 Universal Copyright Convention.
 Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:\Documents and
 Settings\user\My Documents\Data Yugo\KIK\TESIS\Kuantitatif\Final
 Lama\SS-CFA.Spl:

Raw Data from File DataLisrel.psf
 Asymptotic Covariance Matrix from File DataLisrel.acm
 Latent Variables Strain

Relationships:

!H13 = 1*Strain
 H13 - H15 H17 = Strain

!Set Error Variance of Cohesvns to 0
 !Let Error Covariance of H14 and H16 Free
 !Let Error Covariance of H17 and H16 Free

Admissibility Check Off
 Iterations: 500
 Path Diagram
 End Of Problem

Sample Size = 126

Covariance Matrix

	H13	H14	H15	H17
H13	2.36			
H14	0.91	2.55		
H15	0.62	1.24	2.44	
H17	0.53	0.78	0.89	2.51

Number of Iterations = 5

LISREL Estimates (Robust Maximum Likelihood)

Measurement Equations

H13 = 0.70*Strain, Errorvar.= 1.87 , R² = 0.21
 (0.18) (0.30)
 3.82 6.25

H14 = 1.18*Strain, Errorvar.= 1.16 , R² = 0.55
 (0.15) (0.35)
 8.10 3.35

H15 = 1.05*Strain, Errorvar.= 1.33 , R² = 0.45
 (0.17) (0.36)
 6.35 3.68

H17 = 0.74*Strain, Errorvar.= 1.96 , R² = 0.22
 (0.16) (0.27)
 4.68 7.32

Correlation Matrix of Independent Variables

Strain

 1.00

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 2
 Minimum Fit Function Chi-Square = 2.27 (P = 0.32)
 Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 2.23 (P =
 0.33)
 Satorra-Bentler Scaled Chi-Square = 1.91 (P = 0.38)
 Chi-Square Corrected for Non-Normality = 2.06 (P = 0.36)
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0
 90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 7.63)

Minimum Fit Function Value = 0.018
 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0
 90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.061)
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.17)
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.43

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.14
 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.14 ; 0.21)
 ECVI for Saturated Model = 0.16
 ECVI for Independence Model = 0.79

Chi-Square for Independence Model with 6 Degrees of Freedom =
 90.96

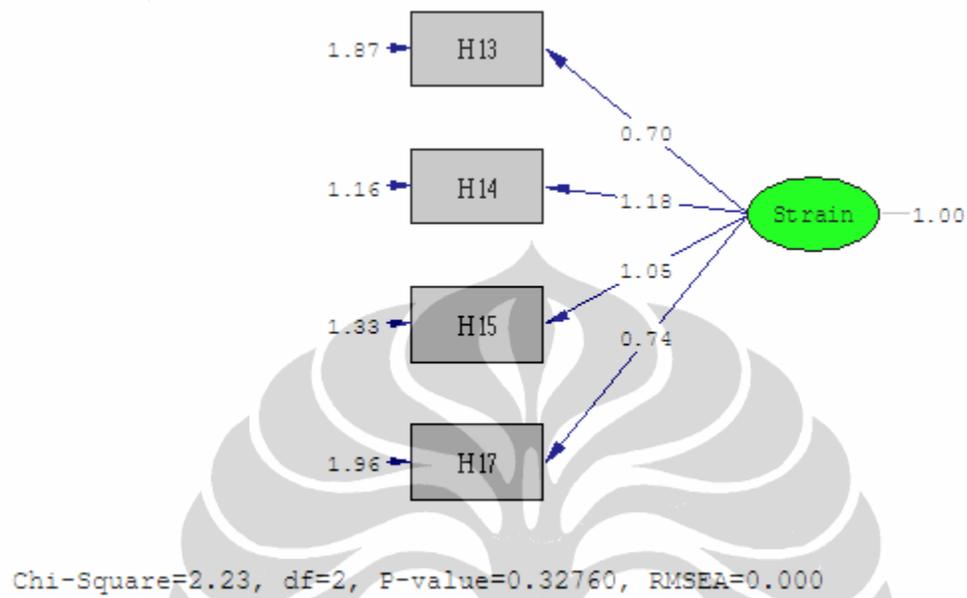
Independence AIC = 98.96
 Model AIC = 18.23
 Saturated AIC = 20.00
 Independence CAIC = 114.30
 Model CAIC = 48.92
 Saturated CAIC = 58.36

Normed Fit Index (NFI) = 0.98
 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.33
 Comparative Fit Index (CFI) = 1.00
 Incremental Fit Index (IFI) = 1.00
 Relative Fit Index (RFI) = 0.94

Critical N (CN) = 603.02

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.066
 Standardized RMR = 0.027
 Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.96
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.20

Time used: 0.219 Seconds



DATE: 5/ 4/2011
 TIME: 7:44

L I S R E L 8.72

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by
 Scientific Software International, Inc.
 7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
 Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
 Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
 Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005
 Use of this program is subject to the terms specified in the
 Universal Copyright Convention.
 Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:\Documents and
 Settings\user\My Documents\Data Yugo\KIK\TESIS\Kuantitatif\Final
 Lama\GSGB-CFA.Spl:

Raw Data from File DataLisrel.psf
 Asymptotic Covariance Matrix from File DataLisrel.acm
 Latent Variables Belief

Relationships:

!H18 = 1*Belef
 H18 - H21 = Belief

Set Error Variance of H19 to 0
 Set Error Variance of Cohesvns to 0
 Set Error Variance of Acohesvns to 0
 Set Error Variance of TaskCnf to 0

Admissibility Check Off

Iterations: 500

Path Diagram

End Of Problem

Sample Size = 126

Covariance Matrix

	H18	H19	H20	H21
	-----	-----	-----	-----
H18	2.12			
H19	1.28	1.83		
H20	0.29	0.65	2.51	
H21	0.35	0.38	0.27	0.89

Number of Iterations = 5

LISREL Estimates (Robust Maximum Likelihood)

Measurement Equations

H18 = 0.95*Belief, Errorvar.= 1.22 , R² = 0.42
 (0.15) (0.29)
 6.32 4.18

H19 = 1.35*Belief,, R² = 1.00
 (0.11)
 12.43

H20 = 0.48*Belief, Errorvar.= 2.28 , R² = 0.093
 (0.16) (0.29)
 3.08 7.82

H21 = 0.28*Belief, Errorvar.= 0.82 , R² = 0.087
 (0.091) (0.19)
 3.07 4.36

Correlation Matrix of Independent Variables

Belief

 1.00

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 3
 Minimum Fit Function Chi-Square = 3.74 (P = 0.29)
 Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 3.46 (P =
 0.33)
 Satorra-Bentler Scaled Chi-Square = 2.47 (P = 0.48)
 Chi-Square Corrected for Non-Normality = 3.44 (P = 0.33)
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0
 90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 7.38)

Minimum Fit Function Value = 0.030
 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0
 90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.059)
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.14)
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.46

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.14
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.14 ; 0.20)
ECVI for Saturated Model = 0.16
ECVI for Independence Model = 0.78

Chi-Square for Independence Model with 6 Degrees of Freedom =
89.53

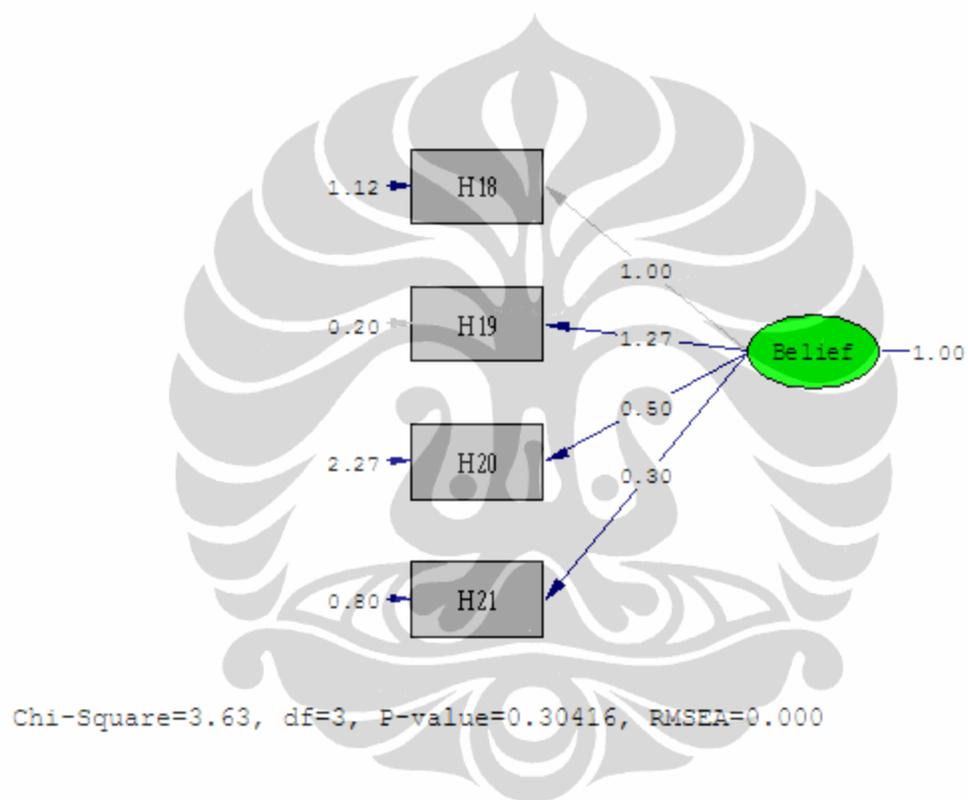
Independence AIC = 97.53
Model AIC = 17.46
Saturated AIC = 20.00
Independence CAIC = 112.88
Model CAIC = 44.32
Saturated CAIC = 58.36

Normed Fit Index (NFI) = 0.97
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.01
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.49
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00
Incremental Fit Index (IFI) = 1.01
Relative Fit Index (RFI) = 0.94

Critical N (CN) = 574.23

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.074
Standardized RMR = 0.042
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.95
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.30

Time used: 0.219 Seconds



DATE: 5/ 4/2011
 TIME: 7:45

L I S R E L 8.72

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by
 Scientific Software International, Inc.
 7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
 Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
 Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
 Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005
 Use of this program is subject to the terms specified in the
 Universal Copyright Convention.
 Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:\Documents and
 Settings\user\My Documents\Data Yugo\KIK\TESIS\Kuantitatif\Final
 Lama\PF-CFA.Spl:

Raw Data from File DataLisrel.psf
 Asymptotic Covariance Matrix from File DataLisrel.acm
 Latent Variables PF

Relationships:

H22 = 1*PF
 H23 - H24 = PF
 Set Error Variance of PF to 1
 Admissibility Check Off
 Iterations: 500
 Path Diagram
 End Of Problem

Sample Size = 126

Covariance Matrix

	H22	H23	H24
	-----	-----	-----
H22	3.16		
H23	0.67	3.28	
H24	0.67	0.74	2.33

W_A_R_N_I_N_G : Both LX(2, 1) and PH(1, 1) are fixed non-zero
 values.

LISREL is unable to generate Starting Values for this model.

The model will be estimated using the NS option.

Number of Iterations = 4

LISREL Estimates (Robust Maximum Likelihood)

Measurement Equations

H22 = 1.00*PF, Errorvar.= 2.30 , R² = 0.30
 (0.26)
 8.73

H23 = 0.83*PF, Errorvar.= 2.60 , R² = 0.21
 (0.26) (0.43)
 3.25 6.01

H24 = 0.80*PF, Errorvar.= 1.70 , R² = 0.28
 (0.20) (0.34)
 4.00 5.04

Correlation Matrix of Independent Variables

PF

 1.00

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 1
 Minimum Fit Function Chi-Square = 0.71 (P = 0.40)
 Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.72 (P = 0.40)

Satorra-Bentler Scaled Chi-Square = 0.58 (P = 0.45)
 Chi-Square Corrected for Non-Normality = 0.58 (P = 0.45)
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0
 90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 5.74)

Minimum Fit Function Value = 0.0057
 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0
 90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.046)
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.21)
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.47

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.088
 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.088 ; 0.13)
 ECVI for Saturated Model = 0.096
 ECVI for Independence Model = 0.22

Chi-Square for Independence Model with 3 Degrees of Freedom =
 22.09

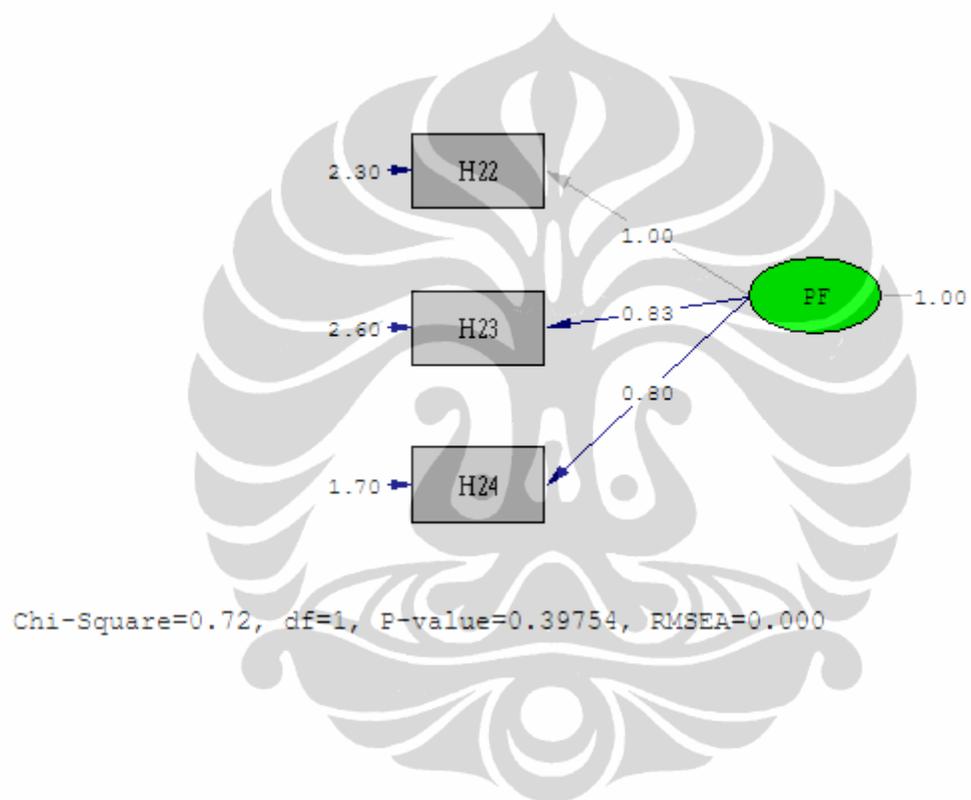
Independence AIC = 28.09
 Model AIC = 10.72
 Saturated AIC = 12.00
 Independence CAIC = 39.59
 Model CAIC = 29.90
 Saturated CAIC = 35.02

Normed Fit Index (NFI) = 0.97
 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.07
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.32
 Comparative Fit Index (CFI) = 1.00
 Incremental Fit Index (IFI) = 1.02
 Relative Fit Index (RFI) = 0.92

Critical N (CN) = 1442.61

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.11
 Standardized RMR = 0.034
 Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.17

Time used: 0.203 Seconds



DATE: 5/ 4/2011
 TIME: 7:46

L I S R E L 8.72

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by
 Scientific Software International, Inc.
 7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
 Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
 Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
 Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005
 Use of this program is subject to the terms specified in the
 Universal Copyright Convention.
 Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:\Documents and
 Settings\user\My Documents\Data Yugo\KIK\TESIS\Kuantitatif\Final
 Lama\MPA-CFA.Spl:

Raw Data from File DataLisrel.psf
 Asymptotic Covariance Matrix from File DataLisrel.acm
 Latent Variables Action

Relationships:

H25 = 1*Action
 H26 - H29 = Action

!Set Error Variance of Action to 0
 Set Error Covariance of H25 and H26 Free

Admissibility Check Off
 Iterations: 500
 Path Diagram
 End Of Problem

Sample Size = 126

Covariance Matrix

	H25	H26	H27	H28	H29
H25	2.47				
H26	1.24	2.31			
H27	1.14	0.58	3.04		
H28	1.20	0.73	2.51	3.04	
H29	0.99	0.76	1.08	1.01	3.16

Number of Iterations = 15

LISREL Estimates (Robust Maximum Likelihood)

Measurement Equations

H25 = 1.00*Action, Errorvar.= 1.90 , R² = 0.23
 (0.21)
 9.01

H26 = 0.57*Action, Errorvar.= 2.12 , R² = 0.080
 (0.16) (0.21)
 3.55 10.17

H27 = 2.08*Action, Errorvar.= 0.56 , R² = 0.82
 (0.38) (0.22)
 5.53 2.59

H28 = 2.11*Action, Errorvar.= 0.51 , R² = 0.83
 (0.37) (0.21)
 5.70 2.48

H29 = 0.90*Action, Errorvar.= 2.70 , R² = 0.15
 (0.22) (0.28)
 4.02 9.59

Error Covariance for H26 and H25 = 0.91
 (0.21)
 4.39

Variances of Independent Variables

Action

 0.57
 (0.21)
 2.78

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 4
 Minimum Fit Function Chi-Square = 9.32 (P = 0.054)
 Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 8.88 (P =
 0.064)
 Satorra-Bentler Scaled Chi-Square = 7.54 (P = 0.11)

Chi-Square Corrected for Non-Normality = 7.27 (P = 0.12)
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 3.54
 90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 15.43)

Minimum Fit Function Value = 0.075
 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.028
 90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.12)
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.084
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.18)
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.15

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.25
 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.21 ; 0.33)
 ECVI for Saturated Model = 0.24
 ECVI for Independence Model = 1.95

Chi-Square for Independence Model with 10 Degrees of Freedom =
 234.06

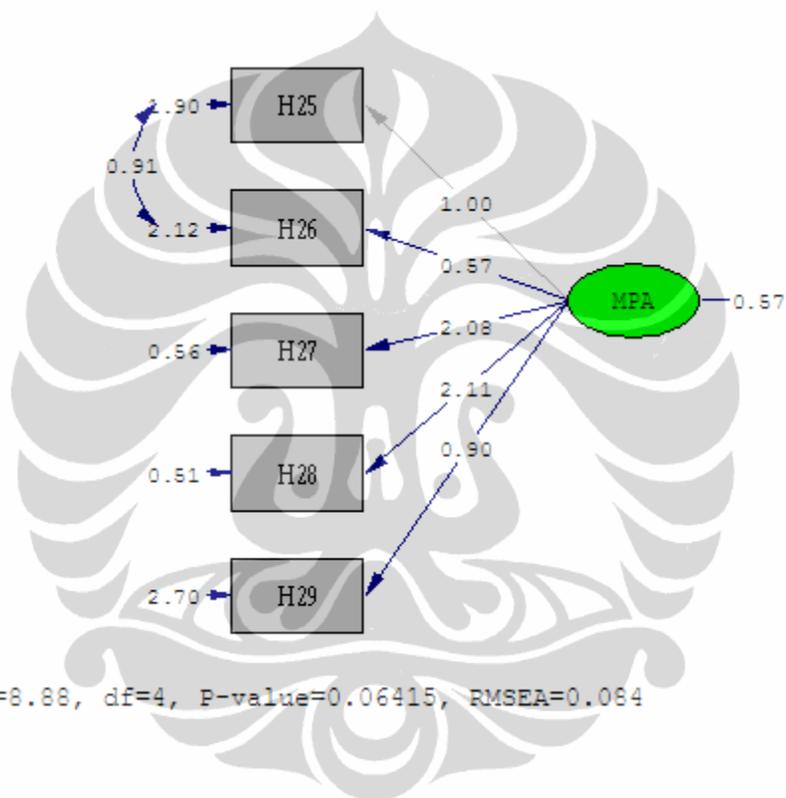
Independence AIC = 244.06
 Model AIC = 30.88
 Saturated AIC = 30.00
 Independence CAIC = 263.25
 Model CAIC = 73.08
 Saturated CAIC = 87.54

Normed Fit Index (NFI) = 0.97
 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.96
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.39
 Comparative Fit Index (CFI) = 0.98
 Incremental Fit Index (IFI) = 0.98
 Relative Fit Index (RFI) = 0.92

Critical N (CN) = 221.12

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.18
 Standardized RMR = 0.064
 Goodness of Fit Index (GFI) = 0.97
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.90
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.26

Time used: 0.203 Seconds



DATE: 5/ 4/2011
 TIME: 7:46

L I S R E L 8.72

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by
 Scientific Software International, Inc.
 7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
 Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
 Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
 Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005
 Use of this program is subject to the terms specified in the
 Universal Copyright Convention.
 Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:\Documents and
 Settings\user\My Documents\Data Yugo\KIK\TESIS\Kuantitatif\Final
 Lama\MPA-CFA.Spl:

Raw Data from File DataLisrel.psf
 Asymptotic Covariance Matrix from File DataLisrel.acm
 Latent Variables Action

Relationships:

H25 = 1*Action
 H26 - H29 = Action

!Set Error Variance of Action to 0
 Set Error Covariance of H25 and H26 Free

Admissibility Check Off
 Iterations: 500
 Path Diagram
 End Of Problem

Sample Size = 126

Covariance Matrix

	H25	H26	H27	H28	H29
H25	2.47				
H26	1.24	2.31			
H27	1.14	0.58	3.04		
H28	1.20	0.73	2.51	3.04	

Satorra-Bentler Scaled Chi-Square = 7.54 (P = 0.11)
 Chi-Square Corrected for Non-Normality = 7.27 (P = 0.12)
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 3.54
 90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 15.43)

Minimum Fit Function Value = 0.075
 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.028
 90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.12)
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.084
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.18)
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.15

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.25
 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.21 ; 0.33)
 ECVI for Saturated Model = 0.24
 ECVI for Independence Model = 1.95

Chi-Square for Independence Model with 10 Degrees of Freedom =
 234.06

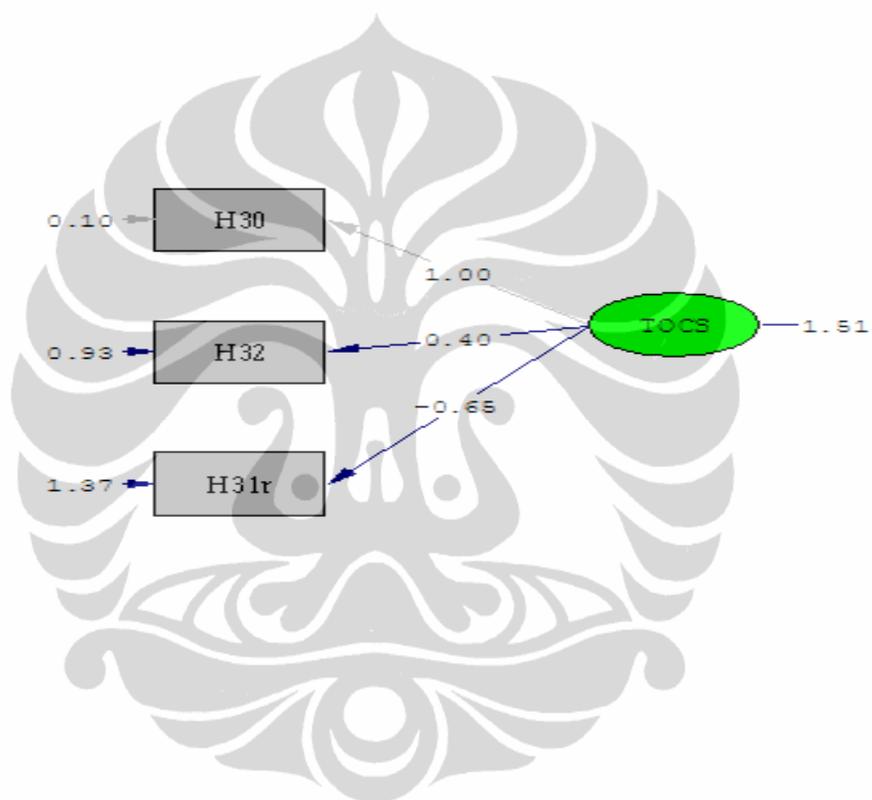
Independence AIC = 244.06
 Model AIC = 30.88
 Saturated AIC = 30.00
 Independence CAIC = 263.25
 Model CAIC = 73.08
 Saturated CAIC = 87.54

Normed Fit Index (NFI) = 0.97
 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.96
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.39
 Comparative Fit Index (CFI) = 0.98
 Incremental Fit Index (IFI) = 0.98
 Relative Fit Index (RFI) = 0.92

Critical N (CN) = 221.12

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.18
 Standardized RMR = 0.064
 Goodness of Fit Index (GFI) = 0.97
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.90
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.26

Time used: 0.203 Seconds



DATE: 5/ 4/2011
 TIME: 7:43

L I S R E L 8.72

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by
 Scientific Software International, Inc.
 7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
 Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
 Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
 Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005
 Use of this program is subject to the terms specified in the
 Universal Copyright Convention.
 Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:\Documents and
 Settings\user\My Documents\Data Yugo\KIK\TESIS\Kuantitatif\Final
 Lama\FANATIK to MPA-SEM.Spl:

Raw Data from File DataLisrel.psf
 Asymptotic Covariance Matrix from File DataLisrel.acm
 Latent Variables MPA FAN

Relationships:

H1 - H5 = FAN
 H25 - H29 = MPA
 MPA = FAN

Set Error Covariance of H1 and H4 Free
 Set Error Covariance of H25 and H26 Free

Admissibility Check Off
 Iterations: 500
 Path Diagram
 End Of Problem

Sample Size = 126

Covariance Matrix

	H25	H26	H27	H28	H29
H1					
H25	2.47				
H26	1.24	2.31			

	H27	1.14	0.58	3.04		
	H28	1.20	0.73	2.51	3.04	
	H29	0.99	0.76	1.08	1.01	3.16
0.93	H1	-0.08	0.00	-0.12	-0.08	-0.10
	H2	0.17	0.16	-0.10	-0.10	0.14
0.32	H3	0.24	0.22	0.04	0.11	0.31
0.31	H4	0.17	0.29	-0.15	-0.07	0.34
0.28	H5	0.14	0.26	-0.10	-0.09	0.02
0.41						

Covariance Matrix

	H2	H3	H4	H5
H2	0.49			
H3	0.35	0.71		
H4	0.42	0.62	0.85	
H5	0.35	0.38	0.43	0.83

Number of Iterations = 20

LISREL Estimates (Robust Maximum Likelihood)

Measurement Equations

$$H25 = 0.75 * MPA, \text{ Errorvar.} = 1.90, R^2 = 0.23$$

(0.21)
9.02

$$H26 = 0.43 * MPA, \text{ Errorvar.} = 2.12, R^2 = 0.079$$

(0.12) (0.21)
3.53 10.17

$$H27 = 1.58 * MPA, \text{ Errorvar.} = 0.55, R^2 = 0.82$$

(0.29) (0.21)
5.52 2.62

$$H28 = 1.59 * MPA, \text{ Errorvar.} = 0.52, R^2 = 0.83$$

(0.28) (0.21)
5.69 2.53

$$H29 = 0.68 * MPA, \text{ Errorvar.} = 2.70, R^2 = 0.15$$

(0.17) (0.28)
4.01 9.59

H1 = 0.54*FAN, Errorvar.= 0.64 , R² = 0.31
 (0.16) (0.24)
 3.32 2.60

H2 = 0.52*FAN, Errorvar.= 0.22 , R² = 0.55
 (0.18) (0.056)
 2.94 3.97

H3 = 0.70*FAN, Errorvar.= 0.22 , R² = 0.69
 (0.13) (0.054)
 5.20 4.13

H4 = 0.84*FAN, Errorvar.= 0.15 , R² = 0.82
 (0.12) (0.069)
 7.10 2.18

H5 = 0.56*FAN, Errorvar.= 0.51 , R² = 0.38
 (0.15) (0.12)
 3.80 4.38

Error Covariance for H26 and H25 = 0.92
 (0.21)
 4.40

Error Covariance for H4 and H1 = -0.17
 (0.051)
 -3.36

Structural Equations

MPA = - 0.048*FAN, Errorvar.= 1.00 , R² = 0.0023
 (0.081) (0.36)
 -0.58 2.77

Correlation Matrix of Independent Variables

FAN
1.00

Covariance Matrix of Latent Variables

	MPA	FAN
MPA	1.00	
FAN	-0.05	1.00

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 32

Minimum Fit Function Chi-Square = 56.20 (P = 0.0052)
 Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 57.93 (P = 0.0033)

Satorra-Bentler Scaled Chi-Square = 44.95 (P = 0.064)
 Chi-Square Corrected for Non-Normality = 62.69 (P = 0.00095)
 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 12.95
 90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 34.76)

Minimum Fit Function Value = 0.45
 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.10
 90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.28)
 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.057
 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.093)
 P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.070

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.83
 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.62 ; 0.90)
 ECVI for Saturated Model = 0.88
 ECVI for Independence Model = 5.28

Chi-Square for Independence Model with 45 Degrees of Freedom = 639.93

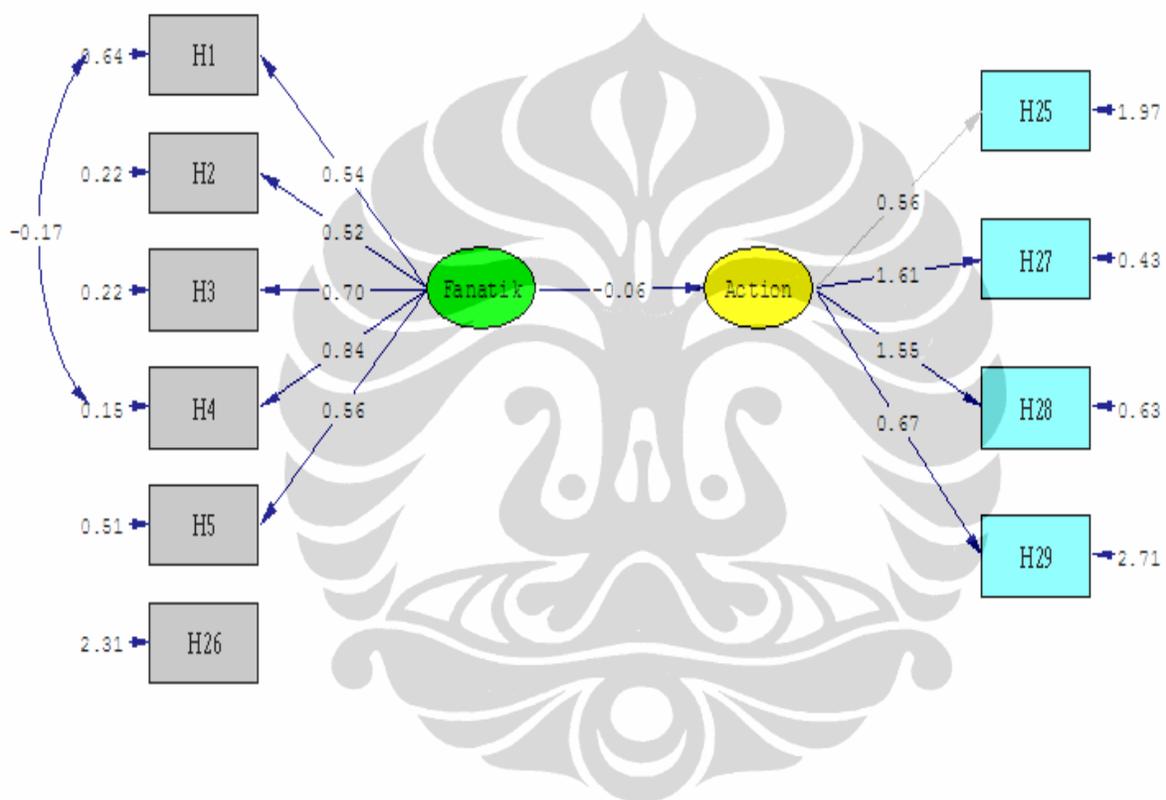
Independence AIC = 659.93
 Model AIC = 103.93
 Saturated AIC = 110.00
 Independence CAIC = 698.29
 Model CAIC = 192.16
 Saturated CAIC = 321.00

Normed Fit Index (NFI) = 0.93
 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.97
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.66
 Comparative Fit Index (CFI) = 0.98
 Incremental Fit Index (IFI) = 0.98
 Relative Fit Index (RFI) = 0.90

Critical N (CN) = 149.76

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.15
 Standardized RMR = 0.095
 Goodness of Fit Index (GFI) = 0.92
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.85
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.53

Time used: 0.328 Seconds



DATE: 3/20/2011
 TIME: 0:23

L I S R E L 8.72

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by
 Scientific Software International, Inc.
 7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
 Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
 Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
 Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005
 Use of this program is subject to the terms specified in the
 Universal Copyright Convention.
 Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file H:\Final Revisi\SEM-01 SS-SC-
 GSGB-PF-MPA-TOCS-(FIT)-REV.Spl:

Raw Data from File GABUNGAN.psf
 Asymptotic Covariance Matrix from File GABUNGAN.acm
 Latent Variables SConduct SStrain GBelief PartFact Action Control

Relationships:

H1 - H9 H11 = SConduct ! Catatan H 10 dibuang
 H13 - H15 H17 = SStrain
 H18 - H21 = GBelief
 H22r H23 H24 = PartFact
 H25 - H29 = Action
 H30 H31 H32 = Control

!SC = SConduct
 !SS = SStrain
 !GSGB = GBelief
 !PF = PartFact
 !MPA = Action
 !TOCS = Control

!Set Error Variance of SC to 0.5
 !Set Error Variance of SS to 0.26
 !Set Error Variance of GSGB to 0.5
 !Set Error Variance of PF to 0.5
 !Set Error Variance of MPA to 0.5
 !Set Error Variance of TOCS to -0.047

!Set Error Variance of H10 to 0.7 !ubah
 !Set Error Variance of H11 to 0.7

!Set the covariance between H25 and H26 Free

```
SConduct    = SStrain
PartFact    = SConduct SStrain GBelief Control
Action      = Control SConduct PartFact
```

```
!GBelief    = SStrain
!PartFact   = GBelief
!Action     = PartFact
!Control    = Action
```

```
Set Error Variance of SStrain to 1 !ubah
Set Error Variance of Action to 1 !ubah
Set Error Variance of SConduct to 1
Set Error Variance of PartFact to 0.01
Set Error Variance of GBelief to 0.01
Set Error Variance of Control to 0.01
```

!-----

```
Set the covariance between H25 and H26 Free
Set the covariance between H3 and H4 Free
Set the covariance between H6 and H7 Free
```

```
!Set the covariance between H15 and H14 Free
!Set the covariance between H18 and H17 Free
!Set the covariance between H8 and H9 Free
```

```
!Set the covariance between H2 and H7 Free
!Set the covariance between H19 and H21 Free
!Set the covariance between H2 and H32 Free
```

```
!Set the covariance between H29 and H24 Free
!Set the covariance between H9 and H8 Free
!Set the covariance between H26 and H21 Free
```

```
!Set the covariance between H7 and H2 Free
!Set the covariance between H14 and H13 Free
!Set the covariance between H6 and H2 Free
```

```
!Set the covariance between H4 and H1 Free
!Set the covariance between H29 and H13 Free
!Set the covariance between H11 and H9 Free
```

```
!Set the covariance between H9 and H6 Free
!Set the covariance between H8 and H6 Free
!Set the covariance between H7 and H8 Free
```

```
!Set the covariance between H1 and H2 Free
!Set the covariance between H15 and H17 Free
!Set the covariance between H14 and H17 Free
```

```
!Set the covariance between H19 and H26 Free
```

!Set the covariance between H18 and H30 Free
!Set the covariance between H17 and H19 Free
!Set the covariance between H17 and H26 Free

!Set the covariance between H19 and H30 Free
!Set the covariance between H19 and H27 Free
!Set the covariance between H18 and H20 Free
!Set the covariance between H13 and H20 Free

!Set the covariance between H18 and H21 Free
!Set the covariance between H17 and H30 Free
!Set the covariance between H19 and H21 Free
!Set the covariance between H15 and H18 Free

!Set the covariance between H13 and H18 Free
!Set the covariance between H21 and H27 Free
!Set the covariance between H14 and H27 Free
!Set the covariance between H24 and H24 Free

!Set the covariance between H24 and H20 Free
!Set the covariance between H21 and H28 Free
!Set the covariance between H31r and H20 Free
!Set the covariance between H24 and H27 Free

!Set the covariance between H24 and H32 Free
!Set the covariance between H32 and H30 Free
!Set the covariance between H29 and H30 Free
!Set the covariance between H27 and H30 Free

!Set the covariance between H6 and H29 Free
!Set the covariance between H4 and H27 Free
!Set the covariance between H6 and H21 Free
!Set the covariance between H29 and H7 Free

!Set the covariance between H31r and H28 Free
!Set the covariance between H22r and H28 Free
!Set the covariance between H29 and H32 Free
!Set the covariance between H25 and H31r Free

!Set the covariance between H24 and H28 Free
!Set the covariance between H22r and H27 Free
!Set the covariance between H31r and H26 Free

!Set the covariance between H22r and H18 Free
!Set the covariance between H25 and H29 Free
!Set the covariance between H13 and H17 Free
!Set the covariance between H22r and H20 Free
!Set the covariance between H3 and H8 Free
!Set the covariance between H11 and H30 Free
!Set the covariance between H4 and H22r Free
!Set the covariance between H8 and H31r Free

! =====

Admissibility Check Off

Iterations: 500

OPTIONS: MI EF

Path Diagram

End Of Problem

Sample Size = 126

Covariance Matrix

	H1	H2	H3	H4	H5
H6					
H1	0.93				
H2	0.32	0.49			
H3	0.31	0.35	0.71		
H4	0.28	0.42	0.62	0.85	
H5	0.41	0.35	0.38	0.43	0.83
H6	0.49	0.38	0.37	0.55	0.60
1.64					
H7	0.51	0.28	0.31	0.46	0.58
1.18					
H8	0.45	0.29	0.30	0.32	0.37
0.71					
H9	0.25	0.23	0.31	0.32	0.22
0.24					
H11	-0.07	0.22	0.18	0.31	0.21
0.53					
H23	0.08	-0.09	-0.05	-0.09	-0.11
0.28					
H24	0.03	0.06	0.30	0.33	0.10
0.05					
H25	-0.08	0.17	0.24	0.17	0.14
0.19					
H26	0.00	0.16	0.22	0.29	0.26
0.26					
H27	-0.12	-0.10	0.04	-0.15	-0.10
0.07					
H28	-0.08	-0.10	0.11	-0.07	-0.09
0.00					
H29	-0.10	0.14	0.31	0.34	0.02
0.20					
H22r	0.12	-0.03	-0.07	0.02	-0.07
0.00					
H13	0.17	0.26	0.43	0.45	0.29
0.42					
H14	0.04	0.08	0.17	0.05	-0.08
0.01					
H15	0.19	0.11	0.26	0.16	-0.02
0.21					

0.51	H17	0.44	0.26	0.16	0.11	0.27
0.11	H18	0.45	0.17	0.14	0.10	0.20
0.15	H19	0.27	0.16	0.11	0.03	0.11
0.17	H20	0.17	-0.05	0.02	-0.02	0.04
0.03	H21	0.17	0.20	0.22	0.20	0.15
0.08	H30	0.21	0.08	0.14	0.07	0.17
0.20	H31	0.19	0.19	0.29	0.29	0.17
0.14	H32	0.21	0.32	0.26	0.26	0.26

Covariance Matrix

	H7	H8	H9	H11	H23	
H24	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	H7	1.64				
	H8	0.71	1.16			
	H9	0.38	0.51	1.01		
	H11	0.48	0.48	0.58	3.47	
	H23	0.17	0.20	0.14	0.89	3.28
	H24	0.08	0.02	0.28	0.62	0.74
2.33	H25	-0.07	-0.10	-0.10	0.34	1.01
0.77	H26	0.17	0.11	0.03	0.67	0.40
0.78	H27	-0.21	0.02	-0.24	0.28	1.38
0.58	H28	-0.19	0.05	-0.20	0.06	1.45
0.77	H29	-0.11	0.04	0.29	0.47	0.96
1.07	H22r	0.02	0.10	0.19	0.05	-0.67
0.67						-
0.38	H13	0.40	0.24	0.33	0.84	0.15
0.47	H14	-0.10	0.04	0.16	0.64	0.49
0.64	H15	0.20	0.25	0.17	0.67	0.68
0.70	H17	0.34	0.42	0.21	0.60	0.36
0.57	H18	0.04	0.14	0.04	-0.37	0.16
0.46	H19	0.23	0.11	0.14	0.12	0.28
0.58	H20	0.26	0.07	0.32	0.79	0.99

0.44	H21	0.09	0.15	0.13	0.30	0.00
0.40	H30	0.24	0.38	0.28	0.42	0.29
0.59	H31	0.18	0.44	0.20	0.29	0.53
0.30	H32	0.18	0.21	0.30	0.37	-0.21

Covariance Matrix

	H25	H26	H27	H28	H29	
H22r						
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	H25	2.47				
	H26	1.24	2.31			
	H27	1.14	0.58	3.04		
	H28	1.20	0.73	2.51	3.04	
	H29	0.99	0.76	1.08	1.01	3.16
	H22r	-0.96	-0.46	-1.09	-0.86	-0.44
3.16	H13	0.38	0.47	0.31	0.24	0.88
0.10	H14	0.79	0.57	0.74	0.73	0.63
0.18	H15	0.84	0.82	0.59	0.61	0.56
0.25	H17	0.43	0.87	0.35	0.29	0.45
0.14	H18	0.44	0.50	0.28	0.28	0.54
0.60	H19	0.29	0.59	-0.03	0.14	0.35
0.31	H20	0.04	0.80	0.07	0.16	0.48
0.29	H21	0.25	0.57	-0.11	0.01	0.33
0.22	H30	0.29	0.47	0.27	0.28	0.78
0.23	H31	0.78	0.67	0.79	0.59	0.66
0.59	H32	0.14	0.37	-0.03	-0.10	0.41
0.03						

Covariance Matrix

	H13	H14	H15	H17	H18	
H19						
	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	H13	2.36				
	H14	0.91	2.55			
	H15	0.62	1.24	2.44		
	H17	0.53	0.78	0.89	2.51	
	H18	0.14	0.26	0.53	1.30	2.12

1.83	H19	0.26	0.23	0.58	1.04	1.28
0.65	H20	-0.12	0.29	0.55	0.50	0.29
0.38	H21	0.34	0.23	0.33	0.44	0.35
0.57	H30	0.37	0.18	0.33	0.49	0.67
0.24	H31	0.46	0.21	0.51	0.25	0.32
0.33	H32	0.42	0.34	0.36	0.37	0.26

Covariance Matrix

	H20	H21	H30	H31	H32
H20	2.51				
H21	0.27	0.89			
H30	0.33	0.23	1.61		
H31	-0.03	0.24	0.98	2.01	
H32	0.06	0.24	0.60	0.43	1.17

Number of Iterations =154

LISREL Estimates (Robust Maximum Likelihood)

Measurement Equations

H1 = 0.54*SConduct, Errorvar.= 0.58 , R² = 0.37
 (0.11) (0.20)
 4.72 2.86

H2 = 0.48*SConduct, Errorvar.= 0.21 , R² = 0.56
 (0.14) (0.052)
 3.49 4.09

H3 = 0.52*SConduct, Errorvar.= 0.40 , R² = 0.44
 (0.13) (0.13)
 4.03 3.14

H4 = 0.59*SConduct, Errorvar.= 0.44 , R² = 0.49
 (0.11) (0.14)
 5.21 3.19

H5 = 0.60*SConduct, Errorvar.= 0.41 , R² = 0.50
 (0.099) (0.092)
 5.99 4.51

H6 = 0.76*SConduct, Errorvar.= 0.97 , R² = 0.41

	(0.076)	(0.18)
	9.94	5.42
H7 = 0.70*SConduct, Errorvar.= 1.06 , R ² = 0.35	(0.11)	(0.22)
	6.43	4.89
H8 = 0.61*SConduct, Errorvar.= 0.72 , R ² = 0.38	(0.088)	(0.13)
	6.89	5.74
H9 = 0.44*SConduct, Errorvar.= 0.78 , R ² = 0.23	(0.12)	(0.18)
	3.66	4.38
H11 = 0.44*SConduct, Errorvar.= 3.24 , R ² = 0.066	(0.13)	(0.27)
	3.37	12.18
H23 = 8.53*PartFact, Errorvar.= 2.17 , R ² = 0.34	(1.71)	(0.33)
	4.99	6.52
H24 = 5.81*PartFact, Errorvar.= 1.81 , R ² = 0.22	(1.32)	(0.26)
	4.42	7.02
H25 = 0.44*Action, Errorvar.= 1.84 , R ² = 0.26	(0.11)	(0.21)
	4.04	8.92
H26 = 0.26*Action, Errorvar.= 2.09 , R ² = 0.092	(0.089)	(0.21)
	2.89	10.17
H27 = 0.88*Action, Errorvar.= 0.58 , R ² = 0.81	(0.21)	(0.21)
	4.25	2.77
H28 = 0.89*Action, Errorvar.= 0.55 , R ² = 0.82	(0.21)	(0.19)
	4.24	2.94
H29 = 0.40*Action, Errorvar.= 2.64 , R ² = 0.17	(0.13)	(0.28)
	3.22	9.41
H22r = - 5.94*PartFact, Errorvar.= 2.62 , R ² = 0.17	(1.69)	(0.29)
	-3.52	9.09
H13 = 0.65*SStrain, Errorvar.= 1.95 , R ² = 0.18	(0.18)	(0.31)

Structural Equations

$$\text{SConduct} = 0.42 * \text{SStrain}, \text{Errorvar.} = 1.00, R^2 = 0.15$$

(0.16)
2.57

$$\text{PartFact} = -0.018 * \text{SConduct} + 0.073 * \text{SStrain} - 0.24 * \text{GBelief} + 0.34 * \text{Control}, \text{Errorvar.} = 0.0100, R^2 = 0.35$$

(0.014) (0.035) (0.27) (0.27)
-1.25 2.06 -0.90 1.25

$$\text{Action} = -0.20 * \text{SConduct} + 12.34 * \text{PartFact} - 1.39 * \text{Control}, \text{Errorvar.} = 1.00, R^2 = 0.69$$

(0.15) (4.80) (3.43)
-1.27 2.57 -0.41

Reduced Form Equations

$$\text{SConduct} = 0.42 * \text{SStrain} + 0.0 * \text{GBelief} + 0.0 * \text{Control}, \text{Errorvar.} = 1.00, R^2 = 0.15$$

(0.16)
2.57

$$\text{PartFact} = 0.066 * \text{SStrain} - 0.24 * \text{GBelief} + 0.34 * \text{Control}, \text{Errorvar.} = 0.010, R^2 = 0.33$$

(0.032) (0.27) (0.27)
2.03 -0.90 1.25

$$\text{Action} = 0.73 * \text{SStrain} - 2.97 * \text{GBelief} + 2.76 * \text{Control}, \text{Errorvar.} = 2.70, R^2 = 0.16$$

(0.37) (3.15) (2.18)
1.96 -0.94 1.27

Covariance Matrix of Independent Variables

	SStrain	GBelief	Control
	-----	-----	-----
SStrain	1.00		
GBelief	0.07 (0.01) 5.53	0.01	
Control	0.04 (0.01) 3.02	0.00 (0.00) 3.53	0.01

Covariance Matrix of Latent Variables

	SConduct	PartFact	Action	SStrain	GBelief
Control					

SConduct	1.18					
PartFact	0.01	0.02				
Action	-0.15	0.18	3.20			
SStrain	0.42	0.06	0.65	1.00		
GBelief	0.03	0.00	0.03	0.07	0.01	
Control	0.02	0.01	0.04	0.04	0.00	

0.01

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 363

Minimum Fit Function Chi-Square = 688.56 (P = 0.0)

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 684.39 (P = 0.0)

Satorra-Bentler Scaled Chi-Square = 565.43 (P = 0.00)

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 202.43

90 Percent Confidence Interval for NCP = (141.91 ; 270.89)

Minimum Fit Function Value = 5.51

Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.62

90 Percent Confidence Interval for F0 = (1.14 ; 2.17)

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.067

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.056 ; 0.077)

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 6.63

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (5.19 ; 6.22)

ECVI for Saturated Model = 6.96

ECVI for Independence Model = 23.40

Chi-Square for Independence Model with 406 Degrees of Freedom = 2867.11

Independence AIC = 2925.11

Model AIC = 828.39

Saturated AIC = 870.00

Independence CAIC = 3036.37

Model CAIC = 1104.60

Saturated CAIC = 2538.78

Normed Fit Index (NFI) = 0.80

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.91

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.72

Comparative Fit Index (CFI) = 0.92

Incremental Fit Index (IFI) = 0.92

Relative Fit Index (RFI) = 0.78

Critical N (CN) = 95.75

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.23

Standardized RMR = 0.11

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.73

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.67
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.61

Modification Indices and Expected Change

The Modification Indices Suggest to Add the
 Path to from Decrease in Chi-Square New Estimate
 H29 PartFact 11.5 10.22

Modification Indices for LAMBDA-Y

	SConduct	PartFact	Action
	-----	-----	-----
H1	- -	0.08	0.19
H2	- -	0.67	0.22
H3	- -	4.11	4.85
H4	- -	1.98	2.13
H5	- -	0.43	0.08
H6	- -	1.23	2.65
H7	- -	0.90	2.24
H8	- -	0.80	0.62
H9	- -	0.02	1.05
H11	- -	5.18	1.46
H23	0.47	- -	0.65
H24	2.10	- -	3.37
H25	0.35	3.33	- -
H26	4.21	7.21	- -
H27	0.78	0.38	- -
H28	0.13	0.32	- -
H29	3.22	11.54	- -
H22r	0.52	- -	0.34

Expected Change for LAMBDA-Y

	SConduct	PartFact	Action
	-----	-----	-----
H1	- -	-0.19	-0.02
H2	- -	-0.37	-0.01
H3	- -	0.86	0.06
H4	- -	-0.63	-0.04
H5	- -	-0.39	-0.01
H6	- -	0.78	0.07
H7	- -	-0.69	-0.07
H8	- -	0.67	0.04
H9	- -	-0.10	-0.05
H11	- -	3.43	0.11
H23	-0.12	- -	0.12
H24	0.20	- -	-0.31
H25	0.07	3.87	- -
H26	0.24	8.34	- -
H27	-0.08	-0.63	- -
H28	-0.03	-0.53	- -
H29	0.26	10.22	- -
H22r	0.11	- -	-0.11

The Modification Indices Suggest to Add the

Path to	from	Decrease in Chi-Square	New Estimate
H14	GBelief	9.3	-6.40
H17	GBelief	19.7	9.50
H19	Control	8.6	-11.72
H32	SStrain	25.8	1.75
H32	GBelief	14.0	22.64

Modification Indices for LAMBDA-X

	SStrain	GBelief	Control
	-----	-----	-----
H13	- -	5.23	0.89
H14	- -	9.27	2.06
H15	- -	0.94	0.11
H17	- -	19.69	0.00
H18	0.28	- -	0.56
H19	- -	- -	8.63
H20	1.12	- -	0.03
H21	- -	- -	1.41
H30	- -	- -	- -
H31	0.39	4.91	- -
H32	25.77	14.02	- -

Expected Change for LAMBDA-X

	SStrain	GBelief	Control
	-----	-----	-----
H13	- -	-6.19	1.73
H14	- -	-6.40	-2.49
H15	- -	-1.75	-0.53
H17	- -	9.50	-0.02
H18	0.12	- -	1.42
H19	- -	- -	-11.72
H20	0.30	- -	0.31
H21	- -	- -	1.53
H30	- -	- -	- -
H31	0.12	-4.22	- -
H32	1.75	22.64	- -

Modification Indices for BETA

	SConduct	PartFact	Action
	-----	-----	-----
SConduct	- -	- -	0.16
PartFact	- -	- -	0.00
Action	- -	- -	- -

Expected Change for BETA

	SConduct	PartFact	Action
	-----	-----	-----
SConduct	- -	- -	0.03
PartFact	- -	- -	0.00
Action	- -	- -	- -

Modification Indices for GAMMA

	SStrain	GBelief	Control
	-----	-----	-----
SConduct	- -	- -	- -
PartFact	- -	- -	- -
Action	0.72	4.84	- -

Expected Change for GAMMA

	SStrain	GBelief	Control
	-----	-----	-----
SConduct	- -	- -	- -
PartFact	- -	- -	- -
Action	-0.25	-5.77	- -

No Non-Zero Modification Indices for PHI

Modification Indices for PSI

	SConduct	PartFact	Action
	-----	-----	-----
SConduct	- -	- -	- -
PartFact	- -	- -	- -
Action	0.20	0.00	- -

Expected Change for PSI

	SConduct	PartFact	Action
	-----	-----	-----
SConduct	- -	- -	- -
PartFact	- -	- -	- -
Action	0.17	0.00	- -

The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance Between and Decrease in Chi-Square New Estimate

H4	H1	7.9	-0.12
H7	H2	11.5	-0.15
H9	H8	9.8	0.23
H11	H1	9.0	-0.39
H29	H24	9.4	0.63
H15	H14	16.0	0.82
H18	H1	8.4	0.22
H18	H11	15.3	-0.69
H18	H17	13.8	0.53
H20	H11	9.3	0.75
H20	H23	15.6	0.85
H20	H26	11.8	0.61
H21	H26	10.5	0.33
H32	H2	13.0	0.16

Modification Indices for THETA-EPS

	H1	H2	H3	H4	H5
	-----	-----	-----	-----	-----
H6	- -	- -	- -	- -	- -
H1	- -	- -	- -	- -	- -

	H2	0.11	- -			
	H3	1.94	0.52	- -		
	H4	7.91	6.50	- -	- -	
	H5	0.95	0.20	0.49	0.02	- -
	H6	0.32	0.30	2.13	2.33	0.28
- -						
	H7	1.35	11.53	1.09	0.00	1.44
- -						
	H8	1.52	4.29	0.09	2.74	2.06
1.07						
	H9	0.46	0.48	0.96	0.19	4.32
6.79						
	H11	9.03	0.18	1.28	0.48	1.19
0.31						
	H23	0.73	2.72	1.99	0.03	1.71
1.19						
	H24	0.96	0.49	0.09	3.84	0.01
2.02						
	H25	1.00	4.58	1.05	0.03	0.14
0.81						
	H26	1.01	0.32	0.95	1.73	0.76
0.16						
	H27	0.00	0.00	0.02	1.64	0.05
2.20						
	H28	0.63	0.52	0.98	0.10	0.01
0.56						
	H29	3.27	0.65	0.00	3.50	1.24
0.62						
	H22r	0.83	0.89	0.20	0.08	1.48
0.09						

Modification Indices for THETA-EPS

	H7	H8	H9	H11	H23
H24					

	H7	- -			
	H8	3.43	- -		
	H9	2.65	9.79	- -	
	H11	0.09	1.70	6.37	- -
	H23	0.34	1.35	1.63	6.12
	H24	0.17	2.79	3.61	2.01
- -					
	H25	1.99	5.00	0.73	0.10
0.39					
	H26	0.31	0.02	0.04	3.61
4.13					
	H27	0.70	0.43	1.33	0.34
7.86					
	H28	0.18	0.89	0.29	3.87
0.00					
	H29	2.68	1.14	4.00	0.89
9.45					
	H22r	0.08	1.29	2.06	1.15
0.78					

Modification Indices for THETA-EPS

	H25	H26	H27	H28	H29
H22r					
H25	--				
H26	--	--			
H27	0.48	1.97	--		
H28	1.07	0.23	--	--	
H29	1.97	1.47	0.47	3.17	--
H22r	3.70	0.41	2.31	2.54	0.47

Expected Change for THETA-EPS

	H1	H2	H3	H4	H5
H6					
H1	--				
H2	0.02	--			
H3	0.05	0.02	--		
H4	-0.12	0.07	--	--	
H5	0.06	0.02	0.03	-0.01	--
H6	-0.04	0.02	-0.06	0.06	0.03
H7	0.08	-0.15	-0.04	0.00	0.07
H8	0.09	-0.09	-0.01	-0.07	-0.09
H9	-0.05	-0.03	0.04	-0.02	-0.12
H11	-0.39	-0.04	-0.09	0.06	-0.13
H23	0.10	-0.12	-0.10	-0.01	-0.13
H24	-0.10	-0.04	0.02	0.13	-0.01
H25	-0.09	0.12	0.06	-0.01	0.03
H26	-0.09	-0.03	-0.06	0.08	0.07
H27	0.00	0.00	0.01	-0.06	0.01
H28	0.06	-0.03	0.04	-0.01	0.01
H29	-0.21	0.06	0.00	0.15	-0.11
H22r	0.11	-0.07	-0.03	0.02	-0.13

Expected Change for THETA-EPS

	H7	H8	H9	H11	H23
H24					

	H7	- -				
	H8	0.13	- -			
	H9	0.12	0.23	- -		
	H11	0.04	0.19	0.37	- -	
	H23	0.07	0.15	0.16	0.63	- -
	H24	0.04	-0.19	0.21	0.32	-0.04
- -						
	H25	-0.13	-0.22	-0.08	-0.06	0.25
0.10						
	H26	0.06	0.01	-0.02	0.40	-0.29
0.33						
	H27	-0.06	0.05	-0.09	0.09	-0.06
0.37						-
	H28	0.03	0.07	-0.04	-0.31	0.10
0.00						
	H29	-0.21	-0.14	0.26	0.25	0.12
0.63						
	H22r	-0.04	0.15	0.19	0.29	0.18
0.20						-
	Expected Change for THETA-EPS					
		H25	H26	H27	H28	H29
H22r						
	H25	- -				
	H26	- -	- -			
	H27	-0.08	-0.16	- -		
	H28	-0.13	0.06	- -	- -	
	H29	0.25	0.23	-0.11	-0.29	- -
	H22r	-0.35	0.12	-0.23	0.24	0.17
- -						
	Modification Indices for THETA-DELTA-EPS					
		H1	H2	H3	H4	H5
H6						
	H13	2.72	0.04	0.49	1.80	0.10
0.00						
	H14	0.75	0.12	1.29	0.31	2.26
0.01						
	H15	0.04	0.64	1.34	0.06	4.75
0.11						
	H17	2.44	0.09	1.71	1.27	0.32
1.95						
	H18	8.38	0.06	0.17	0.08	1.36
0.24						
	H19	0.19	0.26	0.00	1.00	0.26
0.17						
	H20	0.14	4.75	0.04	0.20	0.18
0.00						

3.00	H21	0.24	3.43	1.66	0.03	0.00
2.65	H30	0.35	6.54	0.01	2.23	0.26
0.36	H31	0.38	0.49	0.18	1.54	0.46
0.72	H32	0.37	12.96	0.07	0.24	0.12

Modification Indices for THETA-DELTA-EPS

		H7	H8	H9	H11	H23
H24		-----	-----	-----	-----	-----
0.01	H13	0.20	0.95	0.69	3.55	0.87
0.33	H14	1.17	0.46	0.79	2.52	0.04
0.07	H15	0.19	0.30	0.04	1.83	0.99
1.72	H17	0.40	0.99	0.32	0.06	0.24
0.05	H18	3.35	0.24	2.99	15.29	2.77
0.02	H19	2.10	0.69	0.06	0.00	0.87
2.25	H20	1.25	0.01	4.86	9.34	15.55
6.61	H21	0.00	0.04	0.00	1.77	1.21
0.59	H30	3.99	4.30	2.05	0.69	0.03
0.29	H31	0.90	1.87	0.38	0.12	0.10
1.71	H32	0.41	2.69	0.73	0.27	5.95

Modification Indices for THETA-DELTA-EPS

		H25	H26	H27	H28	H29
H22r		-----	-----	-----	-----	-----
0.21	H13	0.00	0.12	0.07	0.54	7.33
0.66	H14	1.94	0.79	0.26	0.05	0.01
0.37	H15	2.05	0.12	0.05	0.04	0.11
0.56	H17	2.28	5.05	0.17	0.81	0.24
4.31	H18	0.73	1.97	1.44	0.52	0.05
0.05	H19	0.20	0.26	3.81	1.40	0.64

6.48	H20	5.44	11.76	0.73	0.03	1.25
0.62	H21	0.01	10.53	4.41	0.00	2.76
0.57	H30	1.81	0.03	0.95	0.33	3.85
1.66	H31	3.52	0.02	4.63	1.57	0.22
0.73	H32	0.03	2.09	0.00	1.33	1.69

Expected Change for THETA-DELTA-EPS

		H1	H2	H3	H4	H5	
H6							
0.01	H13	-0.17	0.01	0.05	0.09	0.03	-
0.01	H14	-0.09	0.02	0.07	-0.04	-0.13	-
0.03	H15	-0.02	-0.05	0.07	-0.02	-0.18	-
0.14	H17	0.15	0.02	-0.08	-0.07	0.05	
0.04	H18	0.22	0.01	-0.02	0.02	0.08	
0.03	H19	-0.03	0.02	0.00	-0.05	-0.03	-
0.00	H20	0.04	-0.15	-0.01	-0.03	-0.04	
0.11	H21	-0.03	0.08	0.05	0.01	0.00	-
0.12	H30	0.04	-0.11	0.00	-0.07	0.03	-
0.05	H31	-0.05	0.04	0.02	0.07	-0.05	
0.06	H32	-0.04	0.16	0.01	0.02	0.02	-

Expected Change for THETA-DELTA-EPS

		H7	H8	H9	H11	H23	
H24							
0.01	H13	0.05	-0.11	0.10	0.44	-0.19	
0.10	H14	-0.12	-0.08	0.10	0.37	-0.04	-
0.04	H15	0.05	0.06	0.02	0.29	0.19	
0.22	H17	-0.06	0.10	-0.06	0.05	-0.09	
0.03	H18	-0.15	-0.04	-0.15	-0.69	-0.26	

0.02	H19	0.11	-0.06	0.02	0.01	0.13	-
0.29	H20	0.13	-0.01	0.27	0.75	0.85	
0.28	H21	0.00	-0.01	0.00	0.19	-0.14	
0.10	H30	0.15	0.16	0.11	0.13	0.03	-
0.08	H31	-0.09	0.13	-0.06	-0.07	0.05	
0.16	H32	-0.05	-0.13	0.07	0.08	-0.34	

Expected Change for THETA-DELTA-EPS

		H25	H26	H27	H28	H29	
H22r							
0.10	H13	0.00	0.06	0.03	-0.09	0.57	
0.17	H14	0.22	-0.15	0.06	0.03	0.02	
0.12	H15	0.21	0.05	-0.03	-0.02	-0.06	
0.15	H17	-0.22	0.34	0.05	-0.10	-0.09	
0.34	H18	0.10	-0.18	0.11	-0.07	0.04	-
0.03	H19	-0.05	0.06	-0.17	0.10	-0.12	-
0.58	H20	-0.39	0.61	-0.11	-0.02	0.25	
0.10	H21	-0.01	0.33	-0.16	0.00	0.22	-
0.12	H30	-0.14	0.02	-0.08	0.05	0.28	
0.23	H31	0.24	0.02	0.22	-0.13	-0.08	-
0.12	H32	-0.02	0.16	0.00	-0.10	0.18	

Modification Indices for THETA-DELTA

		H13	H14	H15	H17	H18	
H19							
	H13	- -					
	H14	6.41	- -				
	H15	0.00	15.98	- -			
	H17	2.32	1.76	4.55	- -		
	H18	4.31	1.95	2.37	13.81	- -	
	H19	0.21	2.64	0.02	1.00	- -	
3.40	H20	2.83	0.19	2.02	0.03	7.57	

1.97	H21	2.81	0.09	0.20	0.01	1.53
0.05	H30	0.00	1.03	1.89	0.23	2.47
1.67	H31	0.93	0.04	1.79	4.22	0.39
0.09	H32	2.03	1.38	0.30	0.03	1.98

Modification Indices for THETA-DELTA

	H20	H21	H30	H31	H32
H20	- -				
H21	0.66	- -			
H30	0.95	0.67	- -		
H31	1.97	1.00	- -	- -	
H32	0.60	2.20	- -	0.83	- -

Expected Change for THETA-DELTA

	H13	H14	H15	H17	H18
H13	- -				
H14	0.50	- -			
H15	0.00	0.82	- -		
H17	-0.29	-0.27	-0.50	- -	
H18	-0.30	-0.20	-0.21	0.53	- -
H19	-0.06	-0.21	-0.02	0.13	- -
H20	-0.33	0.08	0.26	-0.03	-0.48
H21	0.19	0.03	0.05	0.01	-0.13
H30	0.00	-0.13	-0.17	0.06	0.17
H31	0.15	-0.03	0.19	-0.29	-0.07
H32	0.18	0.15	0.06	0.02	-0.13

Expected Change for THETA-DELTA

	H20	H21	H30	H31	H32
H20	- -				
H21	0.10	- -			
H30	0.13	-0.06	- -		
H31	-0.23	0.09	- -	- -	
H32	-0.10	0.11	- -	-0.14	- -

Maximum Modification Index is 25.77 for Element (11, 1) of LAMBDA-X

Total and Indirect Effects

Total Effects of KSI on ETA

	SStrain	GBelief	Control
	-----	-----	-----
SConduct	0.42 (0.16) 2.57	- -	- -
PartFact	0.07 (0.03) 2.03	-0.24 (0.27) -0.90	0.34 (0.27) 1.25
Action	0.73 (0.37) 1.96	-2.97 (3.15) -0.94	2.76 (2.18) 1.27

Indirect Effects of KSI on ETA

	SStrain	GBelief	Control
	-----	-----	-----
SConduct	- -	- -	- -
PartFact	-0.01 (0.01) -1.04	- -	- -
Action	0.73 (0.37) 1.96	-2.97 (3.15) -0.94	4.16 (4.21) 0.99

Total Effects of ETA on ETA

	SConduct	PartFact	Action
	-----	-----	-----
SConduct	- -	- -	- -
PartFact	-0.02 (0.01) -1.25	- -	- -
Action	-0.42 (0.19) -2.23	12.34 (4.80) 2.57	- -

Largest Eigenvalue of $B \cdot B'$ (Stability Index) is 152.306

Indirect Effects of ETA on ETA

SConduct	PartFact	Action
-----	-----	-----

SConduct	- -	- -	- -
PartFact	- -	- -	- -
Action	-0.22 (0.19) -1.19	- -	- -

Total Effects of ETA on Y

	SConduct	PartFact	Action
	-----	-----	-----
H1	0.54 (0.11) 4.72	- -	- -
H2	0.48 (0.14) 3.49	- -	- -
H3	0.52 (0.13) 4.03	- -	- -
H4	0.59 (0.11) 5.21	- -	- -
H5	0.60 (0.10) 5.99	- -	- -
H6	0.76 (0.08) 9.94	- -	- -
H7	0.70 (0.11) 6.43	- -	- -
H8	0.61 (0.09) 6.89	- -	- -
H9	0.44 (0.12) 3.66	- -	- -
H11	0.44 (0.13) 3.37	- -	- -
H23	-0.15	8.53	- -

	(0.12)	(1.71)	
	-1.33	4.99	
H24	-0.10	5.81	--
	(0.08)	(1.32)	
	-1.29	4.42	
H25	-0.19	5.49	0.44
	(0.07)	(1.39)	(0.11)
	-2.62	3.96	4.04
H26	-0.11	3.18	0.26
	(0.05)	(1.12)	(0.09)
	-2.22	2.84	2.89
H27	-0.37	10.85	0.88
	(0.13)	(2.04)	(0.21)
	-2.93	5.31	4.25
H28	-0.37	10.93	0.89
	(0.13)	(1.97)	(0.21)
	-2.92	5.54	4.24
H29	-0.17	4.99	0.40
	(0.07)	(1.32)	(0.13)
	-2.52	3.78	3.22
H22r	0.11	-5.94	--
	(0.08)	(1.69)	
	1.29	-3.52	

Indirect Effects of ETA on Y

	SConduct	PartFact	Action
	-----	-----	-----
H1	--	--	--
H2	--	--	--
H3	--	--	--
H4	--	--	--
H5	--	--	--
H6	--	--	--
H7	--	--	--
H8	--	--	--
H9	--	--	--

H11	- -	- -	- -
H23	-0.15 (0.12) -1.33	- -	- -
H24	-0.10 (0.08) -1.29	- -	- -
H25	-0.19 (0.07) -2.62	5.49 (1.39) 3.96	- -
H26	-0.11 (0.05) -2.22	3.18 (1.12) 2.84	- -
H27	-0.37 (0.13) -2.93	10.85 (2.04) 5.31	- -
H28	-0.37 (0.13) -2.92	10.93 (1.97) 5.54	- -
H29	-0.17 (0.07) -2.52	4.99 (1.32) 3.78	- -
H22r	0.11 (0.08) 1.29	- -	- -

Total Effects of KSI on Y

	SStrain	GBelief	Control
	-----	-----	-----
H1	0.23 (0.12) 1.84	- -	- -
H2	0.20 (0.13) 1.61	- -	- -
H3	0.22 (0.12) 1.74	- -	- -
H4	0.25 (0.13)	- -	- -

	1.93		
H5	0.25 (0.13) 1.98	--	--
H6	0.32 (0.13) 2.50	--	--
H7	0.29 (0.12) 2.40	--	--
H8	0.26 (0.12) 2.10	--	--
H9	0.19 (0.11) 1.67	--	--
H11	0.19 (0.10) 1.78	--	--
H23	0.56 (0.26) 2.14	-2.05 (2.16) -0.95	2.87 (2.09) 1.37
H24	0.38 (0.20) 1.87	-1.40 (1.54) -0.91	1.96 (1.40) 1.40
H25	0.32 (0.16) 2.08	-1.32 (1.40) -0.94	1.23 (0.96) 1.27
H26	0.19 (0.11) 1.63	-0.76 (0.87) -0.88	0.71 (0.58) 1.24
H27	0.64 (0.28) 2.26	-2.61 (2.73) -0.96	2.43 (1.82) 1.33
H28	0.64 (0.29) 2.23	-2.63 (2.76) -0.95	2.45 (1.84) 1.33
H29	0.29 (0.15) 2.00	-1.20 (1.25) -0.96	1.12 (0.90) 1.25

H22r	-0.39	1.43	-2.00
	(0.18)	(1.52)	(1.53)
	-2.11	0.94	-1.30

Time used: 24.422 Seconds





LAMPIRAN 2

PEDOMAN KUESIONE UNTUK SUPPORTER (KOMUNITAS JAKMANIA)

KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
UNIVERSITAS INDONESIA

Saudara yang saya hormati,

Saya adalah mahasiswa S2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (UI) yang sedang menulis Tesis tentang :OPTIMALISASI KEPENGURUSAN JAKMANIA DALAM RANGKA MENGURANGI TINDAK KEKERASAN KOLEKTIF SUPORTER PERSIJA OLEH POLRES JAKARTA SELATAN. Untuk itu, saya menggunakan kuesioner sebagai alat bantu dalam mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh para supporter

Oleh karena itu, bantuan dan partisipasi Anda dalam mengisi kuesioner ini sangat saya harapkan. Waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi kuesioner adalah sekitar 10 menit. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam mengisi kuesioner ini sehingga saya berharap agar Anda dapat mengisi kuesioner ini sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya. Saya akan menjaga kerahasiaan jawaban dan identitas Anda karena hanya digunakan untuk tujuan penelitian semata.

Hasil dari penelitian ini sangat tergantung oleh kelengkapan dan kejujuran Anda dalam menjawab. Untuk itu mohon untuk dapat memeriksa kembali kelengkapan jawaban Anda. Anda diminta untuk menggambarkan diri Anda sendiri, bukan bagaimana seharusnya ataupun bagaimana sebaiknya.

Atas perhatian dan partisipasi Anda, saya mengucapkan banyak terimakasih,.

Jakarta, Maret 2011

Hormat saya,

Bambang Yugo Pamungkas
NPM 0906595200

DATA RESPONDEN

Informasi yang anda berikan berikut ini adalah untuk tujuan pengolahan statistic Silanglah (x) pada huruf yang tepat menggambarkan keadaan anda.

1. Apakah anda : a. PRIA b. WANITA
2. Kelompok usia anda : a. DIBAWAH 16 b. 17-24 c. 25-35 d. 36-45 e. diatas 45 tahun
3. Lingkarilah nama group suporter Anda ?
 - a. JAKMANIA b.PERSITA c. PERSIKOTA d. PERSIPASI
 - e. LAIN-LAIN (mohon dituliskan) :
4. Sudah berapa lama Anda bergabung dalam Group Suporter diatas?
 - a. Dibawah 6 bulan b. antara 6 bulan sd 1 tahun c. antara 1 sd 2 tahun d. antara 2 sd 4 tahun
 - e. Diatas 4 tahun
5. Perkiraan jumlah suporter ditempat tinggal Anda yang hadir di sini :
 - a. 1 – 100 b. 100 - 200 c. 200 – 500 d. 500+
6. Level dari jabatan yang anda pegang saat ini dalam kepengurusan suporter :
 - a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Bendahara e. Kordinator lapangan e. lainnya
7. Lingkarilah nama wilayah group suporter Anda ?
 - a. Jakarta Barat b. Jakarta Timur c. Jakarta Utara d. Jakarta Selatan e. Jakarta Pusat f. Sekitar Jakarta

====

A. Jenis kendaraan yang saya gunakan untuk menonton pertandingan sepakbola ini adalah (boleh lebih dari satu jawaban) :

- _____ 1. Sepeda Motor
 _____ 2. Mobil Pribadi
 _____ 3. Metromini / Bis Kota
 _____ 4. Busway
 _____ 5. Kereta
 _____ 6. Tidak pakai kendaraan (jalan kaki)

B. Sudah berapa kali Anda menonton prertandingan bola dalam setahun terakhir ini?

- _____ 1. Seminggu sekali
 _____ 2. Dua minggu sekali
 _____ 3. Sebulan sekali
 _____ 4. Setiap 2 bulan sekali

- _____ 5. Setiap 6 bulan sekali
- _____ 6. Setahun sekali
- _____ 7. Tak pernah

C. Apa yang biasa Anda lakukan / tunjukan selama pertandingan berlangsung ?

- _____ 1. Berbicara
- _____ 2. Mengepalkan tangan ke atas, untuk memberi semangat pada pemain
- _____ 3. Meneriakan slogan
- _____ 4. Mengomentari pemain lawan
- _____ 5. Mengomentari wasit
- _____ 6. Mengomentari supporter lawan
- _____ 7. Hanya menonton saja

D. Olah Raga apa saja yang Anda sukai selain Sepakbola.

- _____ 1. Basket
- _____ 2. Voli
- _____ 3. Tenis Meja
- _____ 4. Berenang
- _____ 5. Futsal
- _____ 6. Bulu Tangkis
- _____ 7. Lain-lain sebutkan:

E. Dengan siapa Anda biasanya menonton pertandingan Sepakbola ?

- _____ 1. Keluarga
- _____ 2. Dengan 1 sd 2 orang teman
- _____ 3. Tetangga
- _____ 4. Teman kantor
- _____ 5. Dengan beberapa supporter yang saya temui di stadion
- _____ 6. Dengan rombongan supporter dari daerah saya.
- _____ 7. Sendirian

F. Alasan Anda menonton pertandingan Sepakbola ?

- _____ 1. Sekedar untuk bersenang-senang
- _____ 2. Menemui teman yang ada di stadion

- _____ 3. Melihat pertandingan kesebelasan yang baik
 _____ 4. Untuk melihat team / kesebelasan favorit saya
 _____ 5. Karena saya olahragawan
 _____ 6. Saya sudah merencanakannya dengan keluarga untuk nonton pertandingan bersama-sama
 _____ 7. Karena tidak ada kegiatan lain di rumah

G. Pada saat Anda menonton sepakbola, tiba-tiba terjadi suatu tindakan yang menyimpang. Mana saja yang biasanya Anda temui?

- _____ 1. Diam saja
 _____ 2. Menyerukan kata-kata kasar
 _____ 3. Melempar koin
 _____ 4. Mendorong-dorong
 _____ 5. Melempar tempat duduk
 _____ 6. Melemparkan benda-benda sekitar
 _____ 7. Memukul
 _____ 8. Penghinaan yang berbaur SARA

H. Tentukan pilihan anda berdasarkan **KESETUJUAN** anda pada pernyataan-pernyataan di bawah ini. Pilihlah dengan memberi silang (X) pada :

• angka 1 (satu) bila anda sangat tidak setuju (STS) ,	• angka 4 (empat) bila anda cenderung setuju (CS) ,
• angka 2 (dua) bila tidak setuju (TS) ,	• angka 5 (lima) bila anda setuju (S) ,
• angka 3 (tiga) bila anda cenderung tidak setuju (CTS) ,	• angka 6 (enam) bila anda sangat setuju (SS)

1	Saya memahami tugas dan peran sebagai seorang supporter	1	2	3	4	5	6
2	Saya cinta dan setia serta bangga pada Persija	1	2	3	4	5	6
3	Demi Persija apapun kulakukan	1	2	3	4	5	6
4	Dukungan supporter penting bagi kemenangan tim sepakbola, maka saya selalu ingin mendampingi dan mendukung Persija bertanding	1	2	3	4	5	6
5	Saya selalu menargetkan agar tim sepakbola kami menang	1	2	3	4	5	6
6	Salah satu atau semua anggota keluarga saya suka sepakbola dan pendukung Persija	1	2	3	4	5	6
7	Orang yang tinggal serumah dengan saya juga suka sepakbola dan pendukung Persija	1	2	3	4	5	6
8	Tetangga dan teman saya sekampung merupakan supporter Persija	1	2	3	4	5	6
9	Orang yang tinggal disekitar saya ada juga yang menjadi anggota Jakmania	1	2	3	4	5	6
10	Saya menonton sepakbola ini diajak bersama-sama oleh teman	1	2	3	4	5	6
11	Menurut saya orang Jakarta dikatakan "gaul" jika mendukung tim Persija	1	2	3	4	5	6

12	Menurut saya dikatakan laki-laki apabila suka dan cinta dengan sepakbola.	1	2	3	4	5	6
13	Saya sudah sangat lama menunggu dan antri sebelum pertandingan dimulai	1	2	3	4	5	6
14	Kodisi badan saya cukup lelah dan capek saat pertandingan berlangsung	1	2	3	4	5	6
15	Saat pertandingan berlangsung perasaan saya sangat cemas	1	2	3	4	5	6
16	Saya melihat ada kesalahan wasit yang menyebabkan kekalahan tim sepakbola kami	1	2	3	4	5	6
17	Kekalahan tim kami dalam pertandingan tidak bisa diterima bila tim lawan bermain curang	1	2	3	4	5	6
18	Perasaan kami sangat kecewa ketika wasit mengambil keputusan yang salah (kontroversial)	1	2	3	4	5	6
19	Saya merasa sangat marah apabila tim lawan bermain kasar dan curang	1	2	3	4	5	6
20	Kami berteriak dan bernyanyi yel-yel menyoraki wasit dan tim lawan yang kami anggap curang	1	2	3	4	5	6
21	Kami mengikuti sorakan dan nyanyian yel-yel yang koordinator suarakan	1	2	3	4	5	6
22	Pada saat itu Anda melihat ada penonton yang lari kelapangan dan memukul wasit atau pemain Persija lalu beberapa suporter secara spontan ke lapangan juga. Anda hanya diam saja ditempat.	1	2	3	4	5	6
23	Pada saat konflik dengan wasit, tim kami (Jakmania) siap bertempur dengan tim lawan	1	2	3	4	5	6
24	Kerusuhan terjadi biasanya disulut oleh ketidakpuasan yang salah satunya adalah dianulirnya gol yang sudah masuk ke tim lawan	1	2	3	4	5	6
25	Kami mengikuti apa yang dilakukan oleh koordinator untuk melampiaskan kekecewaan	1	2	3	4	5	6
26	Saya mengikuti tindakan yang dilakukan oleh orang dalam kelompok kami sebagai kebersamaan Jakmania	1	2	3	4	5	6
27	Ketika pertandingan usai, para suporter yang timnya kalah biasanya ugul-ugalan di jalanan dan membahayakan pengguna jalan	1	2	3	4	5	6
28	Sasaran amuk massa di stadion yang sering terjadi adalah pengrusakan spanduk suporter, pembatas lapangan, fasilitas stadion, dan lain-lain yang ada disekitar stadion	1	2	3	4	5	6
29	Karena beberapa sebab, kerusuhan terjadi. Sikap saya adalah bergabung dengan tim suporter kami (Jakmania) dan siap mempertahankan diri dengan peralatan yang ada	1	2	3	4	5	6
30	Penyelesaian konflik menjadi tanggungjawab tugas koordinator lapangan dan aparat hukum (kepolisian)	1	2	3	4	5	6
31	Peran aparat hukum (kepolisian) tidak selalu berhasil dalam meredam amuk massa suporter	1	2	3	4	5	6
32	Koordinator kami selalu memberikan pengarahan untuk antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan	1	2	3	4	5	6

Terima Kasih
Atas Bantuan Dan Kerjasama Anda

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEJABAT POLRES METRO JAKARTA SELATAN

1. Menurut pandangan Saudara tentang sepakbola, bagaimanakah perkembangan sepakbola Persija terkait penyelenggaraan kompetisi sepakbola Indonesia khususnya di Jakarta ?
2. Apakah dalam setiap pertandingan yang melibatkan Persija selalu dilakukan pengamanan ? Dan apabila diadakan pengamanan apakah pola setiap pengamanan dilakukan secara terjadi atau berkesinambungan sesuai tingkat kerawanan terkait suporter sepakbola ?
3. Apakah dalam setiap diadakan pertandingan yang melibatkan tim sepakbola Persija selalu dihadiri oleh para Jakmania ? Dan apa pengaruh atau dampak yang ditimbulkan atas kehadiran Jakmania.
4. Bagaimana pandangan Saudara apabila terjadi suatu kerusuhan sepakbola yang melibatkan Jakmania ?
 - a. Bagaimana bentuk kerusuhan dan sering menggunakan kekerasan ? Mengapa kerusuhan bisa terjadi ? Dan apakah pada setiap kompetisi selalu terjadi kerusuhan ?
 - b. Menurut saudara apakah yang melakukan kerusuhan menggunakan atribut jakmania ?
 - c. Di mana saja biasa kerusuhan itu terjadi ?
 - d. Menurut Saudara siapakah yang bertanggungjawab atas kerusuhan itu ?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Polres Metro Jakarta Selatan dalam menanggulangi kerusuhan sepakbola terkait tindak kekerasan yang dilakukan Jakmania ?
 - a. Bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan dalam menanggulangi kerusuhan sepak bola terkait tindak kekerasan oleh Jakmania ?
 - b. Bagaimana bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan ?
 - c. Saat terjadi kerusuhan apa yang dilakukan pihak Polres metro Jakarta Selatan ?
6. Dengan melihat lokasi kantor pengurus atau *basecamp* Jakmania yang terletak di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan, upaya apa yang dilakukan pihak Polres Jakarta Selatan mengenai hal ini ? Dan apakah selama ini pihak Polres Metro Jakarta Selatan melibatkan pihak pengurus Jakmania dalam mencegah tindak kekerasan oleh Jakmania ?
7. Menurut saudara siapa saja yang seharusnya terlibat dalam menanggulangi kerusuhan sepakbola khususnya tindak kekerasan oleh Jakmania ?
8. Adakah tambahan informasi atau jawaban yang anda miliki ?

Terima Kasih
Atas Bantuan Dan Kerjasama Anda

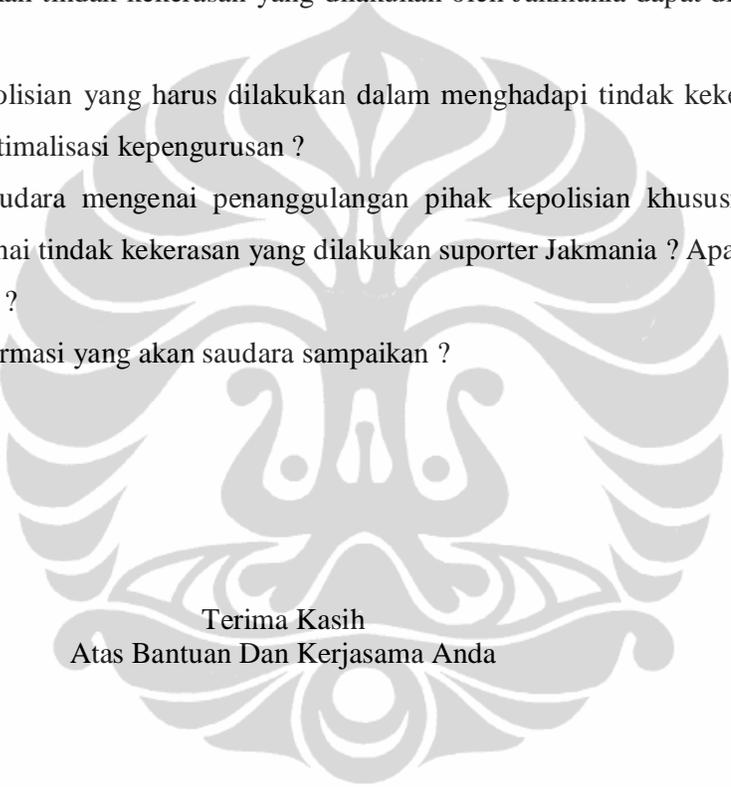
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGURUS JAKMANIA

1. Pada awalnya, bagaimana sejarah berdirinya Jakmania ? Dan perkembangan sampai dengan sekarang.
2. Menurut saudara, bagaimana arti kehadiran suporter khususnya keberadaan Jakmania dalam setiap laga pertandingan Persija ?
3. Bagaimana peran kepengurusan Jakmania dalam mengkoordinasi para anggota Jakmania ?
4. Apabila terjadi suatu kerusuhan sepakbola yang melibatkan tindak kekerasan oleh Jakmania, bagaimana peran saudara selaku pengurus Jakmania ?
5. Seberapa besar peran Kepengurusan Jakmania dalam mengkoordinir para anggotanya terkait mencegah tindakan kekerasan para anggota Jakmania ?
6. Apakah pihak Polres Metro Jakarta Selatan pernah melakukan koordinasi dengan pihak pengurus Jakmania ? Apabila pernah dalam bentuk apa dan sudah berapa kali ?
7. Dalam mencegah terjadinya terjadinya tindak kekerasan, apakah pihak Polres Metro Jakarta Selatan selalu melakukan koordinasi yang bersifat rutin dan atau insidentil ?
8. Apakah anda sebagai pengurus Jakmania pernah dipanggil oleh pihak kepolisian terkait kejadian tindak kekerasan yang dilakukan anggota Jakmania ?
9. Pihak mana saja yang selalu memberikan bantuan atau dorongan atau bimbingan kepada pengurus Jakmania terkait dengan pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan para anggota Jakmania ?
10. Sampai dengan sekarang berapakah jumlah anggota Jakmania yang terdaftar di kepengurusan Jakmania ? Dan menurut saudara masih adakah supporter Jakmania yang belum terdaftar menjadi anggota (termasuk Jakmania yang menggunakan atribut Jakmania)
11. Adakah tambahan informasi atau jawaban yang anda miliki ?

Terima Kasih
Atas Bantuan Dan Kerjasama Anda

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PSIKOLOG, PSSI, DAN PENGAWAS KEPOLISIAN

1. Pada awalnya, bagaimana sejarah berdirinya Jakmania ? Dan perkembangan sampai dengan sekarang.
2. Menurut saudara, bagaimana arti kehadiran suporter khususnya keberadaan Jakmania dalam setiap laga pertandingan Persija ?
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai hubungan antara fanatisme suporter Jakmania dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh mereka ?
4. Menurut saudara, apakah tindak kekerasan yang dilakukan oleh Jakmania dapat diidentifikasi secara akurat ?
5. Bagaimana peran kepolisian yang harus dilakukan dalam menghadapi tindak kekerasan Jakmania ? Dengan melakukan optimalisasi kepengurusan ?
6. Apakah tanggapan saudara mengenai penanggulangan pihak kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Selatan mengenai tindak kekerasan yang dilakukan suporter Jakmania ? Apabila kurang sesuai bagaimana seharusnya ?
7. Adakah tambahan informasi yang akan saudara sampaikan ?



Terima Kasih
Atas Bantuan Dan Kerjasama Anda



LAMPIRAN 3



the  akmania

Foto 1
Logo Jakmania



Foto 2
Suporter Jakmania Menuju Gelora Bung Karno
(diambil saat Penyebaran Kuesioner)



Foto 3
Situasi Suporter Jakmania di Dalam Stadion Gelora Bung Karno
(diambil saat Penyebaran Kuesioner)

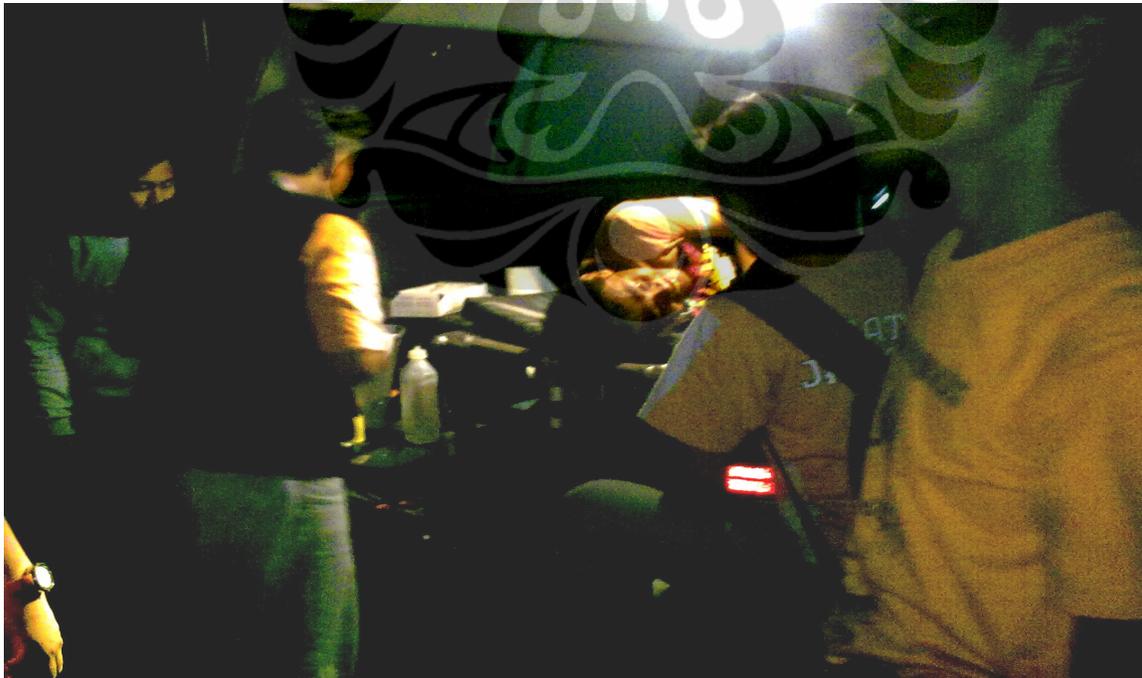


Foto 4
Salah Satu Korban Perkelahian Jakmania Yang Kejadian Tersebut Tidak Teridentifikasi
oleh Kepolisian Luka Kepala dan Kaki Korban Perkelahian Jakmania
(diambil saat Penyebaran Kuesioner)



Foto 5

Luka Kepala dan Kaki Korban Perkelahian Jakmania Yang Kejadian Tersebut Tidak Teridentifikasi oleh Kepolisian (diambil saat Penyebaran Kuesioner)



Foto 7

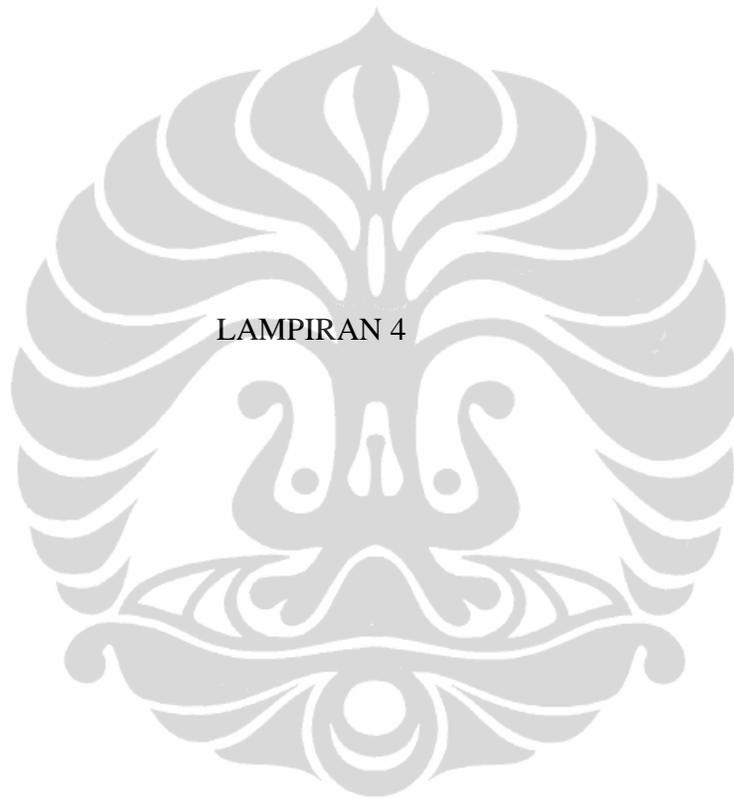
Suporter Persija Jakarta The Jakmania Mengamuk dan Merusak Kantor Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) tanggal 31 Maret 2011, Setelah Melawan Persija

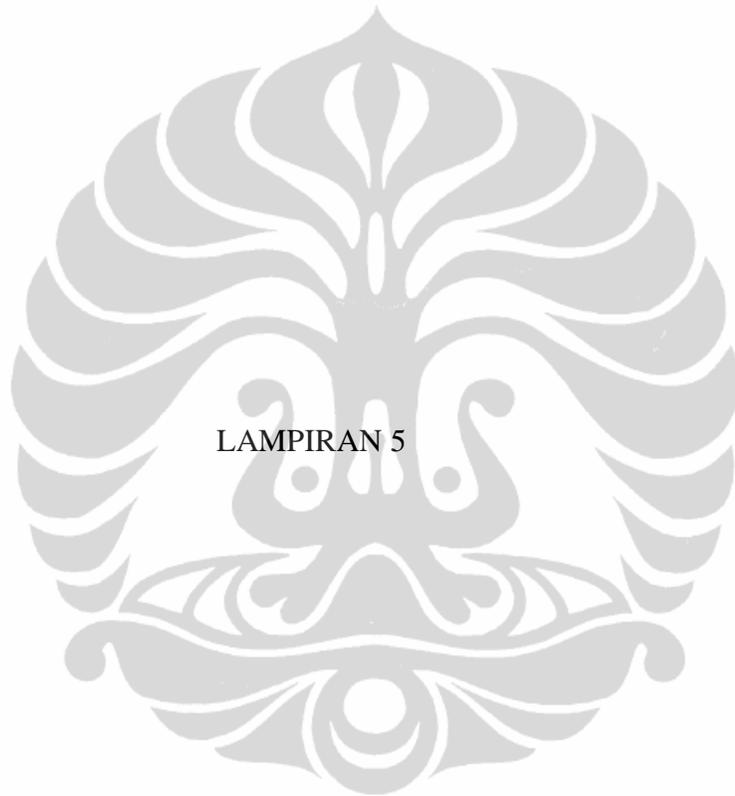


Foto 8
Suporter Jakmania Berkelahi dengan Suporter Persib Tahun 2010 Silam.



Foto 9
Pengurus Jakmania Mengadakan Jumpa Pers dan Pertemuan Rutin
(dari sebelah kiri Humas, Ketua Umum, Ketua Harian)





LAMPIRAN 5

RIWAYAT HIDUP PENULIS

- N a m a : BAMBANG YUGO PAMUNGKAS
 Pangkat / NRP : AKP / 78051190
 Tempat, Tgl Lahir : Boyolali, 14 Mei 1978
 Suku Bangsa : Jawa
 A g a m a : Islam
 Nama Istri : Hj. SITI SUTINAH S. SH. Msi
 Tempat, Tgl Lahir : Ujung Pandang, 7 Maret 1984
 Suku Bangsa : Mandar
 A g a m a : Islam
 Pekerjaan : PNS
 Nama Anak : 1. SATYA ADJIE PRAYUGO
 (Lahir di Ujung Pandang, Tanggal 7 Desember 2007)
 Pendidikan : 1. UMUM 2. KEPOLISIAN
 SDN Th. 1990 AKPOL Th. 2000
 SMPN Th. 1993 PTIK Th. 2007
 SMAN Th. 1996
 S1 Hukum Th. 2006
 3. KEJURUAN
 Jurlan PA Lidik Krim Th. 2004
 4. KURSUS
 Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (ILO) Th. 2003
 Law Enforcement Intelligence Program (AFP) Th. 2004
 Intelligence Analysis Development Program (JCLEC) Th. 2008
 Riwayat Pangkat : 1. IPDA TMT 1 Desember 2000
 2. IPTU TMT 1 Januari 2003
 3. AKP TMT 1 Januari 2006
 Riwayat Jabatan : 1. Pama Polda Sulawesi Selatan Th. 2001
 2. Kaur Pamsan Sat Intelkam Polres Pangkep Th. 2002

3. Kanit III Kam Sat Intelkam Polres Pangkep Th. 2003
4. Kanit IV Satgas Sintuwo Maroso IV BKO BAINTELKAM
Th. 2003
5. Kasat Intelkam Polres Mamuju Th. 2004
6. Kabag Jarlat SPN Jayapura Th. 2007
7. Kasat Intelkam Polres Merauke Th. 2007
8. Pama STIK (Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan S2 KIK-UI
Angkatam XIV) Th. 2009

